DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Mandala V No.67, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640

RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI DKI JAKARTA

2020-2024

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan nilai manfaatnya secara berkelanjutan, perlu disusun suatu perencanaan yang terpadu/komprehensif, efektif dan partisipatif di Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh berbagai sektor sehingga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat dilakukan secara sinergis oleh instansi lintas sektor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam konservasi keanekaragaman hayati dan berkolaborasi untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sesuai pedoman dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Penyusunan rencana ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mengemban tugas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati daerah, namun tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah banyak membantu, baik dari pemerintah pusat, riset/akademisi, lembaga-lembaga konservasi, dan komunitas masyarakat. Dengan demikian, kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak yang membantu penyusunan laporan ini.

Kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati di DKI Jakarta mempertimbangkan Dokumen *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020, RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022, berbagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dokumen perencanaan instansi terkait.

Semoga rencana induk ini dapat memberikan informasi bagi pengambil kebijakan dalam melakukan tindakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, November 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Ir. H. Andono Warih, M.Sc
NIP 196801091996031001

Tim Penyusun : Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 671 Tahun 2019)
Sekretariat : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Tim Konsultan : PT. Matrasarakan Sinergita

RINGKASAN EKSEKUTIF

DKI Jakarta secara ekologis memiliki keanekaragaman yang tinggi. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir dengan pulau-pulau kecil dan kawasan lahan basah dengan banyaknya situ dan aliran sungai. Dalam tinjauan ekoregion wilayah DKI Jakarta terbagi menjadi beberapa wilayah ekoregion. Wilayah laut DKI Jakarta termasuk kedalam ekoregion Laut Jawa, wilayah daratan pulau dan daratan termasuk Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilegon-Indramayu- Pekalongan (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara), dan Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Serang-Tangerang-Depok (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur), serta Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral Jawa (Jakarta Utara dan Kep. Seribu). Kondisi tersebut menunjukkan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun sebagaimana terjadi di hampir seluruh belahan daerah di Indonesia, saat ini kondisi keaneakaraman hayati, khususnya di wilayah perkotaan mengalami tantangan kemerosotan keanekaragaman hayati yang luar biasa berat. Hilangnya keanekaragaman hayati telah mengalami masa kritis. Dalam Publikasi LIPI (2014) menyatakan, jenis ikan pada daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane periode tahun 1910-2009 telah hilang hingga 75,6% atau sebanyak 102 jenis. Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati tersebut, diakibatkan oleh perubahan habitat, masuknya spesies asing invasif, pencemaran, eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim (*climate change*).

Di tengah ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati keberpihakan terhadap konservasi keanekaragaman hayati tampaknya menunjukkan perkembangan yang baik. Kesadaran menempatkan keanekeragaman hayati sebagai pilar sumberdaya pembangunan ekonomi dan pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk kesejahteraan masyarakat pada generasi saat ini dan mendatang telah mendorong komitmen politik dan keselarasan kebijakan yang ada. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu menunjukan komitmennya dalam bentuk kebijakan politik dan operasional teknis dalam kerangka bagian upaya konservasi keanekaragaman hayati yang tersisa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*). Realisasi penandatanganan konvensi yang secara legal mengikat (*legally binding*) atas Indonesia menjadi tolak ukur bagi prestasi bangsa Indonesia di mata dunia sehingga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan seluruh elemen masyarakat Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usahanya untuk melestarikan kekayaan alam hayati yang dapat menjadi tanda keseriusan negara Indonesia dalam komitmennya. Mandat internasional atas keberadaan kawasan pelestarian keanekaragaman hayati juga dijamin dengan peraturan perundangan Indonesia dan keputusan-keputusan pemerintah lainnya.

Komitmen politik dalam kebijakan diikuti dengan upaya koordinasi teknis pada tingkat pengelolaan dari pusat ke daerah. Secara nasional, berbagai pihak telah merumuskan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020 (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan*/IBSAP). Penyusunan IBSAP ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pihak dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat nasional. RIP Keanekaragaman Hayati merupakan dokumen perencanaan yang terpadu/komprehensif, efektif dan partisipatif di setiap tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Status keanekaragaman hayati di kota-kota besar seperti DKI Jakarta sangat ditentukan oleh munculnya faktor pendorong dan penekan. Faktor pendorong yang teridentifikasi adalah peningkatan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, kelemahan penegakkan hukum, perubahan iklim, dan kondisi riset dan teknologi faktor pendorong tersebut menyebabkan terjadi dua permasalahan utama, yaitu: hilangnya habitat dan penurunan daya dukung pada habitat yang tersisa.

Adapun kesimpulan dari kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, antara lain:

1. Keanekaragaman hayati merupakan isu yang sangat strategis baik di tingkat domestik, regional maupun internasional.
2. Walaupun kemerosotan keanekaragaman hayatinya telah terjadi akibat hilangnya habitat satwa dan tumbuhan lair atau akibat rusaknya habitat yang tersisa, namun kondisi keanekaragaman hayati di Jakarta pada berbagai tingkatan masih menunjukkan nilai yang penting dan harus dilindungi.
3. Keanekaragaman hayati di DKI Jakarta memberikan nilai jasa lingkungan yang sangat tinggi dan merupakan aset pembangunan yang sangat penting.
4. Status kenekaragaman hayati di DKI Jakarta sebagai ekosistem perkotaan, tentu menghadapi permasalahan dengan kompleksitas yang lebih rumit. Faktor pendorong yang berdampak pada status keanekaragaman hayati adalah peningkatan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, kelemahan penegakkan hukum, perubahan iklim, dan kondisi riset dan teknologi.

Beberapa langkah perlu ditempuh dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, antara lain:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama lembaga legislatif perlu memikirkan dan merumuskan kebijakan di DKI Jakarta yang tepat dalam pengelolaan keanekeragaman hayati ke depan. Keberpihakan politik sebagai komitmen yang kuat dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau sekurang-kurangnya peraturan gubernur.
2. Pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta memerlukan: a) Rantai informasi yang baik dari peneliti kepada perencana, kemudian birokrat dan politisi, serta *stakeholder* lain; b) Berbasis kolaborasi *stakeholders*: pemetaan peran para pihak, CSR kehati dan *green movement* dari masyarakat; c) Memantapkan kawasan 'bernilai kehati

tinggi' dan menentukan prioritas perlindungan spesies penting di DKI Jakarta; dan d) Mendorong pemanfaatan kehati untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengawetan kehati.

3. Pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta dapat diarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tiga tujuan utama berikut sasaran-sasarannya, yaitu:

Visi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di DKI Jakarta sejalan dengan Visi Pemerintah DKI Jakarta yaitu:

"Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang yang terkait erat dengan pengelolaan keanekaragaman hayati adalah:

"Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial"

Tujuan 1:
Mempertahankan daya dukung lingkungan untuk menjaga kemerosotan spesies dilindungi atau spesies terancam punah di dalam kawasan hutan

Sasaran :
1. Peningkatan kelentingan (resiliensi) ekosistem terumbu karang dan lamun Rehabilitasi ekosistem Mangrove
2. Pembinaan Habitat dan Perlindungan Spesies dilindungi atau terancam punah
3. Pengendalian spesies asing, invasif dan/atau predator
4. Pengendalian faktor pengganggu di dalam kawasan hutan

Tujuan 2:
Meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di kawasan ekosistem esensesial/kawasan bernilai konservasi penting bagi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya

Sasaran :
1. Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial untuk pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
2. Restorasi ekosistem riparian
3. Penanaman tanaman nusantara khas Jakarta, peningkatan budidaya dan pengembangan fungsi pekarangan (konservasi lekat lahan)
4. Pembangunan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi keanekaragaman hayati

5. Pengendalian pencemaran, alih fungsi dan perburuan untuk konservasi keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem esensesial/kawasan bernilai konservasi penting bagi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya.

Tujuan 3:
Meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan berbasis IPTEK dan kearifan lokal

Sasaran :
1. Pengembangan inovasi IPTEK yang menunjang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program melalui upaya partisipatif dan kolaboratif
4. Pengendalian konflik pemanfataan keanekaragaman hayati
5. Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vi

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Maksud dan Tujuan..... I-3
1.3. Sasaran I-3
1.4. Dasar Hukum..... I-4
1.5. Kerangka Waktu..... I-5
1.6. Proses Penyusunan I-5
1.7. Struktur Dokumen I-10

BAB 2 STATUS KEANEKARAGAMAN HAYATI
2.1. Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta II-1
2.2. Potensi dan Kondisi Keanekaragaman Hayati II-44
2.3. Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati II-86
2.4. Potensi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati..... II-94

BAB 3 RENCANA PENGELOLAAN
3.1. Visi III-1
3.2. Misi..... III-2
3.3. Tujuan dan Sasaran III-2
3.4. Program dan Rencana Aksi III-3

BAB 4 MONITORING DAN EVALUASI IV-1

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi II-3
Tabel 2.2. Jenis tanah dan luas masing-masing jenis tanah II-4
Tabel 2.3. Sebaran jenis Batuan di Provinsi DKI Jakarta II-6
Tabel 2.4. Luas Situ/Rawa Menurut Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta II-7
Tabel 2.5. Panjang dan Luas Sungai/Kanal Menurut Peruntukannya II-10
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk II-12
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Persentase Penduduk II-13
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin II-14
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas II-15
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan II-16
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Bekerja II-18
Tabel 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi II-19
Tabel 2.13. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin II-20
Tabel 2.14. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenis Sekolah II-21
Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi II-23
Tabel 2.16. Luas Lahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan II-24
Tabel 2.17. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah II-25
Tabel 2.18. Luas Lahan Tegal/Kolam II-26
Tabel 2.19. Holikultur Unggulan DKI Jakarta II-27
Tabel 2.20. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya II-28
Tabel 2.21. Populasi Hewan Ternak Menurut Kabupaten/Kota Administrasi II-29
Tabel 2.22. Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota Administrasi II-30
Tabel 2.23. Luas Hutan Lindung dan Cagar Alam Menurut Tipe Hutan II-31
Tabel 2.24. Jumlah Pohon Pelindung Menurut Jenisnya II-31
Tabel 2.25. Luas Kawasan Hutan Kota Menurut Kota Administrasi II-33
Tabel 2.26. Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota II-35
Tabel 2.27. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan II-36
Tabel 2.28. Wisatawan Mancanegara yang Datang ke DKI Jakarta II-37
Tabel 2.29. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja II-39
Tabel 2.30. Jenis Burung yang Dijumpai di Suaka Margasatwa Pulau Rambut II-50
Tabel 2.31. Keanekaragaman Jenis Flora Fauna pada Ekosistem Riparian II-57
Tabel 2.32. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota UI II-60
Tabel 2.33. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota Srengseng II-61
Tabel 2.34. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota Pesanggrahan II-63
Tabel 2.35. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota Munjul II-64
Tabel 2.36. Keanekaragaman Jenis Fauna di Taman Honda Tebet II-65
Tabel 2.37. Keanekaragaman Jenis di Hutan Kota Monas II-66
Tabel 2.38. Kebun Bibit di DKI Jakarta II-67
Tabel 2.39. Daftar Jenis Tumbuhan yang Terdapat di Kebun Bibit II-68
Tabel 2.40. Flora Nusantara Khas DKI Jakarta II-70
Tabel 2.41. Keanekaragaman Jenis Flora Dilindungi atau Terancam II-73
Tabel 2.42. Burung Dilindungi dan Status Konservasinya II-74
Tabel 2.43. Kategori Nilai Manfaat Keanekaragaman Hayati II-79
Tabel 2.44. Nilai Kehati dan Contoh Pemanfaatannya II-80

Tabel 2.45. Identifikasi Nilai Manfaat Ekosistem di Provinsi DKI Jakarta II-83
Tabel 2.46. Rata-rata Muka Air Laut di Jakarta Tahun 1998-2013 II-90
Tabel 2.47. Perkembangan Kebijakan Terkait Konservasi Sumberdaya Alam II-95
Tabel 2.48. Pembagian Kewenangan Terkait Kegiatan Konservasi II-103
Tabel 2.49. Pemangku kepentingan kehati di Provinsi DKI Jakarta II-106
Tabel 3.1. Program dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati III-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pendekatan Manajemen Adaptif dalam Rencana Aksi Konservasi I-6
Gambar 1.2. Pendekatan Alur Proses Penyusunan RIP Kehati I-7
Gambar 2.1. Kondisi geografi Provinsi DKI Jakarta II-2
Gambar 2.2. Luas wilayah dan pembagian daerah administrasi II-3
Gambar 2.3. Situ/rawa terluas menurut kota administrasi II-7
Gambar 2.4. Sungai yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta II-10
Gambar 2.5. Kondisi iklim Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 II-11
Gambar 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk II-11
Gambar 2.7. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin II-12
Gambar 2.8. Kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota II-13
Gambar 2.9. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin II-14
Gambar 2.10. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan II-15
Gambar 2.11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan II-16
Gambar 2.12. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja II-17
Gambar 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi II-18
Gambar 2.14. Persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah II-19
Gambar 2.15. Jumlah sekolah, guru, dan murid menurut jenis sekolah II-20
Gambar 2.16. Jumlah perguruan tinggi, tenaga edukasi, dan mahasiswa II-21
Gambar 2.17. Fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 II-22
Gambar 2.18. Tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 II-22
Gambar 2.19. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 II-23
Gambar 2.20. Luas lahan sawah di Provinsi DKI Jakarta (hektar) II-24
Gambar 2.21. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah II-25
Gambar 2.22. Luas lahan tegal/kebun, ladang/huma II-26
Gambar 2.23. Holikultur unggulan DKI Jakarta berdasarkan hasil panen II-27
Gambar 2.24. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya II-28
Gambar 2.25. Populasi hewan ternak di Provinsi DKI Jakarta II-29
Gambar 2.26. Populasi itik di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2017 II-30
Gambar 2.27. Luas kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta II-33
Gambar 2.28. Hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta II-35
Gambar 2.29. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata unggulan II-36
Gambar 2.30. Wisatawan mancanegara yang datang ke DKI Jakarta II-37
Gambar 2.31. Jumlah dan luas area taman di Provinsi DKI Jakarta II-38
Gambar 2.32. Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan, belanja II-39
Gambar 2.33. Peta Bathimetri Teluk Jakarta II-43
Gambar 2.34. Kelerengan Dasar Laut Ekoregion DKI Jakarta II-43
Gambar 2.35. Klasifikasi dan Tipe Ekosistem II-44
Gambar 2.36. Keanekaragaman ekosistem di Wilayah Provinsi DKI Jakarta II-45
Gambar 2.37. Peta sebaran ekosistem terumbu karang dan padang lamun II-46
Gambar 2.38. Ikan karang dan terumbu karang II-47
Gambar 2.39. Keanekaragaman spesies lamun di Pulau Pari II-48
Gambar 2.40. Pulau Rambut II-49
Gambar 2.41. Populasi Burung di Pulau Rambut II-51
Gambar 2.42. Mangrove di Hutan LIndung & Suaka Alam Angke II-52
Gambar 2.43. Daerah riparian Kali Ciliwung II-55

Gambar 2.44. Fauna Ekosistem Riparian II-56
Gambar 2.45. Peta Cagar Budaya Kampung Betawi II-58
Gambar 2.46. Fauna di Hutan Kota Pesanggrahan II-63
Gambar 2.47. Elang Bondol (*Haliastur indus*) II-73
Gambar 2.48. Bangau Bluwok di Pulau Rambut II-75
Gambar 2.49. Pendorong (*Drivers*), Tekanan (*Pressures*) dan Status (*State*) II-86
Gambar 2.50. *Trend* Kenaikan Muka Air Laut II-90

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan wilayah sangat strategis ditinjau dari berbagai aspek (baik aspek politis, sosial-budaya, ekonomi, dan ekologis). Hal ini sangat berkaitan dengan kedudukan dan peranan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat akulturasi budaya, pusat industri, jasa dan perdagangan. Disamping itu, secara geografis DKI Jakarta memilki karakter wilayah ekologis yang khas. Dimana, wilayah DKI Jakarta terbagi kedalam beberapa wilayah ekoregion. Wilayah laut DKI Jakarta termasuk kedalam ekoregion Laut Jawa, wilayah daratan pulau dan daratan termasuk Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilegon-Indramayu-Pekalongan (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara), dan Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Serang-Tangerang-Depok (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur), serta Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral Jawa (Jakarta Utara dan Kep. Seribu).

Ragam wilayah ekoregion DKI Jakarta membentuk habitat tertentu yang memberikan nilai ekologis penting, sehingga DKI Jakarta pada akhirnya memiliki profil keanekaragaman hayati relatif lengkap pada berbagai tingkatan keanekaragaman hayati. DKI Jakarta memiliki tipe ekosistem darat (terestrial) berupa ekosistem pantai, ekosistem semi-terestrial berupa ekosistem mangrove dan riparian, ekosistem air tawar (limnik) berupa sungai dan situ, ekosistem air asin (marin) berupa lamun dan terumbu karang. Keanekaragaman ekosistem memberikan tingkat kekayaan spesies asli (*native species*) yang tinggi ditambah dengan banyaknya pusat konservasi ek-situ di DKI Jakarta memberikan tambahan keanekaragaman spesies berupa spesies-spesies introduksi.

Secara umum, bagi Bangsa Indonesia keanekaragaman hayati telah menempatkan bangsa ini sebagai Negara sangat penting di dunia. Menempati 1,32% dari luas permukaan tanah di bumi, Indonesia ternyata menjadi habitat 10% jenis tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan amfibia, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga yang ada di dunia. Dari 515 jenis mamalia besar dunia, 36% endemik di Indonesia, dari 33 jenis primata terdapat 18% endemik, dari 78 jenis burung paruh bengkok terdapat 40% endemik, dan dari 121 jenis kupu-kupu dunia, 44% endemik di Indonesia (Mc Neely *et al*., 1990).

Indonesia juga menempati peringkat satu pusat keanekaragaman hayati dunia dari kultivar tanaman budidaya dan ternak. Jenis-jenis kayu perdagangan, buah-buahan tropis (durian, duku, salak, rambutan, pisang), tanaman rempah, anggrek, bambu, rotan, kelapa dan lain-lain sebagian besar berasal dari Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan, seperti pisang dan kelapa telah menyebar ke seluruh dunia. Tentu, keanekaragaman hayati tersebut telah memberikan peran berharga bagi masyarakat Indonesia sekaligus menjadi aset pembangunan yang sangat penting.

Saat ini kondisi keaneakaragaman hayati, khususnya di Wilayah Perkotaan mengalami tantangan konservasi yang luar biasa berat. Hilangnya keanekaragaman hayati telah mengalami masa kritis. Dalam Publikasi LIPI (2014) menyatakan, di Sulawesi mengalami kemerosotan jenis endemik hingga 83-94%. Jenis ikan pada daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane periode tahun 1910-2009 telah hilang hingga 75,6% atau sebanyak 102 jenis. Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati tersebut, diakibatkan oleh perubahan habitat, masuknya spesies asing invasif, pencemaran, eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim (*climate change*). Penebangan hutan alam, kebakaran dan ekspansi hutan tanaman pulp dan kertas serta kelapa sawit yang pesat telah menciptakan areal monokultur yang luas yang mengancam keanekaragaman hayati dan memberikan tekanan terhadap perubahan iklim. Di pihak lain pencemaran air, tanah, dan udara telah menimbulkan kerusakan habitat yang luar biasa.

Ancaman terhadap keanekeragaman hayati di DKI Jakarta tentu memiliki kompleksitas permasalahan yang relatif lebih berat (sebagai salah satu ciri *megacity*). Pertumbuhan wilayah megapolitan DKI Jakarta yang cepat telah mendorong pertumbuhan populasi penduduk yang sangat tinggi. Peningkatan populasi penduduk merupakan awal dari munculnya permasalahan lingkungan kerena menuntut peningkatan penyediaan infrastruktur perkotaan. Fenomena semacam ini pada akhirnya akan berakibat pada perubahan lingkungan alami yang lebih menekankan pada aspek ekonomis daripada aspek pengelolaan lingkungannya. Pembangunan kota sering kali mengorbankan ekosistem alami dan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) yang secara nyata merupakan sumber keanekaragaman hayati.

Di tengah ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati keberpihakan terhadap perlindungan dan pengelolaan hayati baik di tingkat nasional maupun daerah tampaknya menunjukkan perkembangan yang baik. Kesadaran menempatkan keanekeragaman hayati sebagai pilar sumberdaya pembangunan ekonomi dan pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk kesejahteraan masyarakat pada generasi saat ini dan mendatang telah mendorong komitmen politik dan keselarasan kebijakan dan koordinasi teknis pada tingkat pengelolaan dari pusat ke daerah. Secara nasional, berbagai pihak

telah merumuskan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020 (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP*). Penyusunan IBSAP ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pihak dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat nasional. Perumusan IBSAP tersebut ditindaklajuti oleh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati. RIP Keanekaragaman Hayati merupakan dokumen perencanaan yang terpadu/komprehensif, efektif dan partisipatif di setiap tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, sebagai kewajiban perundang-undangan, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati berdasarkan Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan RIP Keanekaragaman hayati juga memiliki nilai sangat strategis mengingat banyaknya jasa lingkungan yang dapat diberikan oleh keanekaragaman hayati. Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh masyarakat kota dari keanekaragaman hayati berupa mencegah polusi udara dan air, stabilitas tepian dan garis pantai, mitigasi banjir, penyimpanan karbon, moderasi iklim mikro, pengurangan kebisingan, dekomposisi, penyerbukan, pengaturan spesies hama, siklus hara, infiltrasi air, produksi makanan, manfaat kesehatan dan kesejahteraan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai estetika, rekreasi, dan pariwisata (Elmqvistet *et al*., 2004).

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini tersusunnya dokumen kerangka perencanaan strategik untuk periode 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2024 dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati sesuai dengan status keanekaragaman hayati dan prioritas pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta.

1.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini tersedianya perencanaan bagi perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi DKI Jakarta yang dititikberatkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati lintas batas provinsi/kabupaten/kota,

jenis flora-fauna yang mempunyai nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan nilai tambah dan bentuk/pola pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan, jenis flora fauna unggulan provinsi, kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan terhadap kelestarian kearifan lokal.

1.4. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta tentunya memerlukan referensi kebijakan, sehingga pelaksanaan dan rekomendasi hasil kajian sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

DAFTAR ISTILAH

1. **Keanekaragaman hayati** adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
2. **Konservasi keanekaragaman hayati** adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. **Rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati** yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
4. **Profil keanekaragaman hayati** daerah adalah data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
5. **Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan** adalah usaha atau kegiatan pemanfataan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
6. **Kerusakan keanekaragaman hayati** adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
7. **Sistem informasi keanekaragaman hayati** adalah tata kelola data dan informasi dalam bentuk database yang disajikan dengan menggunakan media teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati.

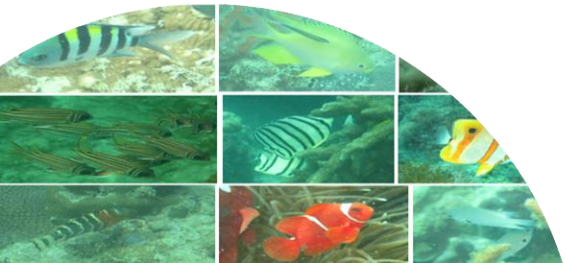

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 671 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

1.5. Kerangka Waktu

Pendekatan yang digunakan dalam **Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta** setidak-tidaknya mencakup dua pendekatan (*approach*), yakni: 1). Pendekatan dasar hukum/yuridis, dan 2). Pendekatan Konseptual.

Pendekatan yuridis digunakan agar kegiatan ini selaras dengan berbagai aturan dan perundangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan secara keilmuan/teoritis. Landasan konseptual sangat diperlukan agar secara substansial pelaksanaan kegiatan memiliki konsep-konsep yang jelas dan memiliki justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan .

Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta berlaku selama 5 (lima tahun), yaitu Tahun 2020-2024.

1.6. Proses Penyusunan

Penyusunan rencana induk pengeloaan keanekaragaman hayati di perkotaan harus memahami fenomena perkembangan kota dan konsep-konsep ekologis, termasuk kurva area spesies, biogeografi pulau dan konektivitas, serta fragmentasi habitat yang dapat membantu menjelaskan pola hilangnya keanekaragaman hayati di kota-kota dan mendukung rekomendasi untuk tindakan konservasinya. Di pihak lain, RIP merupakan dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati dapat mengacu pada konsep manajemen adaptif dari *F. van den Berg* (2010). Dalam pengelolaan kenekararagaman hayati perkotaan, membutuhkan keterlibatan erat antara peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian dalam ekologis perkotaan diperlukan untuk mengidentifikasi tindakan konservasi penting. Perencanaan tata ruang dan informasi tata ruang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang intervensi yang paling efisien dan efektif. Pencapaian tujuannya dievaluasi melalui pemantauan yang berkelanjutan (Gambar 1.1). Upaya multidisiplin diharapkan dapat memberikan peran kunci (*key role*) bagi para ilmuwan, pengelola pusat-pusat keanekaragaman hayati, aparat pemerintah/manajer publik, dan pemangku kepentingan lainnya.

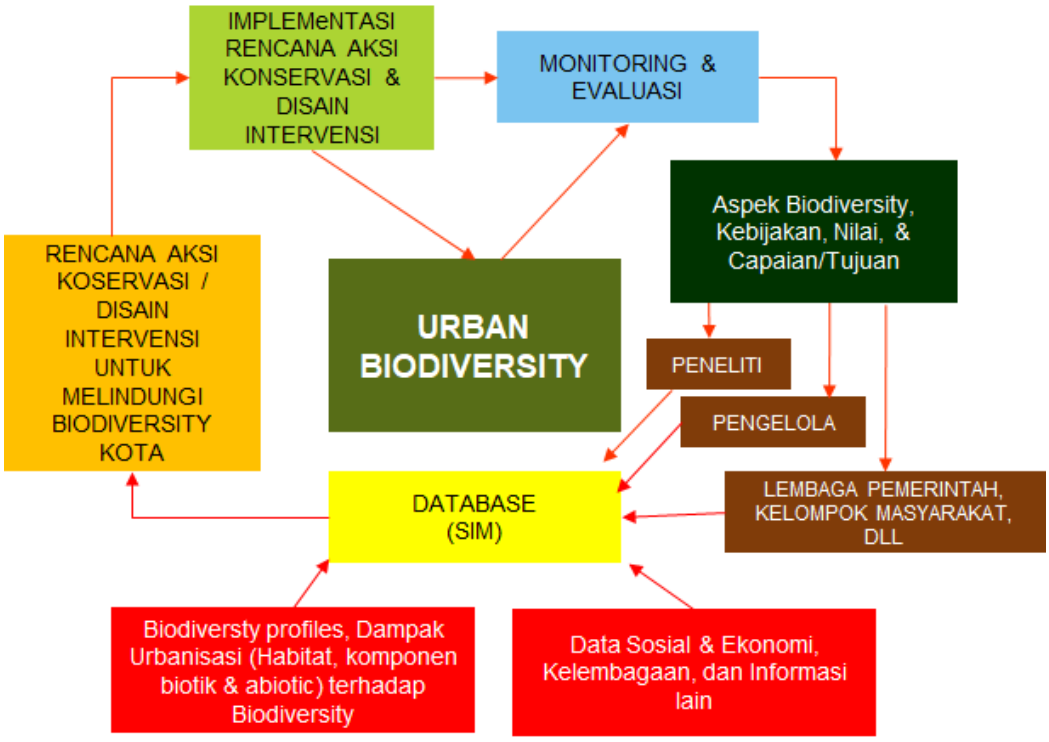

Gambar 1.1. Pendekatan Manajemen Adaptif dalam Rencana Aksi Konservasi Keanekaragaman Hayati (*Source: Modified by F. van den Berg for urban biodiversity and ecology from an adaptive management process for protected areas in Primack* (2010))

Berdasarkan Gambar 1.1. skema proses manajemen adaptif dalam rangka meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekologis perkotaan (kotak pusat), maka pada langkah awal, diperlukan pengumpulan database/informasi yang diperoleh berdasarkan penelitian ilmiah tentang profil kehati, dampak urbanisasi terhadap keanekaragaman hayati, data sosial, ekonomi, pertimbangan hukum/kelembagaan dan lainnya. Informasi tersebut digunakan sebagai rencana tindakan konservasi dan merancang intervensi. Harapannya, dapat

meningkatkan keanekaragaman hayati perkotaan. Rencana dilaksanakan dan hasilnya dipantau dan ditinjau berdasarkan tujuan awal. Rencana aksi konservasi dan desain intervensi dievaluasi kinerjanya dalam memenuhi tujuan keanekaragaman hayati serta mengacu pada isu-isu lain (seperti: manfaat kehati atau harapan). Proses ini membutuhkan integrasi dari beberapa perspektif pemangku kepentingan, termasuk dari para ilmuwan, pengelola pusat-pusat kenakeragaman hayati, pemerintah, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan evaluasi, jika tindakan konservasi/desain intervensi tidak memenuhi harapan, informasi baru dikumpulkan untuk meningkatkan intervensi atau mengubah pendekatan (*approach change*).

Pendekatan yang hampir sama dapat diacu berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2.

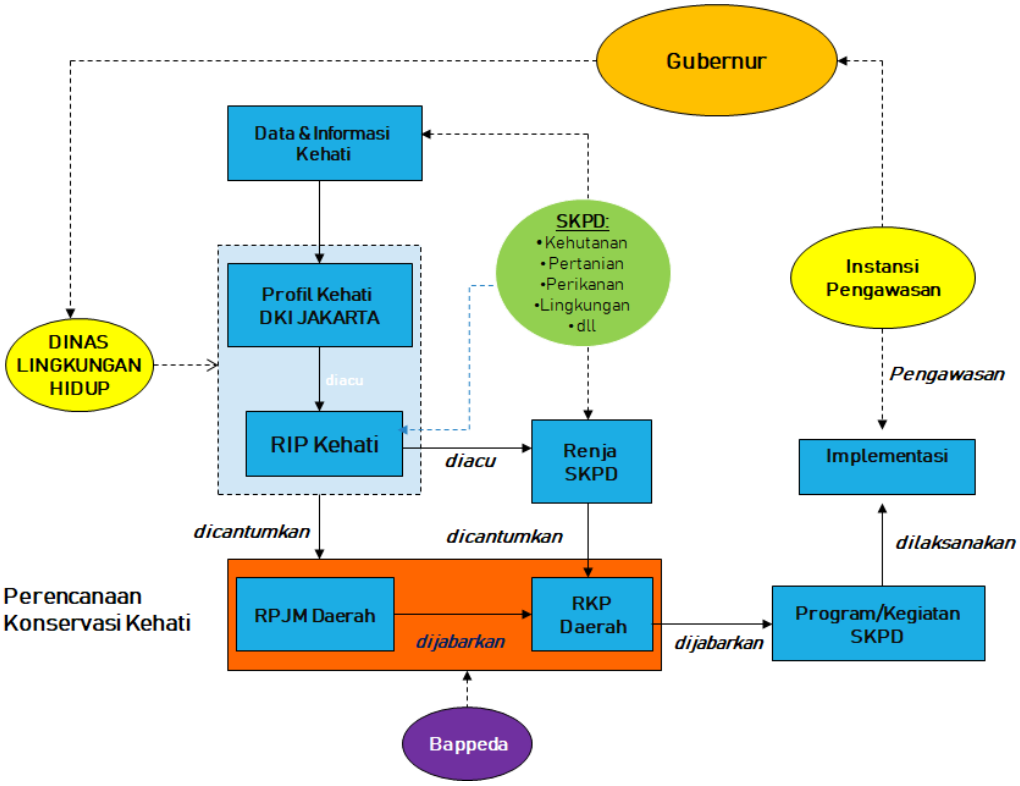

Gambar 1.2. Pendekatan Alur Proses Penyusunan RIP Kehati

Pada akhirnya, harus diakui bahwa kota merupakan ekosistem yang mendukung komunitas manusia, tetapi juga menampung banyak spesies non-manusia. Jika keanekaragaman hayati ingin dipertahankan dan ditingkatkan di kota-kota, keterlibatan dan kerja sama semua pemangku kepentingan sangat penting.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka langkah-langkah Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. **Pembentukan Tim Penyusun RIP Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta**
   Tim Penyusun RIP Kehati dibentuk oleh kepala daerah (Gubernur). Pembentukan tim tersebut sangat penting dalam rangka melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk penyusunan RIP Kehati. Hal ini karena nilai manfaat/pemafaatan keanekaragaman hayati dikelola oleh berbagai sektor, sehingga program pengelolaan keanekaragaman hayati (termasuk penanggulangan kerusakan akibat berbagai kegiatan pemanfaatan) dapat dilakukan secara sinergis oleh instansi lintas sektor. Pendekatan ini merupakan upaya untuk membangun rasa kepemilikan bersama atas dokumen RIP Kehati yang dimiliki daerah dan membangun kebersamaan, sehingga nilai manfaat keberadaan dokumen dimaksud semakin mengikat.

   Tim Penyusun RIP Kehati di DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 671 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Tim penyusun RIP Kehati terdiri atas Instansi Pemerintah Pusat, SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang keanekaragaman hayati dan diketuai oleh kepala instansi lingkungan hidup daerah.

2. **Analisis Data Untuk Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan**
   Kegiatan analisis data untuk penyusunan RIP Keanekaragaman hayati DKI Jakarta terdiri dari:
   a. Analisis dan sintesis Profil Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta. Melalui proses analisis dan sintesis dokumen profil tersebut, akan diketahui beberapa informasi sebagai berikut:
      1) Potensi keanekaragaman hayati di DKI Jakarta;
      2) Kondisi dan kecenderungan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta, seperti ancaman kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati, faktor penyebab dan dampak dari kerusakan keanekaragaman hayati tersebut;
      3) Kebijakan dan kelembagaan pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta.
   b. Analisis dan sintesis terhadap nilai manfaat berbagai kebijakan dan program konsevasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah secara berkelanjutan, termasuk program dan kebijakan dari masing-masing sektor serta aspirasi yang berkembang di masyarakat.

3. **Formulasi Rencana Induk Pengelolaan**

   Tahap formulasi atau *drafting* RIP Kehati ini dilakukan dalam merumuskan arah dan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati DKI Jakarta. Formulasi RIP Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta mempertimbangkan:

   a. Hasil analisis dan sintesis data keanekargaman hayati di DKI Jakarta.

b. Kondisi pengelolaan keanekaragaman hayati dianalisis dengan pendekatan *Driver* (Pendorong), *Pressure* (Tekanan), *State* (Status), *Impact* (Dampak) and *Response* (Respons) disingkat DPSIR. Dalam penyusunan RIP Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta, DPSIR digunakan untuk memahami keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta dengan menganalisis data keberadaan keanekaragaman hayati (status), menemukan pendorong dan tekanan yang membuat perubahan terhadap statusnya menjadi seperti saat ini (dampak) dan respons apa saja yang telah ada maupun yang nantinya diperlukan dalam rangka mempertahankan, melestarikan, mengkonservasi keanekaragaman hayati maupun mengurangi atau bahkan menghentikan pendorong dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Respons dapat berupa peraturan, kebijakan, program, maupun aksi yang dilakukan oleh para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas

c. Saran dan masukan dari para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion)*.

Pada tahap ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta. Visi adalah suatu pernyataan tentang arah yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting guna mewujudkan tujuan pengelolaan keanekaragam hayati setempat. Setelah itu, ditetapkan misi pengelolaan keanekaragaman hayati. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi, maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari semua pihak.

Secara langsung, pernyataan visi dan misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk penilaian kinerja. Interpretasi lebih mendetail diperlukan agar pernyataan visi dan misi dapat diterjemahkan ke langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan sebagaimana tertulis dalam pernyataan visi dan misi. Untuk itu, visi dan misi yang telah dirumuskan dilengkapi dengan uraian mengenai tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Sasaran yang ditetapkan/diharapkan dapat bersifat kuantitaif, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya. Langkah selanjutnya merumuskan rencana aksi yang akan dilaksanakan.

4. Konsultasi Publik

Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pihak berkepentingan. Tujuan konsultasi publik adalah:

a. Sosialisasi *draft* RIP Kehati, sehingga semua pemangku kepentingan (*share holders*) terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.
b. Mendapatkan saran dan masukan dari publik guna pengayaan RIP Kehati.

Hasil akhir dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan dan kepahaman para pihak mengenai RIP Kehati dan selanjutnya substansi dokumen RIP ini diintegrasikan ke dalam RPJMD.

5. Integrasi dalam RPJMD

Salah satu kelemahan yang selama ini sering terjadi dalam pengelolaan suatu obyek kelola adalah lemahnya tingkat implementasi perencanaan di lapangan (tingkat implementasi program kerja dalam perencanaan bersangkutan) atau perencanaan dimaksud hanya menjadi dokumen untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah disusun untuk mewujudkan keberhasilan upaya konservasi nilai-nilai kelestarian keanekaragaman hayati, meliputi: keanekaragaman tatanan ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik guna melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan produktivitas, nilai tambah, pola, dan bentuk pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen RIP Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta yang telah disusun perlu mendapatkan legitimasi yang kuat serta menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di daerah, terintegrasi dan menjadi bagian dari substansi RPJMD. Bahkan jika dipandang perlu, dapat dirumuskan aspek kedudukan legalnya dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di DKI Jakarta.

1.7. Struktur Dokumen

Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta (2019-2023) disusun dalam empat bab, terdiri atas:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyampaikan sekilas tentang potensi dan kondisi keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta dan mengapa perlu dikelola secara terpadu dalam bentuk Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

B. Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan tujuan penyusunan RIP Kehati dan sasaran yang ingin dicapai dengan tersusunnya RIP Kehati.

C. Dasar Hukum

Menyampaikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RIP Kehati.

D. Kerangka Waktu

Mengingat kondisi keanekaragaman hayati di suatu daerah sangat dinamis, maka Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman hayati harus dievaluasi dan diperbaharui agar merefleksikan realitas yang ada di lapangan. RIP Kehati yang disusun berlaku selama lima tahun sejak tahun penyusunan dan disesuaikan dengan mekanisme RPJMD.

E. Proses Penyusunan

Menyampaikan bagaimana proses dokumen RIP Kehati ini disusun, mulai dari pengorganisasian, *drafting* dokumen, konsultasi publik dan integrasi RIP Kehati ke RPJMD.

II. STATUS KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. Kondisi dan Potensi Keanekaragaman hayati

Menyampaikan uraian secara garis besar (*general*) mengenai kondisi keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta baik mengenai potensi unggulan, kondisi nyata di lapangan serta *trend* yang terjadi. Disampaikan juga kondisi dan potensi nilai manfaat dan pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi pengembangan ekonomi daerah.

B. Permasalahan Pokok Dalam Pengelolaan Keanekaragaman hayati

Mengupas permasalahan pokok yang menyebabkan terjadinya kemerosotan dan ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna) serta degradasi ekosistem. Disampaikan juga berbagai kendala dalam pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek kelestariannya.

C. Potensi Pengelolaan

Menjelaskan potensi yang dimiliki daerah dan skenario/upaya serta prasarana dan sarana pendukung dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari (seperti: kapasitas SDM, kelembagaan, pendanaan, perangkat pengelola, komitmen pemda, dll).

III. RENCANA PENGELOLAAN

Bab ini merupakan inti dari RIP Kehati yang memaparkan secara rinci mengenai visi, misi dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dalam jangka waktu 5 tahun.

A. Visi

Menyampaikan visi yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah.

B. Misi

Menyampaikan misi yang diemban oleh pemangku kepentingan terkait di daerah dalam mewujudkan visi yang telah disepakati. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar arah dan hal yang akan dicapai sebagaimana dimaksud dalam visi pengelolaan, dapat dicapai dengan baik. Pencapaian visi pengelolaan akan terwujud apabila pengambil keputusan terkait konsisten dalam mengimplementasikan perencanaan pengelolaan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya misi, maka diharapkan seluruh pihak dapat mengetahui arah yang akan dicapai di masa yang akan datang.

C. Tujuan dan Sasaran

Pengelolaan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya dipaparkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya (*measureable*).

D. Program Kerja

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka disusun Program Kerja yang meliputi:

1. Program Kerja (Kegiatan).
2. Keluaran (*Output*/*Outcome*).
3. Tata Waktu.
4. Indikator Kinerja.
5. Peran Para Pihak.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Program monitoring dan evaluasi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan RIP Kehati. Upaya pemantauan dan evaluasi berfokus pada beberapa indikator yang dapat diukur. Tujuan dari pemantauan terhadap pelaksanaan RIP Kehati, sebagai berikut:

1. Menentukan derajat keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.
2. Memastikan bahwa berbagai rencana aksi/program kerja yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Mengukur bagaimana rencana aksi yang telah disusun berkontribusi pada capaian tujuan RIP Kehati.
4. Mengidentifikasi penyebab rencana aksi yang gagal dilaksanakan.
5. Sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan dan peningkatan kualitas RIP di masa yang akan datang.

2 STATUS KEANEKARAGARAMAN HAYATI

2.1. Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta

2.1.1. Letak Geografis Dan Wilayah Administratif

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki letak secara astronomi antara 6°12' Lintang Selatan dan 108°48' Bujur Timur. Kota Jakarta memiliki karakteristik berupa daratan rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Provinsi DKI Jakarta berbatasan langsung dengan Kota Depok pada bagian selatan dan timur dengan Kota/Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat pada bagian timur, dengan Provinsi Banten pada bagian Barat, serta Laut Jawa pada bagian utara.

Gambar 2.1. Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas area 662,33 km^2 yang terbagi kedalam enam kabupaten/kota administratif, yaitu: Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jakarta Timur merupakan kabupaten/kota yang memiliki luas area paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya dengan luas area 188,03 km^2 (28,39% dari luas area Provinsi DKI Jakarta). Wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 44 kecamatan dan 267 kelurahan yang tersebar pada kabupaten/kota.

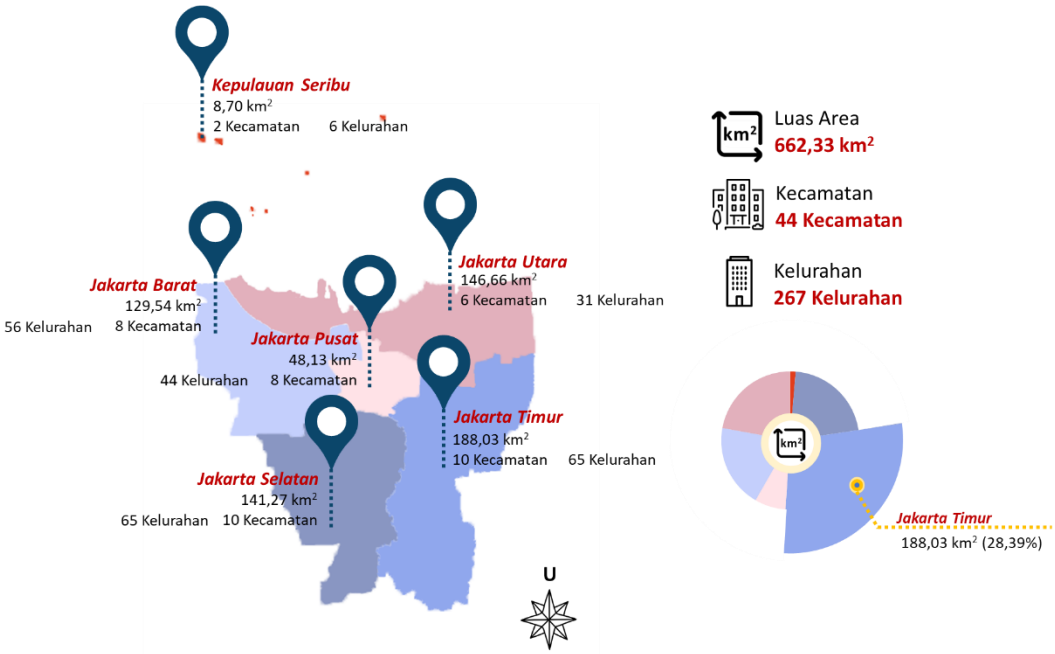

Gambar 2.2. Luas wilayah dan pembagian daerah administrasi menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas (km²)	Persentase (%)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	8,70	1,31	2	6
Jakarta Selatan	141,27	21,33	10	65
Jakarta Timur	188,03	28,39	10	65
Jakarta Pusat	48,13	7,27	8	44
Jakarta Barat	129,54	19,56	8	56
Jakarta Utara	146,66	22,14	6	31
Jumlah	**662,33**	**100,00**	**44**	**267**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.2. Jenis Tanah dan Batuan

Berdasarkan kajian Lutifayanti dkk (2013), jenis tanah yang mendominasi di DKI Jakarta adalah jenis tanah latosol merah (46,79 %). Selanjutnya, jenis tanah asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan & laterit (23,67%). Jenis tanah lainnya adalah asosiasi kelabu tua dan tanah aluvial. Jenis tanah di Kepulauan Seribu adalah pasir koral yang berasal dari dekomposisi coral dan karang laut.

Tabel 2.2. Jenis Tanah dan Luas Masing-masing Jenis Tanah Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Tanah	Jakbar	Jakpus	Jaksel	Jaktim	Jakut	Kep. Seribu	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pasir koral	-	-	-	-	-	8,70	8,70	1,31
2	Aluvial kelabu tua	-	-	-	-	19,60	-	19,60	2,96
3	Asosiasi kelabu tua&aluvial coklat kekelabuan	1,03	-	-	-	-	-	1,03	0,16
4	Asosiasi kelabu tua &gley humus rendah	11,04	4,65	-	-	78,38	-	94,06	14,20
5	Asosiasi latosol merah,latosol coklat kemerahan	-	-	15,08	34,56	-	-	49,64	7,49
6	Asosiasi latosol merah,latosol coklat kemerahan &laterit	1,34	1,44	91,86	62,12	-	-	156,76	23,67
7	Kompleks podzolik merah kekuningan, podzolik kuning &regosol	22,65	-	-	-	-	-	22,65	3,42
8	Latosol merah	93,48	42,04	34,33	91,35	48,69	-	309,89	46,79
Jumlah		129,54	48,13	141,27	188,03	146,66	8,70	662,33	100

Sumber : Lutifayanti, dkk (2013)

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 4 karakteristik utama sebagaimana yang dikemukakan Fachry dkk (2002)[1], yaitu:

1. **Pasir lempungan dan lempung pasiran**; merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran, semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara berselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 m. Namun, ketebalan tanah secara keseluruhan endapan ini diperkirakan mencapai 300 m. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecokolatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Pada beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm^2 dan lempung pasiran antara 1,5 – 3 kg/cm^2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5 – 5 m, lanau pasiran antara 0,5 – 3 m dan lempung pasiran antara 1 -4 m dan kisaran nilai tekanan

[1] Fachri, M., Djuhaeni, **Hutasoit L.M.**, dan Agus M.R., 2002. Stratigrafi dan Hidrostratigrafi Cekungan Airtanah Jakarta. Buletin Geologi, Jilid/Volume 34 No 3, 2002. Diterbitkan oleh Departemen Teknik Geologi ITB. ISSN 0126-3498. http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/36/jbptitbpp-gdl-grey-2002-muhammadfa-1775-2002_jrn-1.pdf

konus lanau lempungan antara 2 – 20 kg/m^2, lanau pasiran antara 15 – 25 kg/m^2 dan lempung pasiran antara 10 – 40 kg/m^2.

2. **Satuan Pasir Lempungan**; merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas kebawah terdiri dari perselangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5 – 13 m. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang. Dibeberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75 – 2 kg/cm^2 dan lanau pasiran antara 1,5 – 3 kg/cm^2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5 -3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m^2 dan lanau pasiran antara 2-10 kg/m^2.

3. **Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan**; merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu- abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5–17 m.

4. **Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran**; merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal pasiran antara 3–13,5 m. Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8–2,85 kg/cm^2 dan lanau lempungan antara 2,3–3,15 kg/cm^2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5–7,5 m. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2–50 kg/m^2 dan lanau lempungan antara 18–75 kg/m^2 . Tufa dan konglomerat melapuk menengah–tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.

Dari potongan melintang selatan-utara Jakarta terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 formasi, yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 m dan di sekitar Babakan formasi Parigi mendesak ke atas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini didominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Pada umumnya keadaan geologi kawasan Kepulauan Seribu merupakan geologi kuarter batuan yang belum kompak (QI), terbentuk dari batuan sedimen berupa satuan batu gamping koral tersusun oleh koloni koral, hancuran koral dan cangkang moluska. Kondisi geologi seperti ini disebabkan oleh proses pembentukan pulau-pulau di kawasan Kepulauan Seribu yang terbentuk di atas koloni karang.

Tabel 2.3. Sebaran Jenis Batuan di Provinsi DKI Jakarta

No	KOTA	LUAS KLASIFIKASI (Km2)					TOTAL
		A (sc)	C (cm-ms)	A (cs-sc)	A (sc-cs)	Bt. gamping koral	
1	Jakarta Barat	20,77	39,69	24,86	44,22	-	129,54
2	Jakarta Pusat	1,35	27,57	4,90	14,32	-	48,13
3	Jakarta Selatan	-	106,66	34,61	-	-	141,27
4	Jakarta Timur	3,80	109,26	55,37	19,60	-	188,03
5	Jakarta Utara	18,65	-	-	128,01	-	146,66
6	Kep. Seribu	-	-	-	-	8,70	8,70
	Total	44,57	283,18	119,73	206,16	8,70	662,33

A (sc) Satuan Pasir Lempungan (endapan pematang pantai)

A (cs-sc) Pasir lempungan dan lempung pasiran (endapan aluvial sungai dan pantai)

A (sc-cs) Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan (endapan sungai)

C (cm-ms) Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran (kipas aluvial vulkanik)

Sumber: diolah dari Fachry dkk (2002)

2.1.3. Sumberdaya Air

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang terdiri dari banyak situ/rawa. Situ Babakan merupakan salah satu situ terluas di Jakarta Selatan dengan realisasi luas area 319.308 hektar. Sedangkan, Situ Rawa Rorotan merupakan waduk terluas di Jakarta Timur dengan realisasi luas area 250.000 hektar. Waduk Tomang pun menjadi waduk terluas di Jakarta Barat dengan realisasi luas area 60.000 hektar. Jakarta pusat memiliki tiga situ/waduk dan Waduk Taman Ria Senayan sebagai waduk terluas di Jakarta Pusat dengan realisasi luas area 60.000 hektar. Jakarta Utara memiliki Waduk Pulit sebagai waduk terluas di Jakarta Utara dengan realisasi luas area 800.000 ha.

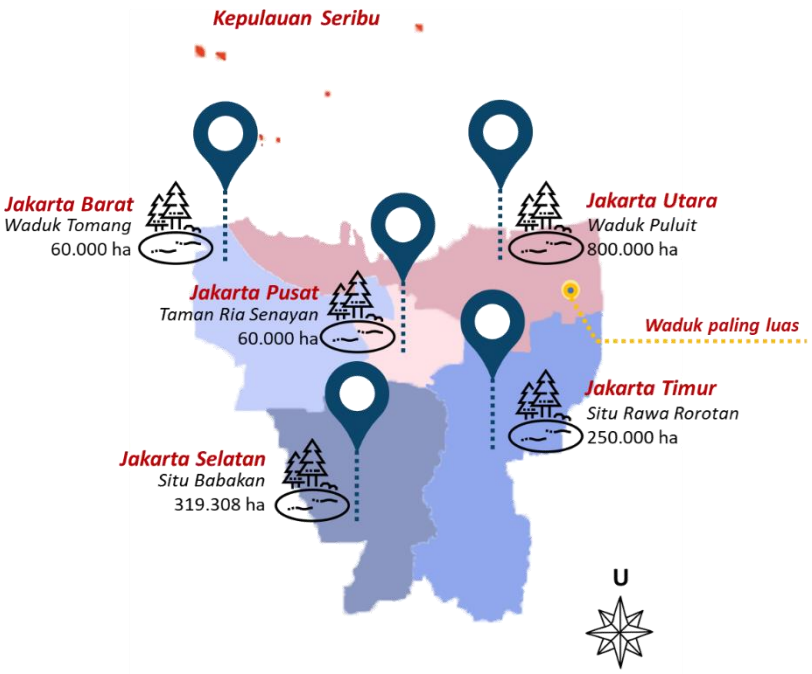

Gambar 2.3. Situ/rawa terluas menurut kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.4. Luas Situ/Rawa Menurut Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kota Adiministrasi		Luas Area (Ha)		Aliran Sungai
		Rencana	Realisasi	
(1)		(2)	(3)	(4)
1	**Jakarta Selatan**			
1.1	Waduk Lebak Bulus	38.316	19.150	Sungai Grogot
1.2	Situ Babakan	320.000	319.308	Kalibaru Barat
1.3	Situ Mangga Belong	130.000	118.600	Sungai Sarua
1.4	Situ Pancoran	20.000	20.000	-
1.5	Situ Rawa Lindung	14.700	2.706	Sungai Sepak
1.6	Situ Rawa Ulujami	79.800	6.704	Sungai Sepak
1.7	Situ TMP Kalibata	5.000	5.000	Sungai Kalibata
1.8	Situ Rawa Minyak	36.868	33.239	Sungai Sarua
1.9	Situ UI	-	70.000	Sungai Ciliwung
1.10	Waduk Bintaro Kel. Bintaro	16.656	16.146	Sungai Pesanggrahan
1.11	Waduk Bintaro Pondok Pinang	25.382	1.928	Sungai Pesanggrahan
1.12	Waduk Bonbin Ragunan	100.000	100.000	Sungai Krukut
1.13	Waduk Brigif	103.238	78.264	Sungai Krukut
1.14	Waduk Ragunan 1	110.000	110.000	Sungai Krukut
1.15	Waduk Ragunan 2	45.000	45.000	Sungai Krukut
1.16	Waduk Setiabudi	-	40.000	Kanal Banjir Barat
1.17	Waduk Sigura-gura	-	10.000	Sungai Cideng
1.18	Waduk Jagakarsa	31.218	30.195	Sungai Sarua
1.19	Waduk Cilandak Marinir	21.848	4.487	Sungai Krukut
1.20	Embung Jl. Aselih	8.704	8.662	Sungai Krukut
1.21	Embung Jl. Lapangan Merah	8.564	10.841	-
1.22	Embung Jl. Lebak Bulus III	2.143	2.052	Sungai Grogol

Kota Adiministrasi		Luas Area (Ha)		Aliran Sungai
		Rencana	Realisasi	
(1)		(2)	(3)	(4)
2	**Jakarta Timur**			
2.1	Jambore Cibubur (Baru)	-	80.000	Sungai Sunter
2.2	Situ Ceger Bambu Apus	-	2.100	Sal. PHB Caglak
2.3	Situ Rawa Badung	47.900	41.620	Sungai Buaran
2.4	Situ Rawa Dongkal	120.000	120.000	Sal. PHB Dankes Munjul
2.5	Situ Rawa Gelam	30.000	30.000	Sungai Petukangan
2.6	Situ Kelapa Dua Wetan	100.000	45.000	Sungai Cipinang
2.7	Situ Rawa Rorotan	500.000	250.000	Sal. PHB Tambun
2.8	Situ Rawa TMII	30.000	30.000	Sal. PHB Caglak
2.9	Waduk Aneka Elok	38.000	20.000	Sungai Cakung Atas
2.10	Waduk Cilangkap	130.000	130.000	Sungai Cilangkap
2.11	Cilangkap Jl. Giri Kencana	64.142	54.366	Sungai Cilangkap
2.12	Waduk Cimanggis	46.900	38.891	Sungai Cipinang
2.13	Waduk Cipayung	35.988	33.551	Sungai Cilangkap
2.14	Waduk Halim I	70.000	70.000	Sungai Sunter
2.15	Waduk Halim II	120.000	120.000	Sungai Sunter
2.16	Waduk Halim III	160.000	-	Sungai Sunter
2.17	Waduk Halim IV	190.000	-	Sungai Sunter
2.18	Waduk Halim V	110.000	-	Sungai Sunter
2.19	Waduk Halim VI	90.000	-	Sungai Sunter
2.20	Waduk Kampung Rambutan 1	57.364	54.050	Sungai Cipinang
2.21	Waduk Kampung Rambutan Bungur 12	26.642	24.366	Sungai Cipinang
2.22	Waduk Kampung Dukuh	29.700	-	Sungai Cipinang
2.23	Waduk Munjul	50.000	47.500	Sungai Cilangkap
2.24	Waduk Pacuan Kuda Pulo Mas	-	31.000	-
2.25	Waduk Pondok Rangon I	115.453	111.637	Sungai Sunter
2.26	Waduk Pondok Rangon II	19.489	16.181	Sungai Sunter
2.27	Waduk Pondok Rangon III	36.133	37.128	Sungai Sunter
2.28	Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon	31.655	22.338	Sungai Sunter
2.29	Waduk Jl. H Dogol	14.072	14.072	-
2.30	Waduk Rio Rio	-	90.000	Sungai Sunter
2.31	Waduk RW 05 Ceger	116.000	-	Sungai Cipinang
2.32	Waduk Sunter Hulu	110.000	72.875	Sungai Sunter
2.33	Waduk Surilang	28.239	-	-
2.34	Waduk Taman Modern	-	31.000	Kanal Banjir Timur
2.35	Waduk Jl. Kaja II	8.429	8.505	Sungai Cipinang
2.36	Waduk Jl. Pondok Gede Raya	6.548	-	Sungai Cipinang
2.37	Embung Jl. Cendrawasih	3.704	3.644	Sungai Cipinang
2.38	Embung Jl. Pondok Gede	13.794	13.009	Sungai Cipinang
2.39	Situ Tipar	-	50.000	-
2.40	Embung Jl. Penganten Ali	9.437	8.926	Sungai Cipinang
2.41	Embung Jl. Sejuk Cilangkap	4.919	4.790	Sungai Cilangkap
2.42	Embung Kramat Jati	5.000	5.149	Sungai Cipinang
2.43	Embung Pekayon	17.000	17.056	Sungai Gongseng
2.44	Situ Dongkelan	-	60.000	Sungai Gongseng
2.45	Embung Pulo Gebang 1	1.551	1.551	Sungai Cakung Atas
2.46	Embung Pulo Gebang 2	2.835	2.835	Sungai Cakung Atas
2.47	Embung Pula Gebang 3	4.895	4.895	Sungai Cakung Atas
2.48	Embung RPTRA Kebon Pala	12.857	12.857	Sungai Cipinang
3	**Jakarta Barat**			
3.1	Waduk Cengkareng	20.000	-	-
3.2	Waduk Grogol	24.000	24.000	Sungai Grogol

Kota Adiministrasi		Luas Area (Ha)		Aliran Sungai
		Rencana	Realisasi	
(1)		(2)	(3)	(4)
3.3	Waduk Hankam I	10.000	10.000	Sungai Grogol
3.4	Waduk Hankam II	10.000	10.000	Sungai Grogol
3.5	Waduk Jelambar	15.000	-	Sungai Grogol
3.6	Waduk Kali Deres	20.000	20.000	Sungai Maja
3.7	Waduk Makam Tegal Alur	100.000	-	-
3.8	Waduk Pondok Bandung	850	850	Kanal Banjir Barat
3.9	Waduk Rawa Kepa	5.000	5.000	Kanal Banjir Barat
3.10	Waduk Semanan	126.000	-	Sungai Semanan
3.11	Waduk Tomang	60.000	60.000	Sungai Sekertaris
3.12	Waduk Wijaya Kusuma	-	25.000	Sungai Angke
3.13	Waduk Bojong Indah	20.000	20.000	Sungai Mookevart
3.14	Waduk Kapuk 1	633	633	Sungai Angke
3.15	Waduk Kapuk 2	1.365	1.365	Sungai Angke
3.16	Waduk KFT	2.000	2.000	Sungai Maja
3.17	Waduk Peternakan	1.500	1.500	-
4	**Jakarta Pusat**			
4.1	Waduk Melati	35.000	35.000	Kanal Banjir Barat
4.2	Situ Lembang	10.000	10.000	Sungai Gresik
4.3	Waduk Taman Ria Senayan	60.000	60.000	-
5	**Jakarta Utara**			
5.1	Situ Rawa Kendal	159.800	-	Sungai Jembatan Merah
5.2	Waduk Don Bosco	20.000	20.000	Sungai Warung Jengkol
5.3	Waduk Kemayoran	113.000	113.000	Sungai Pademangan
5.4	waduk Marunda	560.000	465.753	Sungai Blencong
5.5	Waduk Muara Angke	5.000	5.000	Sungai Angke
5.6	Waduk Pegangsaan Dua	21.000	21.000	Sungai Betik
5.7	Waduk Pulit	800.000	800.000	Sungai Jelangkeng
5.8	Waduk Sunter Selatan	430.000	380.000	Sungai Sentiong
5.9	Waduk Sunter Timur 1 A	70.000	70.000	Sungai Sunter
5.10	Waduk Sunter Timur 1 B	80.000	80.000	Sungai Sunter
5.11	Waduk Sunter Timur 2	250.000	-	Sungai Sunter
5.12	Waduk Sunter Timur 3	130.000	130.000	Sungai Sunter
5.13	Waduk Sunter Utara	320.000	320.000	Sungai Lagoa Tiram
5.14	Waduk Teluk Gong	21.000	21.000	Sungai Angke
5.15	Waduk Tol Soedyatmo	280.000	18.444	Sungai Tanjungan
5.16	Embung Jl. Cakung Cilincing	30.193	-	-
5.17	Embung Jl. Kesatrian	27.606	22.290	Sungai Cakung Atas
5.18	Embung Jl. Sunter	7.019	6.644	Sungai Item

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Provinsi DKI Jakarta juga dilalui oleh 17 sungai/kanal. Sungai terpanjang di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: Sungai Ciliwung dengan panjang sungai 21.660 meter dan luas area 515.600 m^2 yang banyak dimanfaatkan untuk usaha perkotaan.

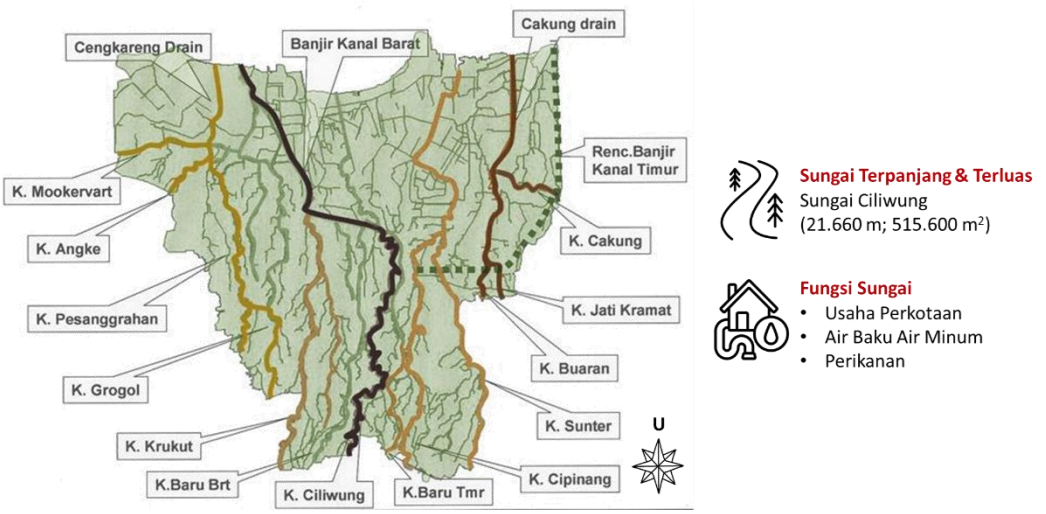

Gambar 2.4. Sungai yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016

Tabel 2.5 Panjang dan Luas Sungai/Kanal Menurut Peruntukkannya di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016

	Sungai/Kanal	Panjang (m)	Luas Area (m^2)	Peruntukan Sungai
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ciliwung	21.660	515.600	Usaha Perkotaan
2	Krukut	18.370	206.340	Air Baku Air Minum
3	Mookevart	8.600	215.000	Air Baku Air Minum
4	Kali Angke	4.350	175.375	Usaha Perkotaan
5	Kali Pesanggrahan	11.400	142.500	Perikanan
6	Kali Grogol	21.600	367.325	Perikanan
7	Kali Cideng	12.700	291.000	Usaha Perkotaan
8	Kalibaru Timur	14.250	106.875	Usaha Perkotaan
9	Cipinang	9.060	72.480	Usaha Perkotaan
10	Sunter	21.290	540.900	Usaha Perkotaan
11	Cakung	18.100	181.000	Usaha Perkotaan
12	Buaran	8.800	154.000	Usaha Perkotaan
13	Kalibaru Barat	14.250	106.875	Air Baku Air Minum
14	Cengkareng Drain	2.950	147.500	Usaha Perkotaan
15	Jati Kramat	3.270	21.255	Usaha Perkotaan
16	Ancol	8.605	301.175	Usaha Perkotaan
17	Banjir Kanal Barat	3.650	155.700	Usaha Perkotaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.4. Kondisi Iklim

Pada tahun 2017, kondisi cuaca di Provinsi DKI Jakarta memiliki suhu rata-rata 28,4^{o}C dengan kelembaban rata-rata 75%. Kecepatan rata-rata angin di Stasiun Pengamatan Kemayoran, yaitu: 1,7 M/SE dan curah hujan sebesar 2.152 mm^3.

Gambar 2.5. Kondisi iklim Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

2.1.5. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan dari tahun 2016-2017 0,94%. Sedangkan, laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2017 di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: 1,05%.

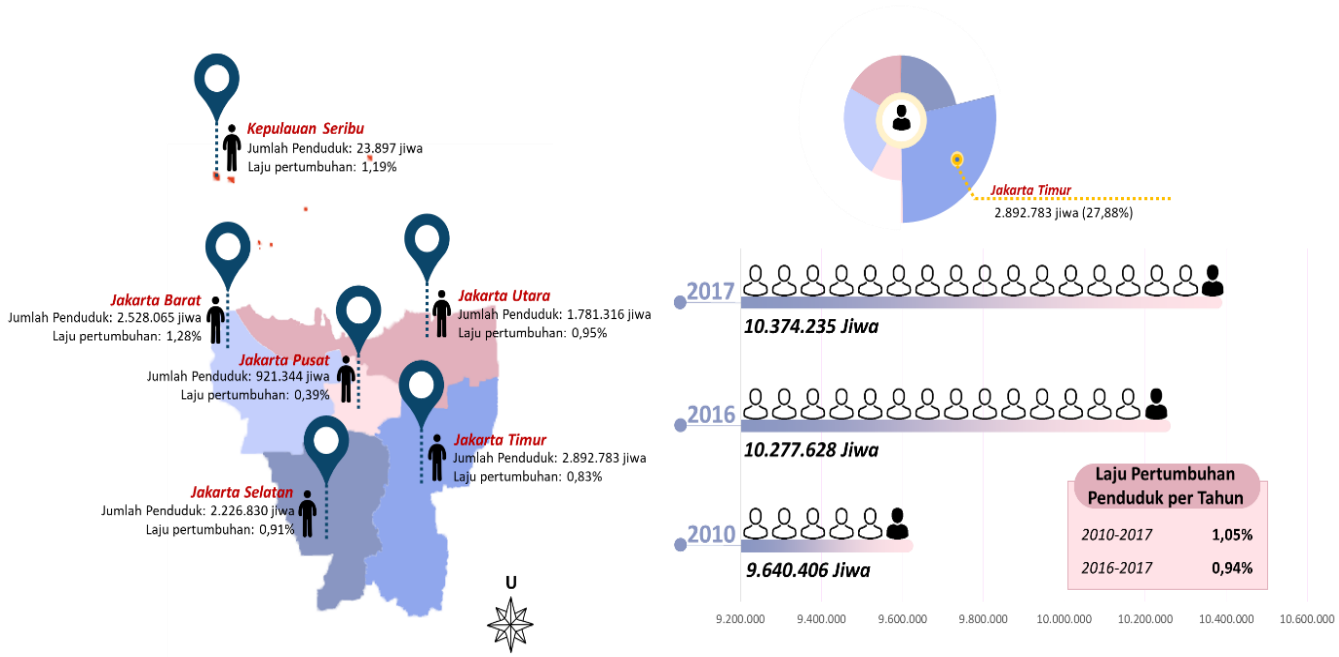

Gambar 2.6. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010, 2016, dan 2017

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2010, 2016, dan 2017

Kabupaten/Kota		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Seribu	21.414	23.616	23.897	1,58	1,19
2	Jakarta Selatan	2.071.628	2.206.732	2.226.830	1,04	0,91
3	Jakarta Timur	2.705.818	2.868.910	2.892.783	0,96	0,83
4	Jakarta Pusat	895.371	917.754	921.344	0,41	0,39
5	Jakarta Barat	2.292.997	2.496.002	2.528.065	1,40	1,28
6	Jakarta Utara	1.653.178	1.764.614	1.781.316	1,07	0,95
DKI Jakarta		**9.640.406**	**10.277.628**	**10.374.235**	**1,05**	**0,94**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan rasio jenis kelamin 100,61. Penduduk laki-laki pada tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 5.202.815 jiwa (50,15% dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta). Sedangkan, penduduk perempuan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.171.420 jiwa (49,85% dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta).

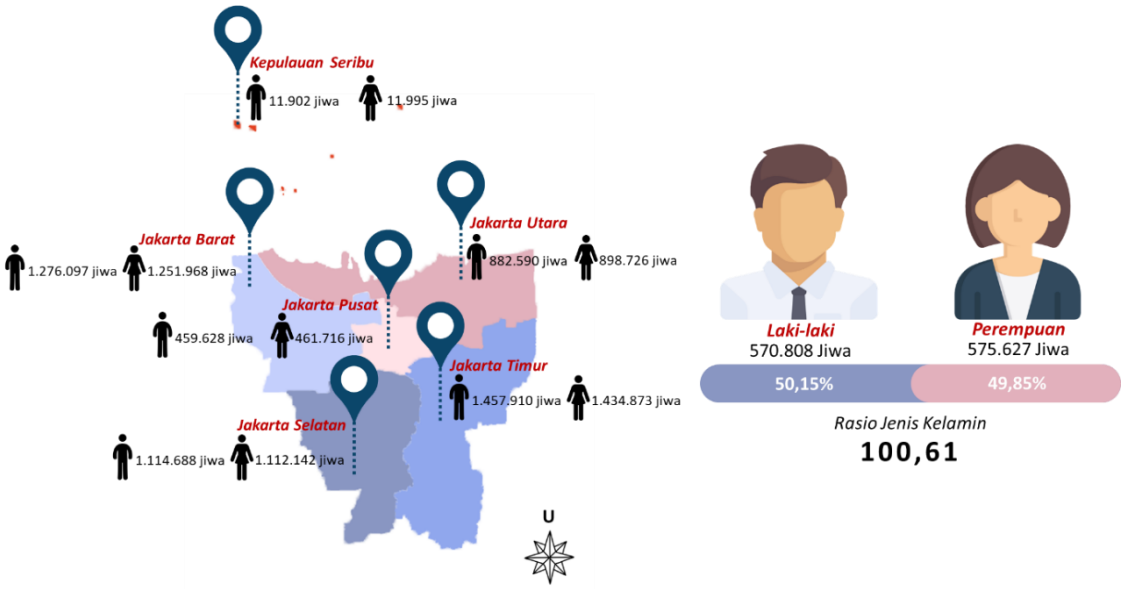

Gambar 2.7. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota		Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km^2
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Seribu	11.902	11.995	23.897	99,22	0,23	2.747
2	Jakarta Selatan	1.114.688	1.112.142	2.226.830	100,23	21,47	15.763
3	Jakarta Timur	1.457.910	1.434.873	2.892.783	101,61	27,88	15.385
4	Jakarta Pusat	459.628	461.716	921.344	99,55	8,88	19.143
5	Jakarta Barat	1.276.097	1.251.968	2.528.065	101,93	24,37	19.516
6	Jakarta Utara	882.590	898.726	1.781.316	98,20	17,17	12.146
DKI Jakarta		**5.202.815**	**5.171.420**	**10.374.235**	**100,61**	**100,00**	**15.663**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Distribusi penduduk di Provinsi DKI Jakarta beragam di setiap kabupaten/kota. Jakarta Timur merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Pronvinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 2.892.783 jiwa atau 27,88%. Sedangkan, Jakarta Barat memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu: 19.516 penduduk per km^2.

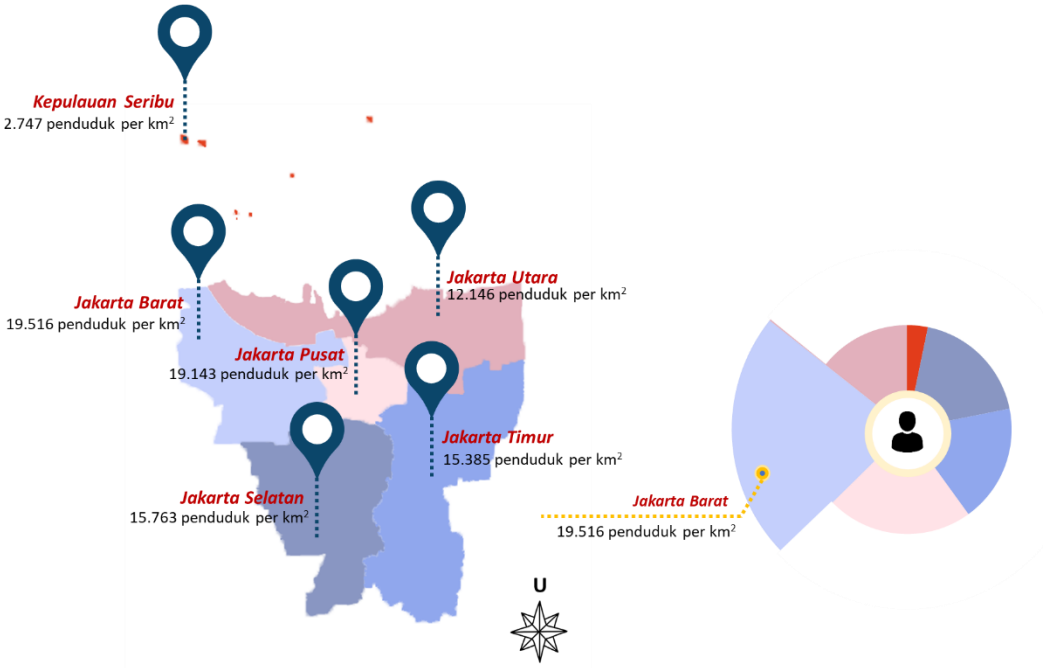

Gambar 2.8 Kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Apabila ditinjau lebih lanjut terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, kelompok umur 30-34 tahun memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan

kelompok umur lainnya. Jumlah penduduk kelompok umur 30-34 tahun pada tahun 2017 mencapai 1.039.169 jiwa (10,02%). Sedangkan, kelompok umur 60-64 tahun memiliki populasi penduduk terendah, yaitu: 320.927 jiwa (3,09%).

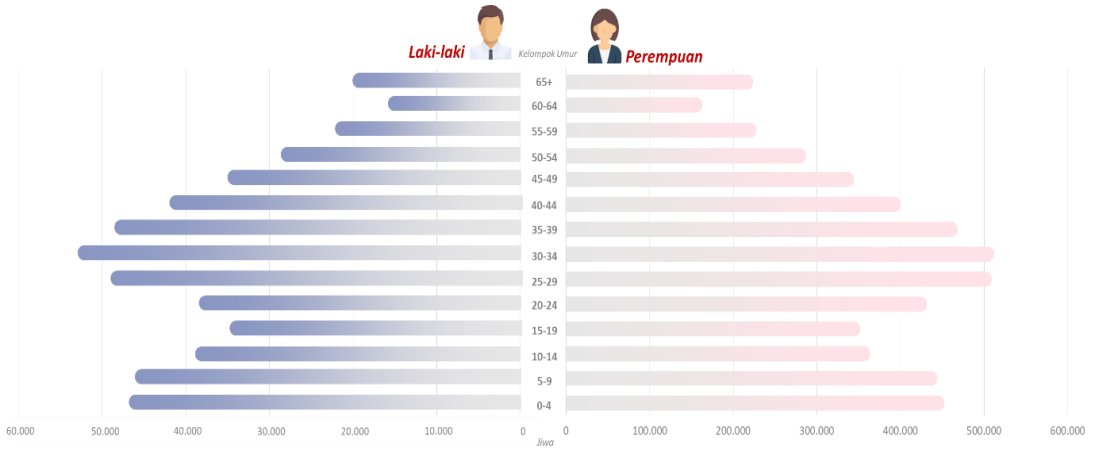

Gambar 2.9. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	469.474	451.698	921.172	8,88
5-9	462.880	443.590	906.470	8,74
10-14	386.448	364.431	750.879	7,24
15-19	349.592	352.585	702.177	6,77
20-24	385.796	430.891	816.687	7,87
25-29	490.657	509.704	1.000.361	9,64
30-34	529.175	509.994	1.039.169	10,02
35-39	488.747	467.510	956.257	9,22
40-44	419.783	401.383	821.166	7,92
45-49	352.944	340.999	693.943	6,69
50-54	286.637	285.145	571.782	5,51
55-59	221.037	227.287	448.324	4,32
60-64	158.790	162.137	320.927	3,09
65+	200.855	224.066	424.921	4,10
Jumlah	**5.202.815**	**5.171.420**	**10.374.235**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.6. Ketenagakerjaan

Kegiatan utama penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi DKI Jakarta cukup beragam. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berjumlah 7.836.404 jiwa. Penduduk angkatan kerja pada

penduduk berumur 15 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan dengan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja memiliki jumlah 4.856.116 jiwa (61,97%) dan didominasi dengan penduduk yang bekerja (4.509.171 jiwa) dibandingkan penduduk yang pengangguran terbuka (346.945 jiwa).

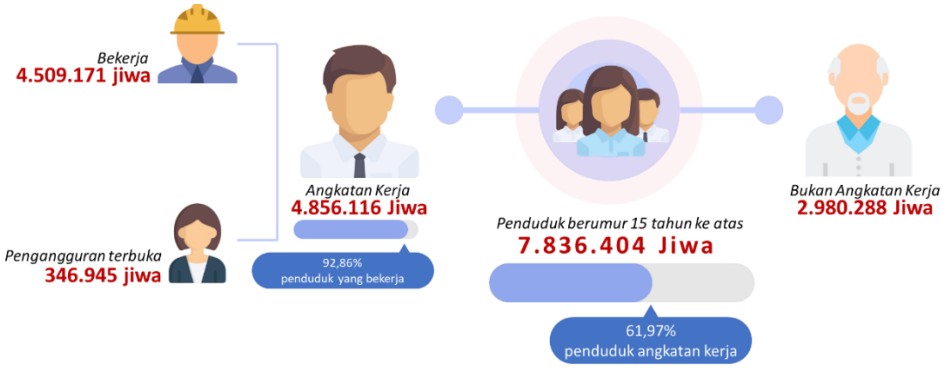

Gambar 2.10 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota		Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepulauan Seribu	8.304	657	8.961	7.191	16.152
2	Jakarta Selatan	988.835	72.844	1.061.679	630.194	1.691.873
3	Jakarta Timur	1.170.685	99.033	1.269.718	885.974	2.155.692
4	Jakarta Pusat	421.265	30.811	452.076	258.861	710.937
5	Jakarta Barat	1.082.035	74.018	1.156.053	761.147	1.917.200
6	Jakarta Utara	838.047	69.582	907.629	436.921	1.344.550
DKI Jakarta		**4.509.171**	**346.945**	**4.856.116**	**2.980.288**	**7.836.404**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi ditamatkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dibanding jenjang pendidikan lainnya. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3.075.492 jiwa.

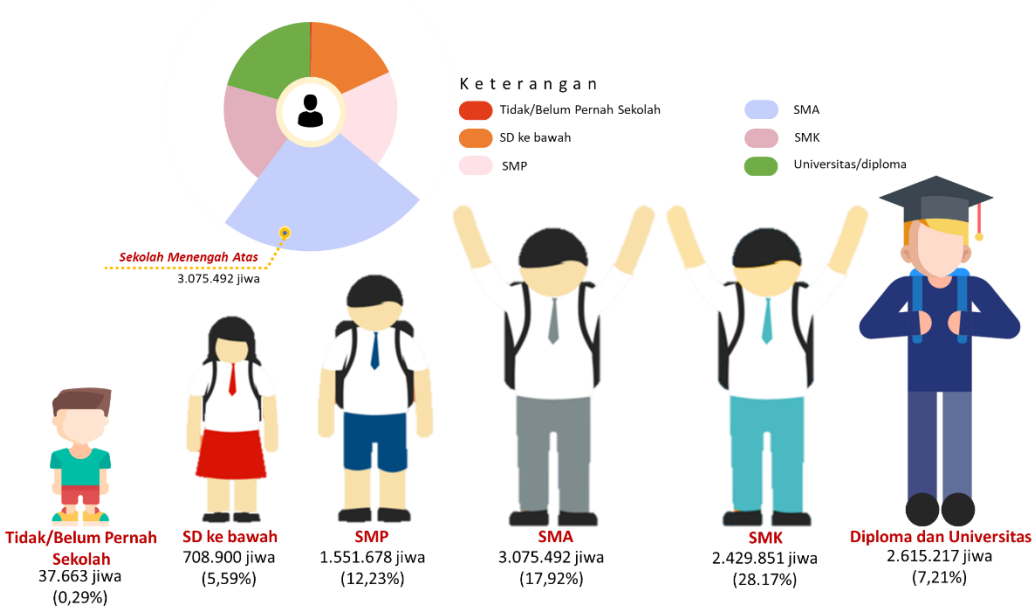

Gambar 2.11. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (Jiwa)			Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	12.992	-	12.992	24.671	37.663
Tidak/Belum Tamat SD	237.923	12.890	250.813	458.087	708.900
Sekolah Dasar	544.877	21.414	566.291	985.387	1.551.678
Sekolah Menengah Pertama	682.444	52.917	735.361	1.538.358	2.273.719
Sekolah Menengah Atas	1.047.700	90.736	1.138.436	1.937.056	3.075.492
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	903.928	110.104	1.014.032	1.415.819	2.429.851
Diploma I/II/III/Akademi	244.115	17.134	261.249	388.062	649.311
Universitas	835.192	41.750	876.942	1.088.964	1.965.906
Jumlah	**4.509.171**	**346.945**	**4.856.116**	**7.836.404**	**12.692.520**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Apabila ditinjau jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas terkait jenis kelamin, penduduk laki-laki mendominasi lapangan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Jumlah penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan mencapai 2.845.402 jiwa (63,10%) dan penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 1.633.769 jiwa (36,90%). Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat beberapa lapangan

pekerjaan utama, yaitu: pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air; bangunan; perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; angkutan, pergudangan dan komunikasi; keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan; serta jasa kemasyarakatan. Lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel menjadi salah satu lapangan pekerjaan utama yang banyak dilakukan oleh penduduk Provinsi DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas, yaitu: 1.518.258 jiwa (33,67%).

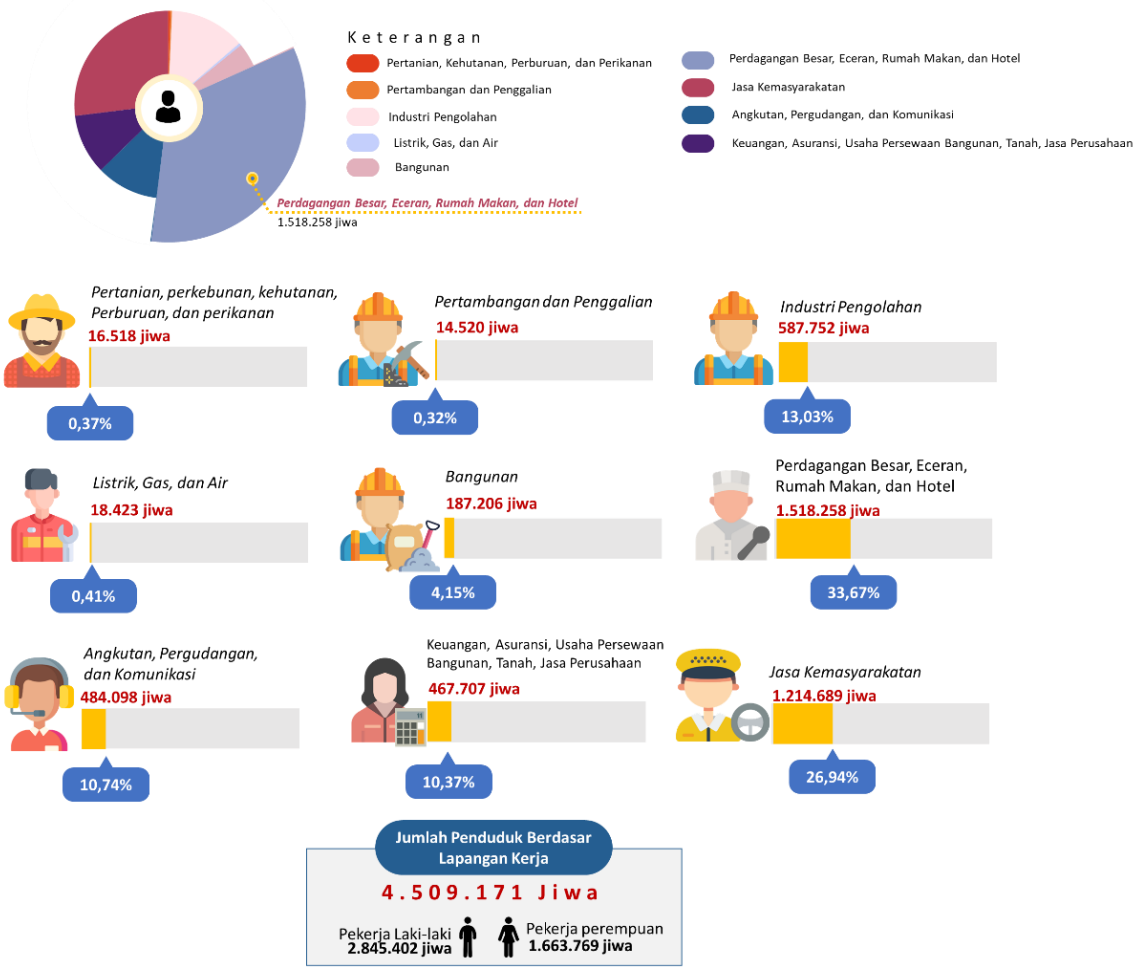

Gambar 2.12. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	9.737	6.781	16.518
2	Pertambangan dan Penggalian	11.754	2.766	14.520
3	Industri Pengolahan	394.012	193.740	587.752
4	Listrik, Gas, dan Air	13.628	4.795	18.423
5	Bangunan	164.525	22.681	187.206
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	862.447	655.811	1.518.258
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	425.787	58.311	484.098
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan	312.899	154.808	467.707
9	Jasa Kemasyarakatan	650.613	564.076	1.214.689
Jumlah		**2.845.402**	**1.663.769**	**4.509.171**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017, yaitu: 61,97%. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,14% pada tahun 2017.

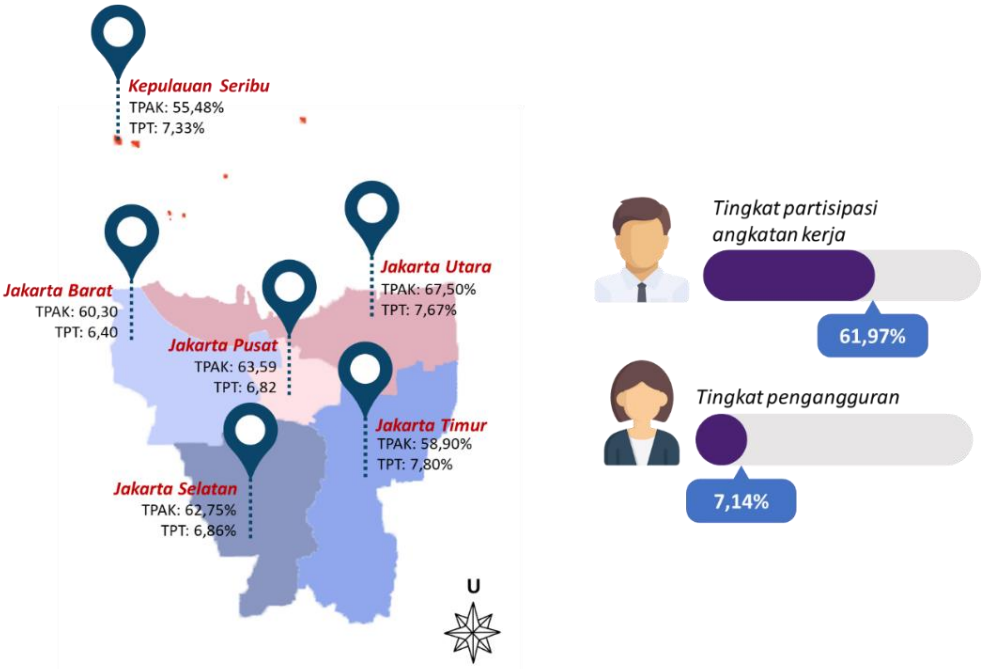

Gambar 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Tabel 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Administrasi pada Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota Administrasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Kepulauan Seribu	5,51	NA	7,33	63,37	NA	55,48
Jakarta Selatan	6,36	NA	6,86	67,75	NA	62,75
Jakarta Timur	9,13	NA	7,80	64,55	NA	58,90
Jakarta Pusat	6,51	NA	6,82	64,99	NA	63,59
Jakarta Barat	6,31	NA	6,40	67,76	NA	60,30
Jakarta Utara	7,11	NA	7,67	66,45	NA	67,50
Jumlah	**7,23**	**6,12**	**7,14**	**66,39**	**66,91**	**61,97**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.7 Sosial dan Kesejahteraan

Tingkat partisipasi sekolah dapat ditinjau dari kelompok umur penduduk. Partisipasi penduduk yang masih sekolah didominasi oleh penduduk kelompok umur 7-12 tahun, yaitu: 50,67%. Sedangkan, penduduk tidak sekolah lagi banyak terjadi pada penduduk berusia 19-24 tahun, yaitu: 85,12%. Kelompok umur 19-24 tahun merupakan kelompok umur yang mendominasi bagi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah.

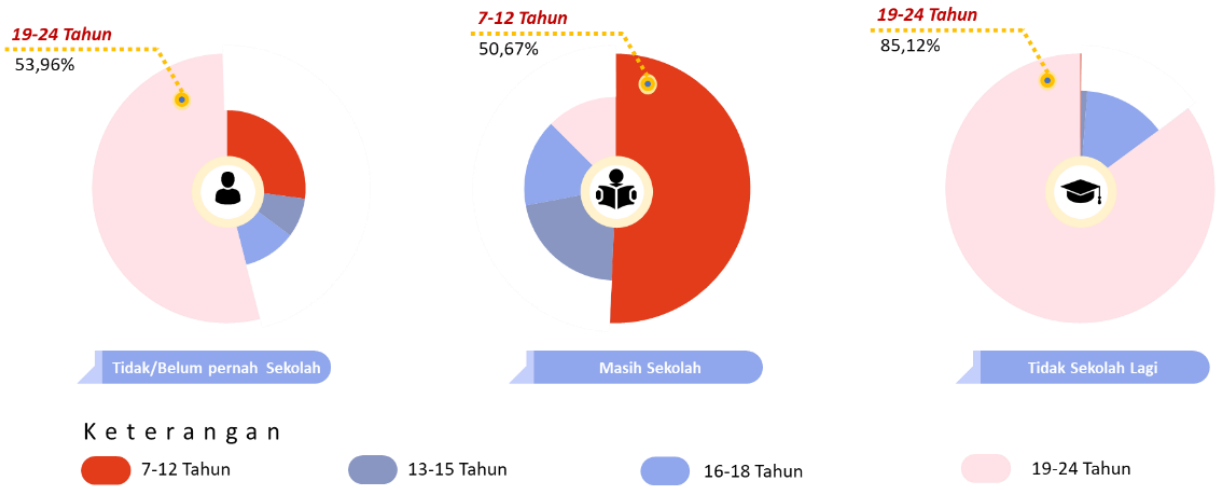

Gambar 2.14. Persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.13. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah		Partisipasi Sekolah (%)		
		Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
(1)		(2)	(3)	(4)
Laki-laki	7-12	40,98	50,89	1,00
	13-15	0,00	21,22	1,32
	16-18	33,72	15,65	12,64
	19-24	25,31	12,24	86,04
	7-24	100,00	100,00	100,00
Perempuan	7-12	20,74	50,44	0,22
	13-15	11,75	21,47	0,86
	16-18	0,40	15,31	14,60
	19-24	67,10	12,78	84,32
	7-24	100,00	100,00	100,00
Laki-laki dan Perempuan	7-12	27,10	50,67	0,12
	13-15	8,06	21,34	1,07
	16-18	10,87	15,48	13,69
	19-24	53,96	12,50	85,12
	7-24	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk, Provinsi DKI Jakarta memiliki fasilitas sekolah dengan beberapa jenjang pendidikan, yaitu: Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK).

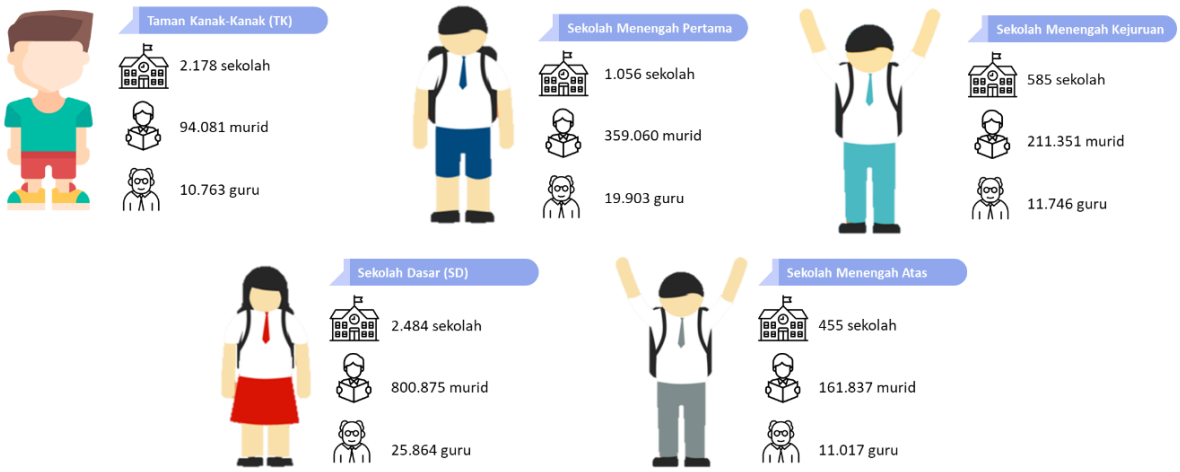

Gambar 2.15. Jumlah sekolah, guru, dan murid menurut jenis sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.14. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenis Sekolah di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

	Jenis Sekolah	Sekolah	Guru	Murid
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Kanak-kanak (TK)	2.178	10.763	94.081
2	Sekolah Dasar (SD)	2.484	25.864	800.875
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.056	19.903	359.060
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	455	11.017	161.837
5	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK)	585	11.746	211.351

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki 122 Perguruan Tinggi Negeri dan 3.154 Perguruan Tinggi Swasta. Jumlah mahasiswa yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 1.437.425 jiwa dengan jumlah tenaga edukasi sebanyak 247.269 jiwa.

Gambar 2.16. Jumlah perguruan tinggi, tenaga edukasi, dan mahasiswa di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Selain bidang pendidikan, Provinsi DKI Jakarta menyediakan kebutuhan palayan di bidang kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2017 terdiri dari 187 rumah sakit (25.523 tempat tidur), 29 rumah sakit/tempat bersalin (1.832 tempat tidur), 44 puskesmas kecamatan, 296 puskesmas kelurahan, 1.203 balai pengobatan umum, 125 balai pengobatan gigi, 168 klinik spesialis, 175 laboratorium, 2.525 apotek, dan 4.384 posyandu.

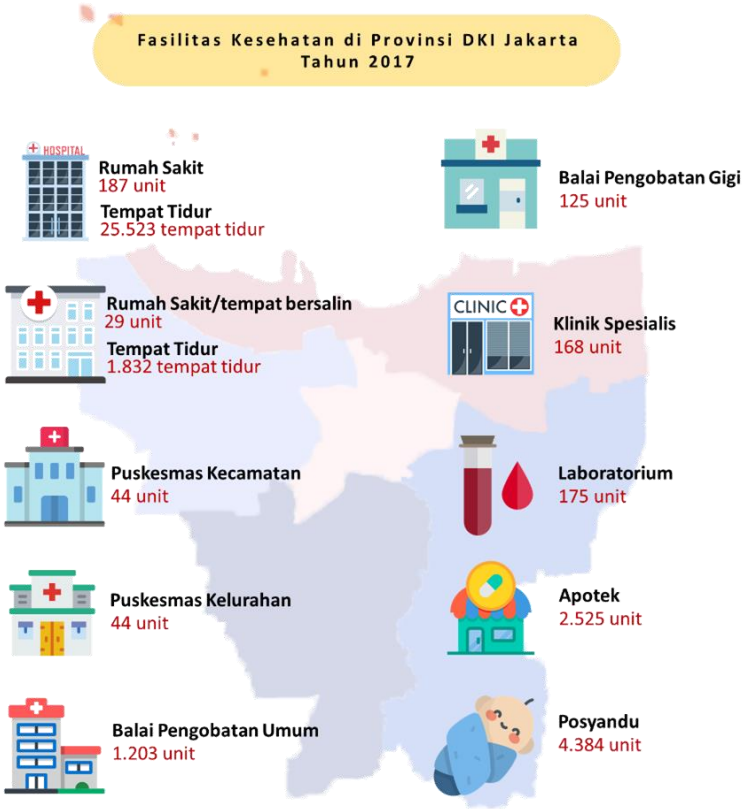

Gambar 2.17 Fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Dalam menjalankan fasilitas kesehatan yang ada, tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta tersedia untuk melayani kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang banyak dijumpai, yaitu: dokter spesialis 4.169 orang. Sedangkan, tenaga kesehatan yang paling sedikit, yaitu: apoteker (693 orang).

Gambar 2.18 Tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Kesejahteraan penduduk Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya merata. Penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditemui. Penduduk miskin pada tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 389,68 ribu jiwa (3,77%).

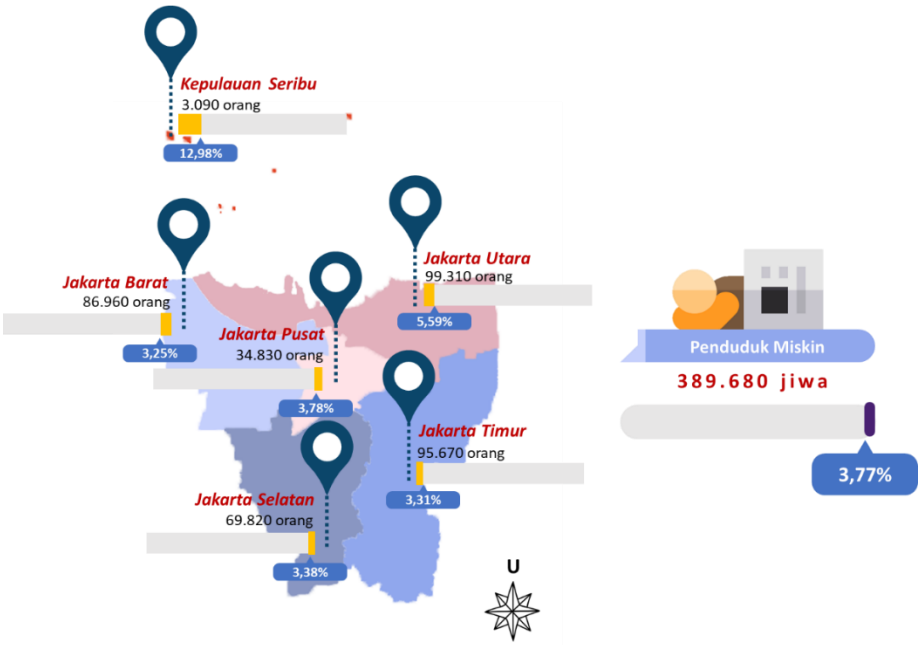

Gambar 2.19. Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota Administrasi	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Seribu	2,51	2,67	2,65	2,96	3,09	11,40	12,58	12,98
Jakarta Selatan	74,59	80,79	74,46	71,96	69,82	3,41	3,27	3,38
Jakarta Timur	86,83	96,54	91,44	91,37	95,67	3,24	3,19	3,31
Jakarta Pusat	33,62	37,65	38,01	35,82	34,83	4,16	3,91	3,78
Jakarta Barat	83,24	90,95	89,39	84,08	86,96	3,64	3,38	3,25
Jakarta Utara	90,91	104,20	102,97	98,11	99,31	5,91	3,57	5,59
Jumlah	**371,70**	**412,80**	**398,92**	**384,30**	**389,68**	**3,93**	**3,75**	**3,77**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.8. Pembangunan Sektoral

2.1.8.1. Sektor Pertanian dan Kehutanan

Luas lahan sawah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: 584,5 hektar. Luas lahan ini terbagi kedalam dua jenis pengairan yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah non irigasi. Sawah irigasi mendominasi luas lahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Luas lahan sawah irigasi seluas 483 hektar (82,63%) dan banyak ditemui di Jakarta Utara (483 hektar). Sedangkan, sawah non irigasi memiliki luas 101,5 hektar dan banyak ditemui di Jakarta Barat (96,5 hektar).

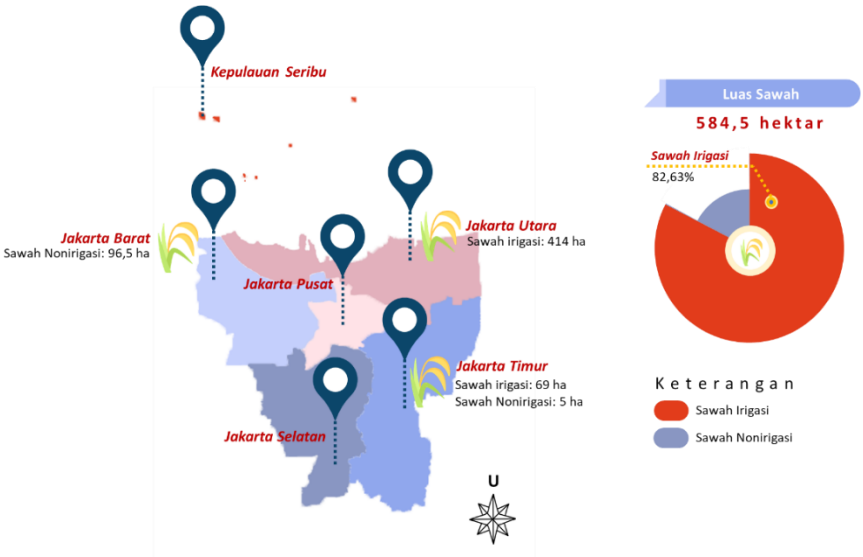

Gambar 2.20. Luas lahan sawah di Provinsi DKI Jakarta (hektar) pada tahun 2017

Tabel 2.16. Luas Lahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi DKI Jakarta (Hektar) pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Irigasi	Nonirigasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Jakarta Selatan	-	-	-
Jakarta Timur	69	5	74
Jakarta Pusat	-	-	-
Jakarta Barat	-	96,5	96,5
Jakarta Utara	414	-	414
DKI Jakarta	**483**	**101,5**	**584,5**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Apabila ditinjau terkait jumlah produksi padi, Provinsi DKI Jakarta mampu memproduksi padi sebanyak 4.238 ton pada tahun 2017 dengan luas panen sebesar 787,1 hektar. Produktivitas padi sawah pada tahun 2017, yaitu: 5,39 ton/hektar.

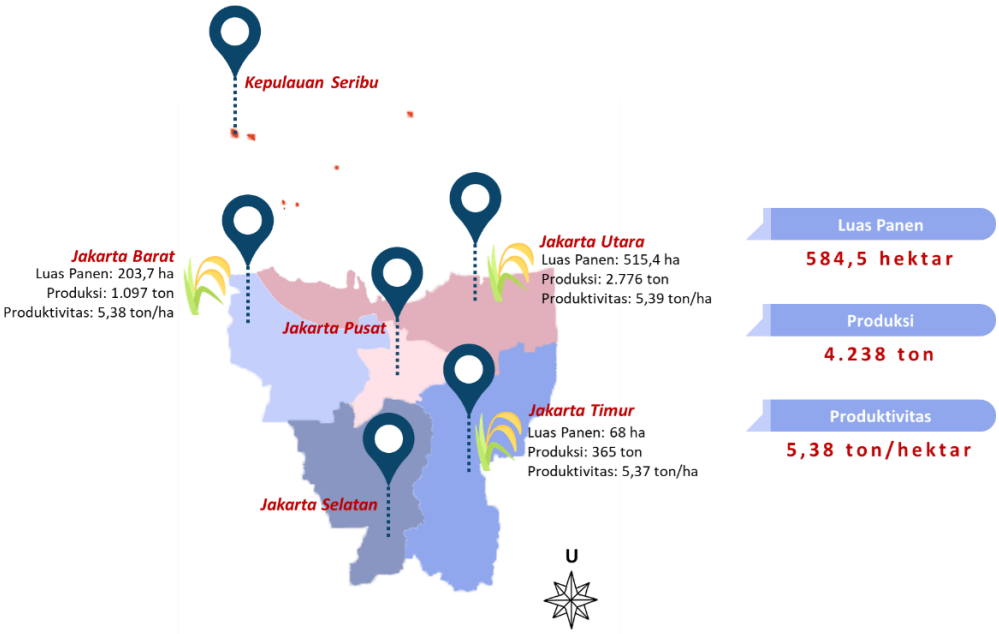

Gambar 2.21. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.17. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Jakarta Selatan	-	-	-
Jakarta Timur	68	365	5,37
Jakarta Pusat	-	-	-
Jakarta Barat	203,7	1.097	5,38
Jakarta Utara	515,4	2.776	5,39
DKI Jakarta	**787,1**	**4.238**	**5,38**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Selain itu, lahan tegal/kebun, ladang/huma dan lahan yang sementara tidak diusahakan dapat ditemui di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017, luas tegal/kebun di Provinsi DKI Jakarta memiliki luas 923,5 hektar. Sedangkan, luas ladang/huma sebesar 12 hektar dan hanya ditemui di Jakarta Timur. Lahan sementara tidak diusahakan 149,6 hektar dan banyak ditemui di Jakarta Selatan (144,6 hektar).

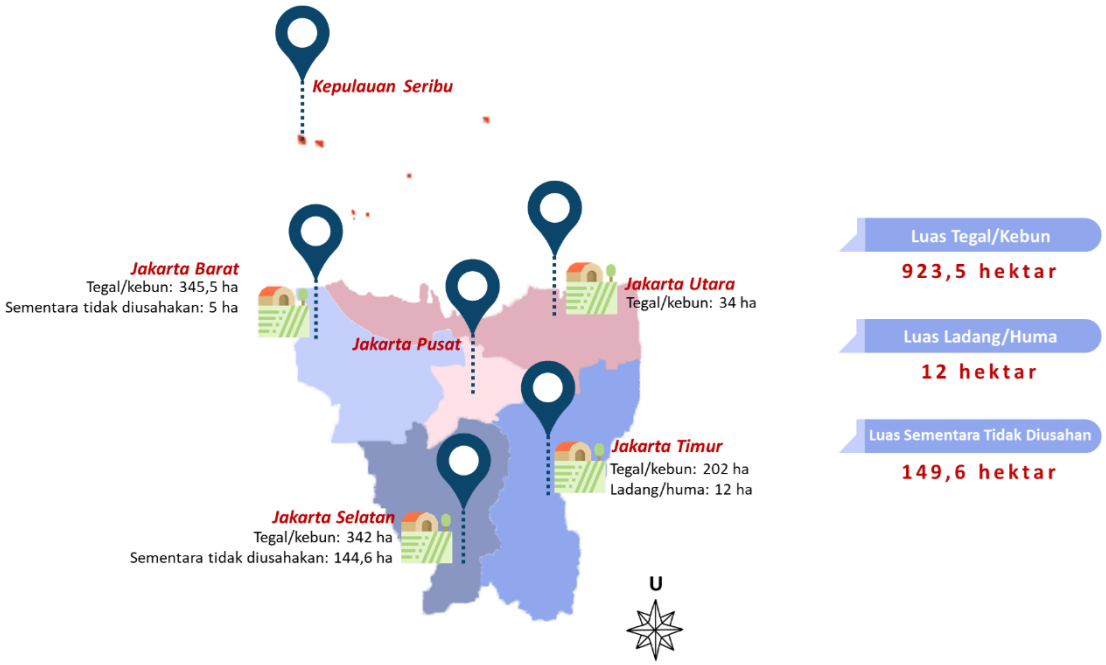

Gambar 2.22. Luas lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.18. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Hektar) pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Jakarta Selatan	342	-	144,6
Jakarta Timur	202	12	-
Jakarta Pusat	-	-	-
Jakarta Barat	345,5	-	5
Jakarta Utara	34	-	-
DKI Jakarta	**923,5**	**12**	**149,6**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Holtikultur di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari berbagai tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias yang beraneka ragam. Terdapat holtikultur unggulan DKI Jakarta yang dapat ditemui. Pada tanaman sayuran, kangkung merupakan tanaman sayuran yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2017 hingga mencapai 58.246 kwintal. Sedangkan, mangga menjadi buah-buahan yang paling banyak diproduksi sebesar 60.002 kwintal. Tanaman obat yang banyak dihasilkan yaitu jahe 5.227 kg. Pada tanaman hias, anggrek menjadi tanaman hias yang paling banyak dibudidaya.

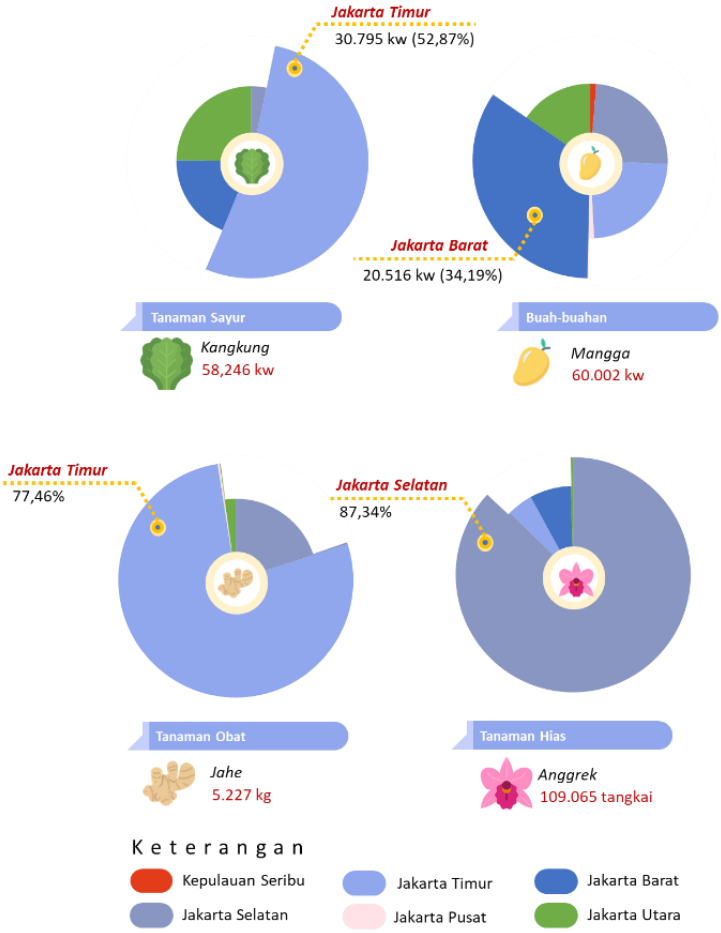

Gambar 2.23. Holtikultur unggulan DKI Jakarta berdasarkan hasil panen terbesar pada tahun 2017

Tabel 2.19. Holtikultur Unggulan DKI Jakarta Berdasarkan Hasil Panen Terbesar pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tanaman Sayuran	Buah-buahan	Tanaman Obat	Tanaman Hias
	Kangkung (kw)	Mangga (kw)	Jahe (kg)	Anggrek (tangkai)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	771	-	-
Jakarta Selatan	1.940	14.619	1.048	95.253
Jakarta Timur	30.795	14.107	4.049	5.147
Jakarta Pusat	-	715	15	-
Jakarta Barat	11.011	20.516	-	8.209
Jakarta Utara	14.500	9.274	115	456
DKI Jakarta	**58.246**	**60.002**	**5.227**	**109.065**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sektor Perikanan

Sektor perikanan dapat dijumpai di kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, produksi ikan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi ikan tangkap di Provinsi DKI Jakarta mencapai 135.619 ton (96,88% dari jumlah produksi ikan di Provinsi DKI Jakarta) dan Jakarta Utara sebagai penyumbang terbesar dalam produksi ikan tangkap (134.404 ton atau 99,10% dari jumlah produksi ikan tangkap di Provinsi DKI Jakarta).

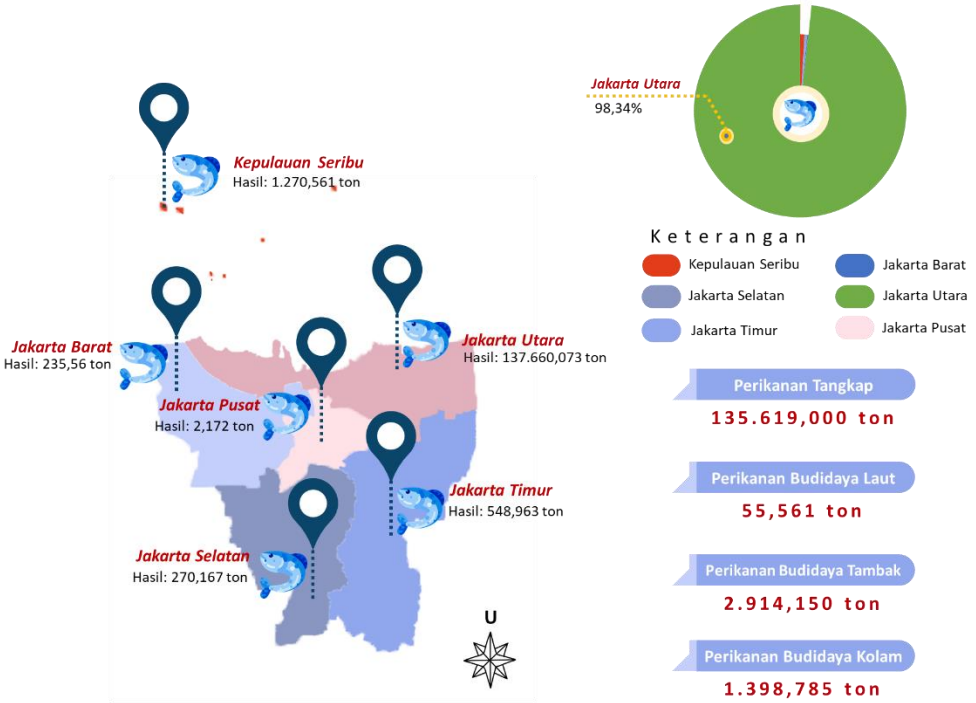

Gambar 2.24 Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Provinsi DKI Jakarta (ton) pada tahun 2017

Tabel 2.20 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota Administrasi (Ton) pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya			Jumlah
		Laut	Tambak	Kolam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	1.215,000	55,561	-	-	1.270,561
Jakarta Selatan	-	-	-	270,167	270,167
Jakarta Timur	-	-	-	548,963	548,963
Jakarta Pusat	-	-	-	2,172	2,172
Jakarta Barat	-	-	-	235,560	235,560
Jakarta Utara	134.404,000	-	2.914,150	341,923	137.660,073
Jumlah	**135.619,000**	**55,561**	**2.914,150**	**1.398,785**	**139.987,496**

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya			Jumlah
		Laut	Tambak	Kolam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	135.619,000	55,561	2.914,150	1.398,785	139.987,496
2015	289.214,000	1.036,440	2.656,480	4.266,375	297.173,295
2014	225.355,300	1.047,100	755,780	5.167,755	232.325,935
2013	209.743,500	822,303	1.211,200	3.035,727	214.812,730

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sektor Peternakan

Hewan ternak yang dapat ditemui di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing dan domba. Pada tahun 2017, populasi kambing mendominasi keberadaan hewan ternak di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4.537 ekor. Sedangkan, populasi kerbau menjadi populasi hewan ternak terkecil di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: 58 ekor.

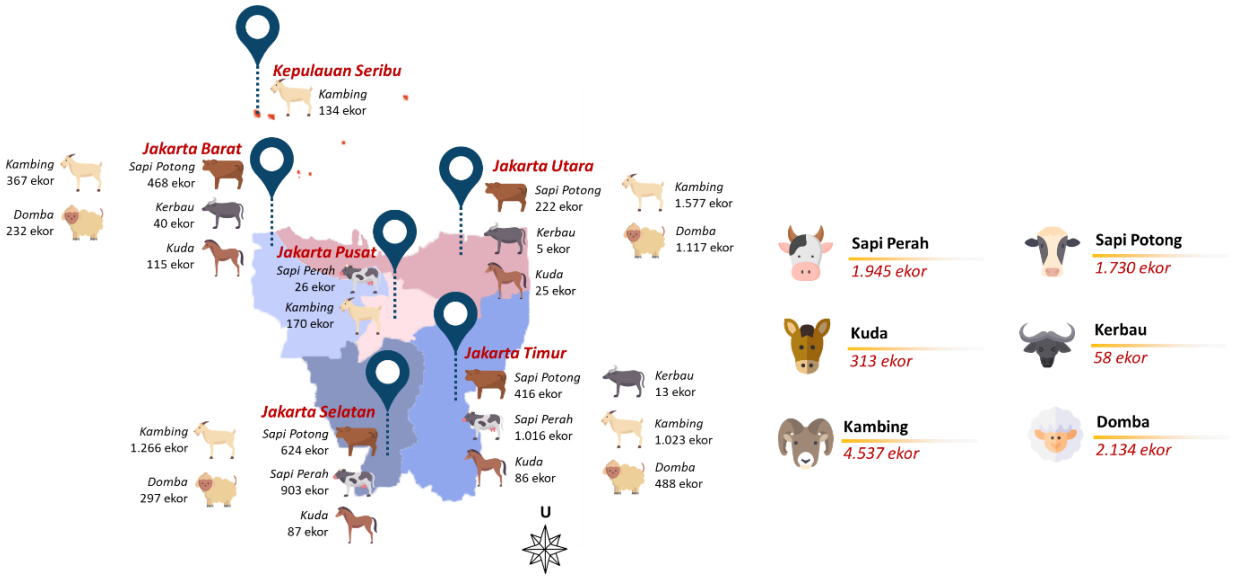

Gambar 2.25 Populasi hewan ternak di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.21 Populasi Hewan Ternak Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Ternak					
	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	134	-
Jakarta Selatan	624	903	-	87	1.266	297
Jakarta Timur	416	1.016	13	86	1.023	488
Jakarta Pusat	-	26	-	-	170	-
Jakarta Barat	468	-	40	115	367	232
Jakarta Utara	222	-	5	25	1.577	1.117

Kabupaten/Kota	Jenis Ternak					
	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
Jumlah	**1.730**	**1.945**	**58**	**313**	**4.537**	**2.134**
2016	1.371	2.411	120	290	5.739	2.267
2015	893	2.433	247	68	5.688	1.346
2014	1.094	2.638	127	107	6.112	2.211
2013	2.108	2.686	203	84	6.626	1.174

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berbeda dengan hewan ternak, populasi unggas di Provinsi DKI Jakarta tidak begitu beragam. Populasi unggas yang dapat dijumpai di Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya itik/itik manila dengan jumlah populasi sebesar 4.125 ekor dan banyak ditemui di Jakarta Utara.

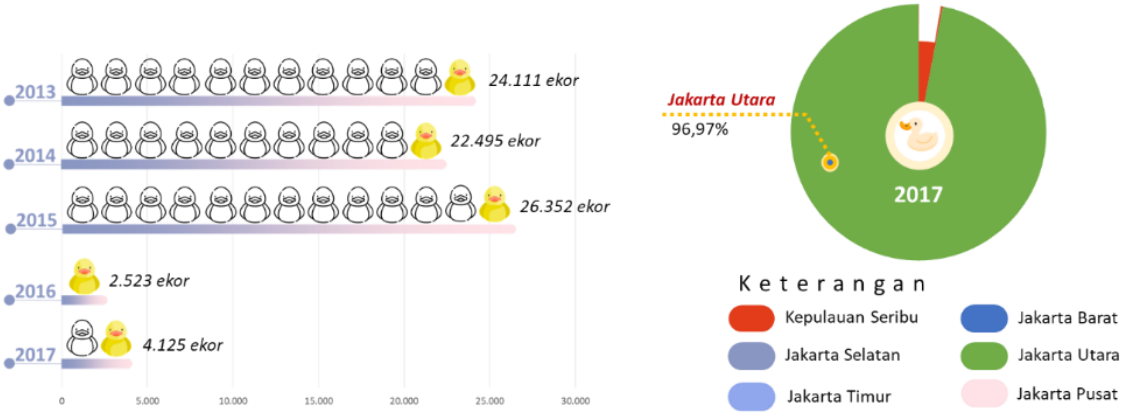

Gambar 2.26. Populasi itik di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2017

Tabel 2.22. Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota Administrasi dan Jenis Unggas di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Unggas		
	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
Kepulauan Seribu	-	-	125
Jakarta Selatan	-	-	-
Jakarta Timur	-	-	-
Jakarta Pusat	-	-	-
Jakarta Barat	-	-	-
Jakarta Utara	-	-	4.000
Jumlah	**-**	**-**	**4.125**
2016	-	-	2.523
2015	-	-	26.352
2014	-	-	22.495
2013	-	159.800	24.111

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sektor Kehutanan

Jumlah luas Hutan Lindung dan Cagar Alam di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, yaitu: 108.475,63 hektar. Sebagian besar lahan merupakan hutan lindung perairan dengan luas area 108.045 hektar (99,60% dari jumlah luas Hutan Lindung dan Cagar Alam di Provinsi DKI Jakarta). Sedangkan, luas lahan hutan lindung dan cagar alam daratan 430,63 hektar (0,40% dari jumlah luas hutan lindung dan cagar alam di Provinsi DKI Jakarta).

Tabel 2.23. Luas Hutan Lindung dan Cagar Alam Menurut Tipe Hutan dan Lokasi di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016

Tipe Hutan		Lokasi		Luas Hutan (ha)
A.	Kawasan Pelestarian Alam	1.	Taman Nasional Kepulauan Seribu	
			a. Daratan (Pulau Penjaliran Barat dan Timur)	39,50
			b. Perairan	108.000,00
		2.	Taman Wisata Alam Angke Kapuk	99,82
B.	Kawasan Suaka Alam	1.	Cagar Alam Pulau Bokor	18,00
		2.	Suaka Margasatwa	45,00
			I. Pulau Rambut	
			a. Daratan	45,00
			b. Perairan	45,00
			II. Muara Angke	25,02
C.	Hutan Lindung Angke Kapuk			44,76
D.	Hutan Produksi Angke Kapuk			162,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Apabila ditinjau lebih lanjut terkait jumlah pohon pelindung, pohon pelindung yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, yaitu: 894.048 pohon. Pohon pelindung yang paling banyak, yaitu: mangrove (620.968 pohon, 69,46% dari jumlah pohon pelindung yang ada di Provinsi DKI Jakarta).

Tabel 2.24. Jumlah Pohon Pelindung Menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2014-2016

Jenis Pohon		Tahun		
		2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Acasia mangium	630	620	620
2	Tanjung	350	350	350
3	Glondogan	1.020	1.020	1.020
4	Bungur	300	300	300
5	Mahoni	3.117	3.117	3.117
6	Johar	-	-	-
7	Kupu-kupu	-	-	-
8	Mangrove	620.968	620.968	620.968

Jenis Pohon		Tahun		
		2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)
9	Salam	80	80	80
10	Ketapang	250	260	260
11	Flamboyan	25	25	25
12	Trembesi	4.224	4.224	4.224
13	Jamblang	25	25	25
14	Buni	355	350	350
15	Lobi-lobi	1.015	1.020	1.020
16	Sawo	30	30	30
17	Asam Landi	300	300	300
18	Rukem	30	30	30
19	Kiara Payung	52	52	52
20	Beringin	14	14	14
21	Bisbul	30	30	30
22	Nyamplung	398	398	398
23	Kayu Putih	200	200	200
24	Bintaro	672	672	672
25	Kenari	1.350	1.300	1.300
26	Cempaka	700	700	700
27	Jambu Biji	668	668	668
28	Sirsak	7	7	7
29	Matoa	300	300	300
30	Kemang	50	50	50
31	Sukun	103	103	103
32	Damar	106	106	106
33	Jambu Bol	25	25	25
34	Nangka	10	10	10
35	Manggis	15	15	15
36	Menteng	325	325	325
37	Kayu Manis	300	300	300
38	Eucallyptus	400	400	400
39	Pulai	25	25	25
40	Duren	250	250	250
41	Aghatis	700	700	700
42	Angsana	555	555	555
43	Jati	2.480	2.480	2.480
44	Lain-lain	251.644	251.644	251.644
Jumlah		**894.098**	**894.048**	**894.048**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Luas hutan kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 182,54 hektar atau 27,56% dari jumlah luas area Provinsi DKI Jakarta yang tersebar pada setiap kota. Jakarta Timur memiliki hutan kota paling luas dengan luas area hutan kota 73,24 hektar dan disusul oleh Jakarta Selatan dengan luas area hutan kota 62,27 hektar.

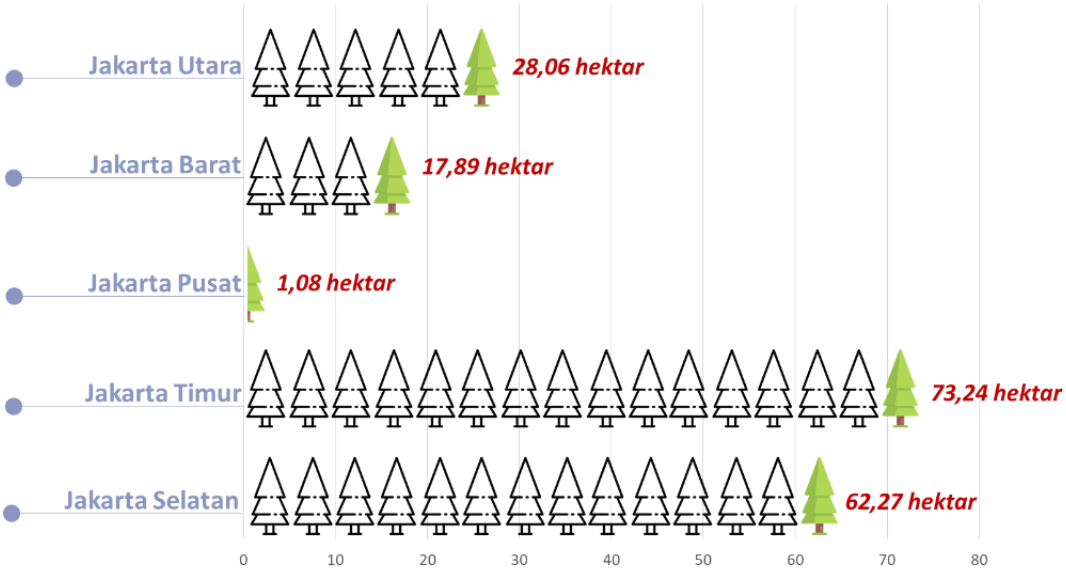

Gambar 2.27. Luas kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016

Tabel 2.25. Luas Kawasan Hutan Kota Menurut Kota Administrasi dan Lokasi di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016

Kota Administrasi		Lokasi	Luas Hutan (Hektar)
(1)		(2)	(3)
Jakarta Selatan	1	Kampus UI Depok	55,40
(62,27 hektar)	2	Blok P Walikota Jakarta Selatan	1,64
	3	Cipedak	0,50
	4	Srengseng Sawah	0,60
	5	Hutan Kota Pondok Labu	2,02
	6	Hutan Kota Jalan JOE	0,93
	7	Hutan Kota Jalan Kahfi II Jagakarsa	1,18
Jakarta Timur	1	Komplek Lanud Hali PK	3,50
(73,24 hektar)	2	Komplek Kopassus Cijantung	1,75
	3	PT JIEP Pulo Gadung	8,90
	4	Mabes TNI Cilangkap	14,43
	5	Buperta Cibubur	27,32
	6	Situ Rawa Dongkal	3,28
	7	Dukuh	0,50
	8	Ujung Menteng	1,43

Kota Administrasi		Lokasi	Luas Hutan (Hektar)
(1)		(2)	(3)
	9	Munjul	2,81
	10	Setu	0,93
	11	Pondok Ranggon	0,44
	12	Cilangkap	4,22
	13	Cipayung	1,32
	14	Ciracas	1,31
	15	Pulo Gebang	1,10
Jakarta Pusat (1,08 hektar)	1	Masjid Istiglal	1,08
Jakarta Barat (17,89 hektar)	1	Srengseng	15,00
	2	Rawa Buaya	1,09
	3	Kembangan Utara	1,80
Jakarta Utara (28,06 hektar)	1	Waduk Sunter Utara	8,20
	2	Kawasan Berikat Nusantara Marunda	1,59
	3	Kemayoran	4,60
	4	PT Jakarta Propertindo	2,49
	5	Hutan Kota Rawa Malang Semper Timur	5,70
	6	Hutan Kota Rorotan	2,18
	7	Hutan Kota Sukapura	2,40
	8	Cilincing	0,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.8.2 Sektor Pariwisata

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik. Untuk menunjang kebutuhan wisatawan yang datang ke Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta menyediakan akomodasi hotel sebagai tempat tinggal sementara bagi para wisatawan yang hendak datang ke Provinsi DKI Jakarta. Hotel yang ada di Provinsi DKI Jakarta mencapai 440 unit hotel dengan jumlah kamar dan tempat tidur mencapai 48.104 kamar dan 66.284 tempat tidur pada tahun 2016.

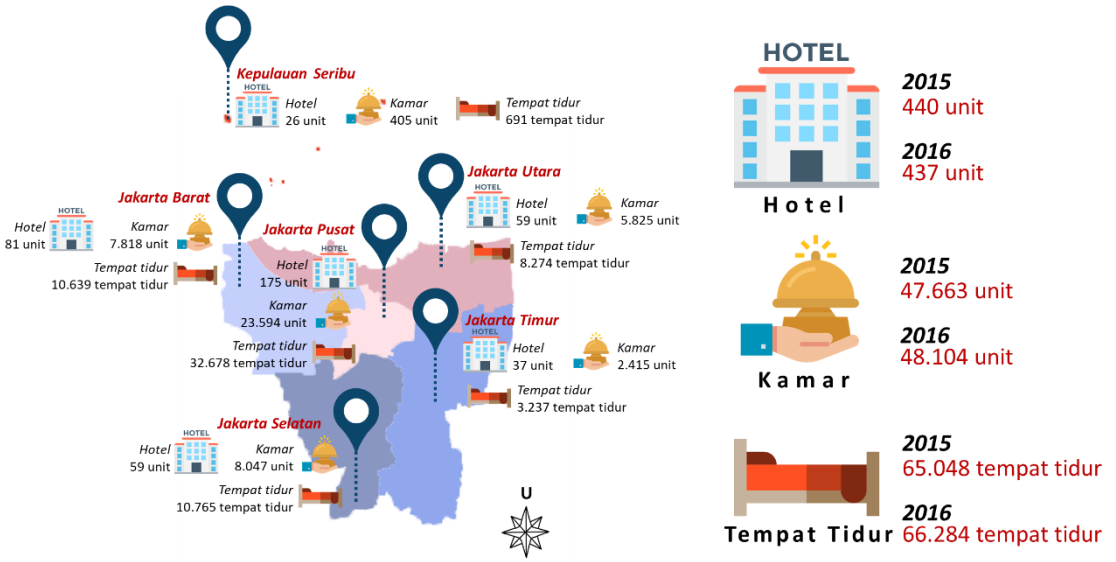

Gambar 2.28. Hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016

Tabel 2.26 Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016

Kabupaten	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	23	26	646	405	817	691
Jakarta Selatan	58	59	7.834	8.047	10.479	10.765
Jakarta Timur	31	37	2.144	2.415	2.803	3.237
Jakarta Pusat	192	175	23.380	23.594	32.081	32.678
Jakarta Barat	82	81	8.146	7.818	10.871	10.639
Jakarta Utara	54	59	5.513	5.825	7.997	8.274
DKI Jakarta	**440**	**437**	**47.663**	**48.104**	**65.048**	**66.284**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Obyek wisatawan yang ada di Provinsi DKI Jakarta cukup beragam yang terdiri dari taman bermain hingga wisata museum. Taman Impian Jaya Ancol dan TMII merupakan dua obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol dan TMII secara berturut-turut pada tahun 2017 sebanyak 19.261.212 wisatawan dan 5.704.712 wisatawan.

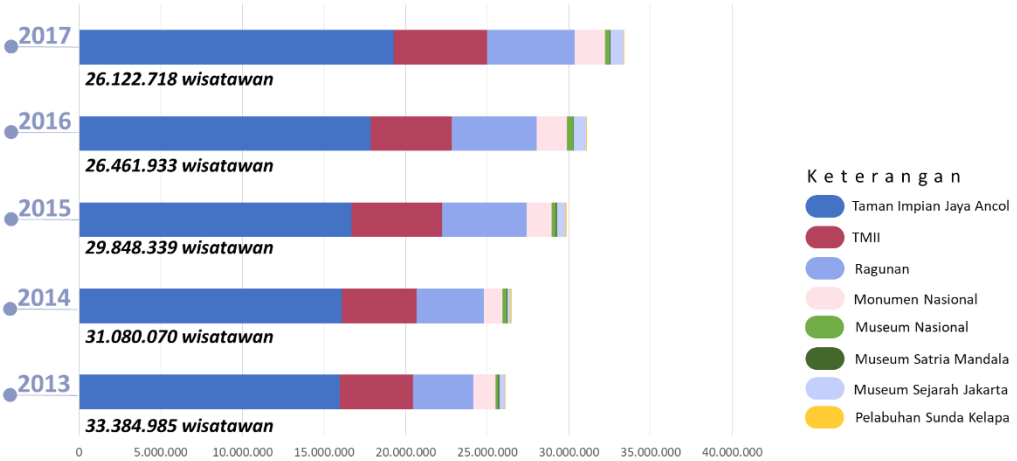

Gambar 2.29. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata unggulan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2017

Tabel 2.27. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2013-2017

Lokasi		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Taman Impian Jaya Ancol	15.948.829	16.085.604	16.661.517	17.850.284	19.261.212
2	TMII	4.483.847	4.587.735	5.575.905	4.977.704	5.704.712
3	Ragunan	3.681.968	4.100.570	5.157.035	5.177.877	5.366.148
4	Monumen Nasional	1.380.868	1.156.208	1.539.195	1.878.155	1.866.428
5	Museum Nasional	169.527	245.848	266.359	380.762	293.918
6	Museum Satria Mandala	46.002	38.756	49.964	37.969	36.144
7	Museum Sejarah Jakarta	371.467	196.433	535.144	733.921	798.139
8	Pelabuhan Sunda Kelapa	40.210	50.779	63.220	43.398	58.284
Jumlah		**26.122.718**	**26.461.933**	**29.848.339**	**31.080.070**	**33.384.985**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.658.055 wisatawan dan sebagian besar datang melalui Bandara Soekarno-Hatta (2.590.769 wisatawan, 97,47% dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi DKI Jakarta).

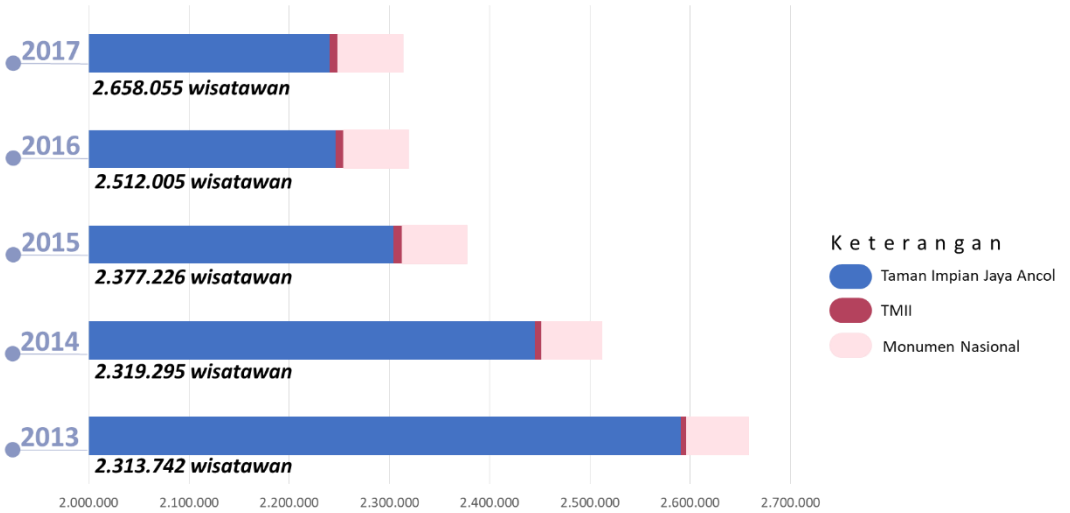

Gambar 2.30 Wisatawan mancanegara yang datang ke DKI Jakarta menurut pintu masuk pada tahun 2017

Tabel 2.28 Wisatawan Mancanegara yang Datang ke DKI Jakarta Menurut Pintu Masuk pada Tahun 2017

Bulan	Bandara Soekarno-Hatta	Bandara Halim Perdana Kusuma	Pelabuhan Tanjung Priok	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	189.242	723	3.823	193.788
Februari	183.977	718	4.743	189.438
Maret	215.651	1.098	4.871	221.620
April	211.131	630	4.943	216.704
Mei	204.723	364	5.508	210.595
Juni	158.147	175	4.011	162.333
Juli	279.550	399	5.784	285.733
Agustus	280.737	230	5.398	286.365
September	219.348	160	5.347	224.855
Oktober	215.612	419	5.031	221.062
November	217.201	223	6.655	224.079
Desember	215.450	231	5.802	221.483
Jumlah	**2.590.769**	**5.370**	**61.916**	**2.658.055**
2016	2.445.275	6.408	60.322	2.512.005
2015	2.304.275	8.340	64.611	2.377.226
2014	2.246.437	7.917	64.941	2.319.295
2013	2.240.490	8.025	65.227	2.313.742

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.8.3 Taman

Jenis taman di Provinsi DKI Jakarta beragam yang terbagi menjadi taman kota dan taman lingkungan, taman interaktif, taman/bangunan umum, taman rekreasi, jalur hijau jalan dan pedestrian, jalur hijau tepian air dan penyempurna, taman pemakaman, serta taman eks refungsi SPBU. Jumlah taman dan luas area taman di Provinsi DKI Jakarta tiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah taman yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: 2.523 dengan jumlah luas area sebesar 27.488.095,19 m^2. Sebagian besar taman yang ada di Provinsi DKI Jakarta merupakan taman kota dan taman lingkungan, yaitu: berjumlah 2.151 taman dengan luas area 19.237.436,67 m^2.

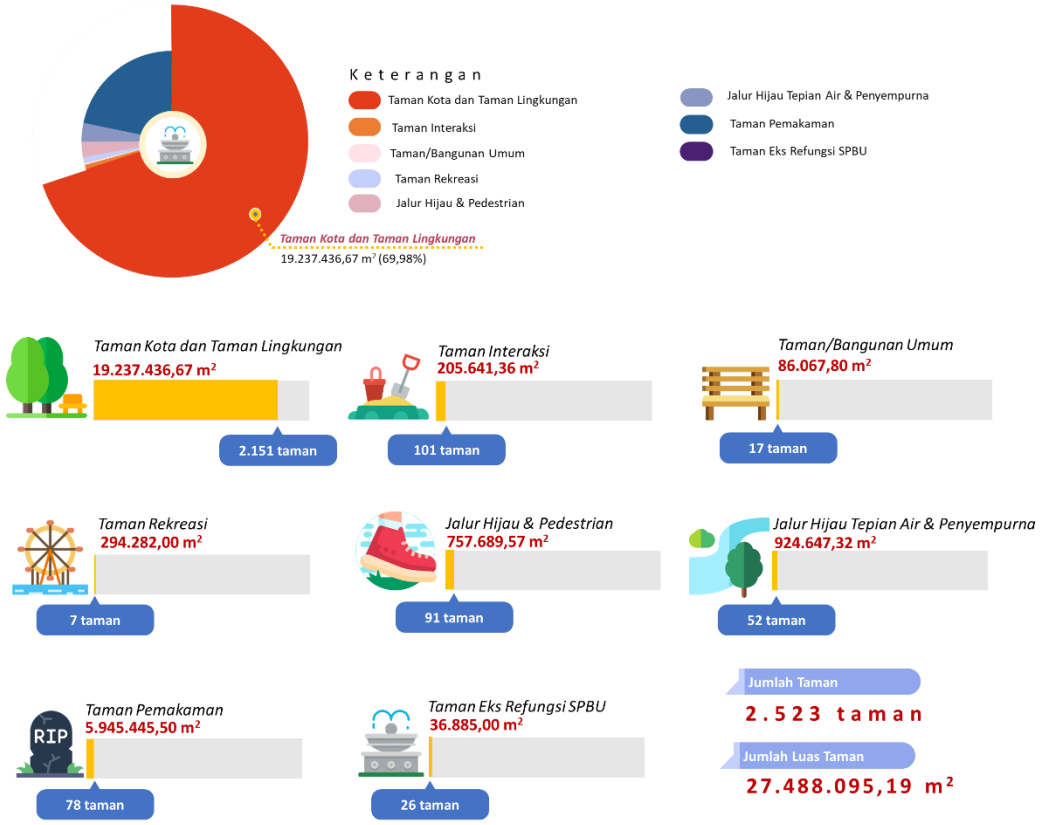

Gambar 2.31 Jumlah dan luas area taman di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014

2.1.9. Keuangan Daerah

Pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 memiliki anggaran sebesar Rp62.517.744.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.823.887.360.000,00. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Sebagian besar pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari pendapatan asli daerah yang berjumlah Rp 43.901.488.800.000,00.

Pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk berbagai kebutuhan menunjang perkonomian di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai Rp51.066.081.370.000,00. Realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling besar digunakan untuk kebutuhan belanja operasional hingga mencapai Rp39.660.198.430.000,00.

Gambar 2.32. Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan (juta rupiah) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017

Tabel 2.29. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Juta Rupiah) di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017

		Jenis	Anggaran	Realisasi
		(1)	(2)	(3)
I		**Pendapatan**	**62.517.744,02**	**64.823.887,36**
	1	Pendapatan Asli Daerah	41.687.387,82	43.901.488,80
	2	Dana Perimbangan	18.696.340,60	18.969.291,39
	3	Pendapatan Lain-lain	2.134.015,60	1.953.107,17
II		**Belanja**	**61.821.922,99**	**51.066.081,37**
	1	Belanja Operasional	46.006.855,07	39.660.198,43
	2	Belanja Modal	15.410.230,84	11.045.723,23
	3	Belanja Tidak Terduga	40.114,31	16.038,57
	4	Transfer	364.722,77	344.121,14

		Jenis	Anggaran	Realisasi
		(1)	(2)	(3)
III		**Pembiayaan**	**(695.821,02)**	**(591.823,86)**
	1	Penerimaan Pembiayaan	9.305.831,34	8.711.817,36
	2	Pengeluaran Pembiayaan	10.001.652,36	9.303.641,22
IV		**Lain-lain/Pendapatan yang Sah**	**-**	**-**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.10. Ekoregion DKI Jakarta

Berdasarkan SK Menteri LHK Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, wilayah ekoregion laut di Provinsi DKI Jakarta termasuk ekoregion Laut Jawa (E.L.6) dan wilayah ekoregion di pulau dan daratan di Provinsi DKI Jakarta termasuk Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilegon-Indramayu-Pekalongan (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara), Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Serang-Tangerang-Depok (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur), dan Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral Jawa (Jakarta Utara dan Kep. Seribu).

Di dalam buku Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia (KLH, 2013) wilayah perairan laut Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Provinsi DKI) tersebut berada di dalam Ekoregion Laut Jawa dengan kode EL 6. Wilayah ini merupakan bagian kecil saja dari EL 6, sehingga perlu dilakukan penetapan sub-ekoregion dari EL 6 atau ekoregion level 2. Hasil analisis memperlihatkan bahwa wilayah laut Provinsi DKI terletak di sub-ekoregion level 3. Wilayah laut DKI masuk dalam EL 6.2 dan EL 6.3, selanjutnya dideliniasi ke dalam ekoregion level 3. EL 6.3 dibagi ke dalam 4 (empat) ekoregion level 3, yaitu EL 6.3.1 dengan delineator utama batimetri dan kualitas air; EL 6.3.2 dengan delineator utama batimetri; EL 6.3.3 dengan delineator utama batimetri; dan EL 6.3.4 dengan delineator utama batimetri dan keanekaragaman hayati. Untuk EL 6.2, ekoregion level 3 wilayah administrasi DKI Jakarta masuk dalam EL 6.2.2.

Ekoregion Darat

Kajian penetapan Ekoregion Darat Provinsi DKI Jakarta menghasilkan 40 (empat puluh) poligon ekoregion. Namun demikian, secara garis besar ke 40 ekoregion tersebut dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik geomorfologisnya menjadi 6 (enam) tipe ekoregion, yaitu:

1. Dataran pasang surut berlumpur, merupakan dataran yang terbentang sepanjang garis pantai dan luas dataran pasang surut berlumpur Provinsi DKI Jakarta mencapai 62,84 km^2 atau sekitar 9,5% dari total wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. Dataran Beting-gisik dan Lembah Antar Gisik, merupakan dataran yang memanjang sejajar garis pantai dan luas dataran beting gisik dan lembah antar gisik Provinsi DKI Jakarta seluas 50,88 km^2 atau seluas 7,7% dari total wilayah.
3. Dataran Rawa, merupakan dataran yang terletak di sekitar alur sungai dan luas dataran rawa Provinsi DKI Jakarta mencapai 16,76 km^2 atau sekitar 2,5% dari total wilayah.
4. Dataran Fluvio-marin, merupakan dataran yang terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin, seperti delta sungai atau dataran estuaria lain dimana terbentuknya dipengaruhi oleh dua jenis proses geomorfik, yaitu aliran sungai dan arus/gelombang laut. Lokasi dari dataran ini biasanya sedikit agak jauh dari garis pantai atau berada di belakang dataran pasang-surut berlumpur. Luas dataran fluvio–marin Provinsi DKI Jakarta mencapai 189,48 km^2 atau sekitar 28,6% dari total wilayah.
5. Dataran Fluvio-vulkanik, merupakan suatu dataran yang terbentuk oleh proses deposisi fluvial (aliran air sungai) dengan material dominan dari bahan vulkanik (seperti: abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batu vulkanik). Luas dataran fluvio–vulkanik di Provinsi DKI Jakarta mencapai 298,25 km^2 atau sekitar 45.03% dari total wilayah.

Ekoregion Laut

Kondisi perairan laut di Provinsi DKI Jakarta dengan luas 4.933 km^2 tergolong cukup beragam. Perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta menyimpan sumberdaya yang berlimpah. Keanekaragaman ikan dan keberadaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Sementara itu, aktivitas manusia seperti limbah dari daratan, keberadaan pelabuhan, dan jalur pelayaran mempengaruhi kondisi perairan Provinsi DKI Jakarta.

Gugusan Kepulauan Seribu memanjang ke arah barat laut sepanjang 80 km dan 30 km ke arah tenggara dari barat ke timur. Meskipun dikenal dengan sebutan Kepulauan Seribu, akan tetapi jumlah tepat pulaunya 105 gugus pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan dan dikenal dengan sebutan Pulau Seribu (UNESCO, 2000). Besaran luasan pulau rata-rata memiliki 10 ha dan berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Secara administrasi wilayah Kepulauan Seribu masuk dalam kewenangan dan aturan regional Provinsi DKI Jakarta. Kepulaun Seribu dijadikan berbagai lokasi kunjungan dan aktivitas, diantaranya: wisata, galian pasir untuk bangunan infrastruktur masyarakat dan rumah masyarakat, pertambangan minyak bumi lepas pantai, transportasi laut dan perikanan tangkap serta budidaya.

Kondisi ekosistem beberapa dekade akhir ini mengalami degradasi akibat berkembangnya Jakarta sebagai kota metropolitan. Reklamasi pantai yang digunakan untuk pembangunan kawasan industri, pemukiman dan pusat aktivitas

masyarakat menyebabkan berubahnya fungsi lahan dan konversi lahan, dalam hal ini kawasan perairan Kepulauan Seribu menjadi daerah penyangga.

Secara umum, keadaan angin di Kepulauan Seribu sangat dipengaruhi oleh angin monsun (*monsoon*) yang secara garis besar dapat dibagi menjadi monsun Barat (Desember–Maret) dan monsun Timur (Juni–September). Musim peralihan atau pancaroba terjadi antara bulan April–Mei dan Oktober–November. Pada monsun Barat sering terjadi hembusan angin kuat yang kecepatannya lebih dari 20 knot, bahkan bisa sampai 26 knot walaupun durasinya pendek. Disamping angin monsun tersebut juga terdapat pengaruh pemanasan dan pendinginan daratan di sebelah selatan (Pulau Jawa) yang secara harian menimbulkan angin laut dan angin darat. Kecepatan angin bervariasi antara 10–15 knot yang umumnya berlangsung dari jam 12.00 sampai 19.00. Angin laut terkuat berhembus sekitar jam 16.00, dimana angin ini sangat aktif pada musim kemarau dan pengaruhnya bisa mencapai sampai 50 mil dari pantai. Suhu udara maksimum mencapai 32 ^{o}C dan suhu minimum 21 ^{o}C, sementara suhu rata-rata mencapai 27 ^{o}C. Kelembaban udara rata-rata 80%. Sementara, struktur geologi dasar laut di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu, dapat tercermin dari peta batimetri yang menggambarkan topografi dasar laut di kawasan ini. Sangat jelas terlihat bahwa dasar laut di kawasan ini pada dasarnya landai, tetapi di sekitar pulau-pulau karang kelerengannya makin curam. Sekitar Pulau Pari terdapat alur memanjang yang dalam sampai sekitar 90 m.

Dasar laut di perairan DKI Jakarta sebagian besar wilayahnya memiliki kelerengan dasar laut antara 0,060-0,170 derajat, sebagian lagi memiliki kelerengan antara 0–0,06^{o} serta sebagian kecil wilayahnya mempunyai kelerengan dasar laut berkisar antara 0,170-0,35^{o}. Keseluruhan lereng dasar laut di ekoregion ini termasuk pada kategori kelas lereng datar-agak miring (0-1°) (Sulistyo danTriyono, 2009). Adapun sedimen dasar di kawasan Ekoregion Laut Provinsi DKI ini terutama terdiri dari komponen pasir dan lanau (31,07%) dan lumpur (68,93%). Lanau adalah material granular dengan ukuran butir antara pasir dan lempung dengan mineral dominan berupa kuarsa dan felspar. Lanau dapat berupa tanah atau campuran sedimen yang terendapkan pada badan air.

Tipe pasang surut (pasut) di Kepulauan Seribu secara umum dipengaruhi oleh karakteristik pasut Laut Jawa berupa tipe campuran cenderung harian tunggal, dengan periode pasut selama 24 jam 50 menit. Ketinggian maksimum elevasi pasang surut tahunan dapat mencapai sekitar 0,6 m di atas duduk tengah (*mean sea level*, MSL), dan minimum berkisar 0,5 m di bawah duduk tengah. Kondisi rerata tunggang air pada saat Pasang Perbani (masa pertengahan bulan) sekitar 0,9 m, sedangkan pada saat Pasang Mati (masa seperempat bulan akhir) adalah sekitar 0,2 m.

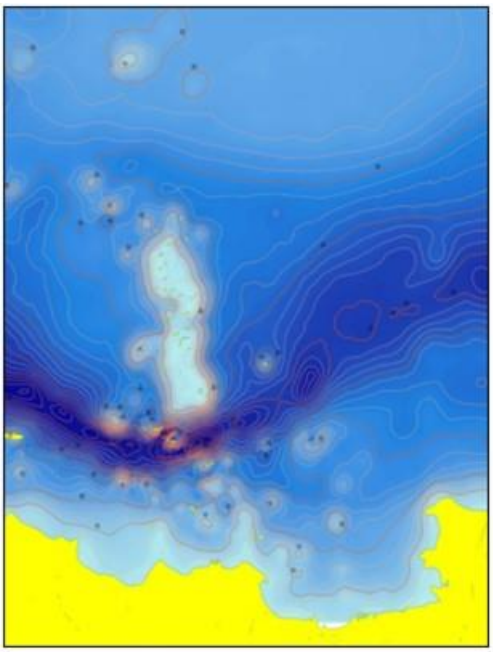

Gambar 2.33. Peta Bathimetri Teluk Jakarta

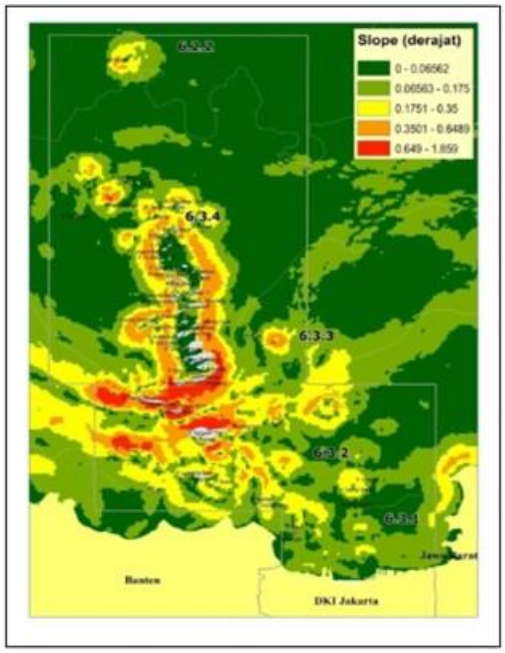

Gambar 2.34. Kelerengan Dasar Laut Ekorigon DKI Jakarta

Arah dan kekuatan arus di perairan DKI Jakarta dipengaruhi oleh angin Monsun. Pada Monsun Barat (Desember-Februari) pergerakan arus sebagian besar bergerak dari arah barat ke arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 0,05 – 0,1 m/detik. Memasuki Monsun Peralihan I (Maret-Mei) terjadi proses perubahan arah pergerakan arus yang semula menuju ke Timur menjadi menuju ke Barat dengan kecepatan yang lebih rendah, yaitu: berkisar antara 0,01–0,08 m/detik. Pergerakan arus menuju ke arah barat terus berlangsung hingga memasuki Monsun Timur (Juni-Agustus) dengan kecepatan yang semakin meningkat yakni berkisar antara 0,01–0,1 m/detik. Pada Monsun Peralihan II (September-November) pergerakan arus di ekoregion ini memiliki arah yang tidak beraturan dengan kecepatan arus yang cukup rendah, yakni: 0,01–0,05 m/detik.

Adapun variasi komponen fisik direntangan rerata klimatologi dari massa air laut pada lapisan permukaan di perairan ini memiliki nilai berkisar antara 29–29,75 ^{o}C (Boyer *et al*., 2009). Suhu rerata ini memiliki nilai yang lebih hangat dibandingkan dengan nilai suhu yang diukur oleh Senoaji tahun 2009 yang menunjukkan bahwa suhu perairan di sekitar Teluk Jakarta memiliki kisaran antara 27,65–28,75 ^{o}C (Wiryawan & Djohar, 2014).

Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu mempunyai keanekaragaman hayati (kehati) yang cukup tinggi. Ekosistem perairan tropis yang penting terdapat di kawasan ini seperti ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Tiap ekosistem ini dihuni oleh beragam spesies. Dari berbagai sumber (Estradivarai *et al*. 2009, Setiawan *et al*. 2009) dapat disarikan bahwa di Teluk

Jakarta dan Kepulauan Seribu terdapat karang keras (*hard corals*) sebanyak 193 spesies, ikan karang 233 spesies, *echinodermata* 46 spesies; lamun 8 spesies. Beberapa spesies termasuk telah dilindungi seperti penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan penyu hijau (*Chelonia mydas*).

2.2 Potensi dan Kondisi Keanekaragaman Hayati

DKI Jakarta memiliki wilayah eko-region darat dan eko-region laut. Wilayah laut DKI Jakarta termasuk kedalam ekoregion Laut Jawa, sementara wilayah daratan pulau dan daratan termasuk Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilegon-Indramayu-Pekalongan (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara), dan Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Serang-Tangerang-Depok (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur), serta Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral Jawa (Jakarta Utara dan Kep. Seribu).

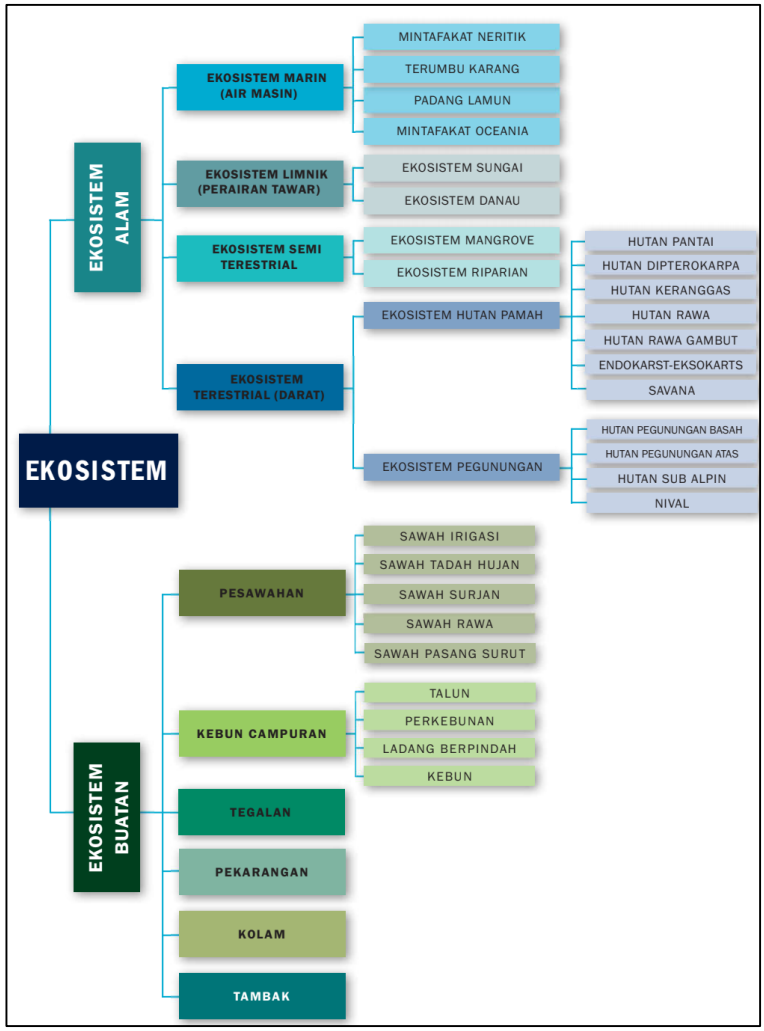

Gambar 2.35. Klasifikasi dan Tipe Ekosistem di Indonesia (IBSAP 2015-2020)

Wilayah ekoregion adalah batas darat dan perairan dimana batas tersebut ditentukan oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan. Wilayah ekoregion berkaitan dengan integritas komunitas biologi wilayah tersebut, habitat dan ekosistem untuk menyokong proses-proses ekologis yang penting seperti siklus nutrien dan limbah, migrasi dan aliran arus. Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara alami potensi keanekaragaman hayati di DKI Jakarta akan cukup besar. Namun demikian, perubahan lingkungan alami yang tinggi akibat kemajuan lingkungan perkotaan diduga telah mengakibatkan banyaknya perubahan kondisi keanekaragaman hayati di DKI Jakarta.

2.2.1. Keanekaragaman Ekosistem DKI Jakarta

Dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 mengelompokkan tipe-tipe ekosistem di Indonesia menjadi 2 berdasarkan cara terbentuknya, yaitu: ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbagi menjadi lima kelompok, yaitu 1). ekosistem marin (air asin), 2). ekosistem limnik (perairan tawar), terdiri dari ekosistem sungai dan danau, 3). ekosistem semi terestrial, terdiri dari ekosistem mangrove dan ekosistem riparian, 4). ekosistem terestrial (darat), terdiri dari ekosistem hutan pamah (hutan pantai, hutan dipterocarpa, hutan kerangas, hutan rawa, hutan rawa gambut, endokarst-eksokarst, dan savana) dan ekosistem pegunungan (hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan atas, hutan sub alpin, dan nival/salju). Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari persawahan, kebun campuran, tegalan, pekarangan, kolam, dan tambak (Gambar 2.35).

Provinsi DKI Jakarta memiliki hampir seluruh tipe ekosistem yang terdaftar dalam IBSAP, kecuali ekosistem hutan pamah (hutan pantai, hutan dipterocarpa, hutan kerangas, hutan rawa, hutan rawa gambut, endokarst-eksokarst, dan savana) dan ekosistem pegunungan (hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan atas, hutan sub alpin, dan nival/salju). Keanekaragaman tipe ekosistem di DKI Jakarta disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.36. Keanekaragaman ekosistem di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan keanekaragaman Ekosistem yang ada ditetapkan ekosistem di DKI Jakarta yang bernilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan ekosistem yang bernilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati, adalah: *keunikan/kekhasan ekosistem dan penyusunnya, potensi pemanfaatan secara berkelanjutan, tingkat*

keanekaragaman spesies, keterwakilan/representativeness (ekosistem alam yang tersisa tetapi kondisinya relatif masih baik). Berdasarkan kriteria tersebut atas dan masukan berbagai pihak ditetapkan ekosistem di DKI Jakarta yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.2.1.1. Ekosistem Perairan Laut Dangkal Kepulauan Seribu

Ekosistem perairan laut atau *marine ecosystem* adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai organisme yang berfungsi bersama-sama di suatu kumpulan massa air asin pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis maupun statis, sehingga memungkinkan terjadinya aliran energi dan siklus materi di antara komponen biotik dan abiotik (IBSAP, 2015-2020). Komponen biotik terdiri dari beragam jenis tumbuhan dan hewan air asin, serta komponen abiotik berupa lingkungan laut.

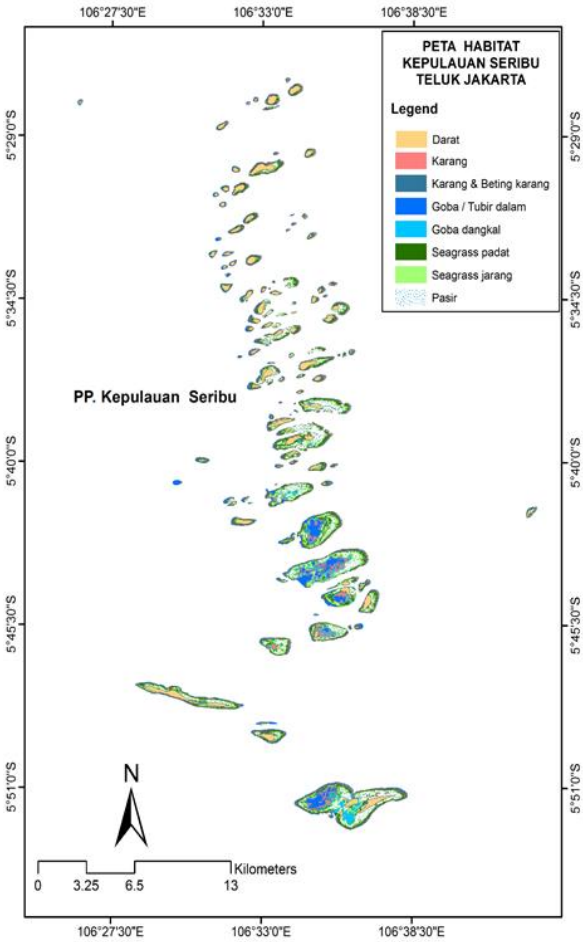

Gambar 2.37. Peta sebaran ekosistem terumbu karang dan padang lamun

DKI Jakarta memiliki beberapa tipe ekosistem perairan laut dangkal yaitu ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang tersebar di wilayah Kepulauan Pulau Seribu. Ekosistem tersebut sebagian besar menjadi bagian dari Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) yang terletak kurang lebih 45 km dari Ibukota Provinsi DKI Jakarta dengan koordinat 5°23' - 5°40' LS, 106°25' - 106°37' BT sebelah Utara Jakarta. Secara administratif kawasan TNKpS berada dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri dari wilayah perairan laut seluas 107.489.ha (22,65% dari luas perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) dan 2 pulau (Pulau Penjaliran Barat

Gambar 2.38. Ikan karang dan terumbu karang

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, terdiri dari gugus kepulauan dengan 78 pulau sangat kecil, 86 gosong pulau dan hamparan laut dangkal dengan kedalaman sekitar 20-40 m. Luas pasir karang pulau sekitar 2.136 hektar (*reef flat* 1.994 ha, laguna 119 ha, selat 18 ha dan teluk 5 ha), kondisi terumbu karang tipe *fringing reef* dan lamun bermedia tumbuh sangat miskin hara/lumpur. Jumlah jenis karang keras (*hardcoral*) yang ditemukan di perairan TNKpS sebanyak 62 marga dengan kelimpahan 46.015 individu/ha (pada tahun 2005) dan 61 marga dengan kelimpahan 35.878 individu/ha. Berdasarkan hasil monitoring karang oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia, pada 40 pulau di Kepulauan Seribu, ditemukan sekurang-kurannya 62 Genus karang serta 29 Karang lunak dengan tutupan karang cenderung stabil dari tahun ke tahun, yaitu: 30%. Sementara itu, keanekaragaman jenis ikan karang pada tahun 2009 sebanyak 168 jenis yang termasuk ke dalam 81 genus dan 31 famili dengan kelimpahan ikan karang di perairan kawasan TNKpS di perairan Zona Inti sebesar 29.382 individu ikan/ha, perairan Zona Pemanfaatan Wisata sebesar 49.600 individu ikan/ha, dan perairan Zona Permukiman sebesar 32.280 individu ikan/ha (Publikasi Tahun 2007). Disamping itu, Kawasan TNKpS merupakan habitat bagi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) yang dilindungi, dan keberadaannya cenderung semakin langka.

Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Burung (Kawasan Kepulauan Seribu) merupakan habitat yang sesuai untuk mendukung tumbuh dan kembangnya komunitas lamun. Jenis lamun di ketiga lokasi tersebut, yaitu: *Cymodocea rotundata*, *Enhalus acoroides*, dan *Thalassia hemprichii*; kecuali untuk perairan Pulau Pari yang perairannya cenderung lebih dangkal didominasi oleh *Enhalus acoroides* yang membentuk komunitas tunggal di perairan pulau tersebut. Jenis lamun ini juga mendominasi padang lamun di lokasi lainnya. Sementara itu, Rahmawati (LIPI) melaporkan di Pulau Pari, kepulauan Seribu ditemukan 7 jenis lamun (Gambar 2.39).

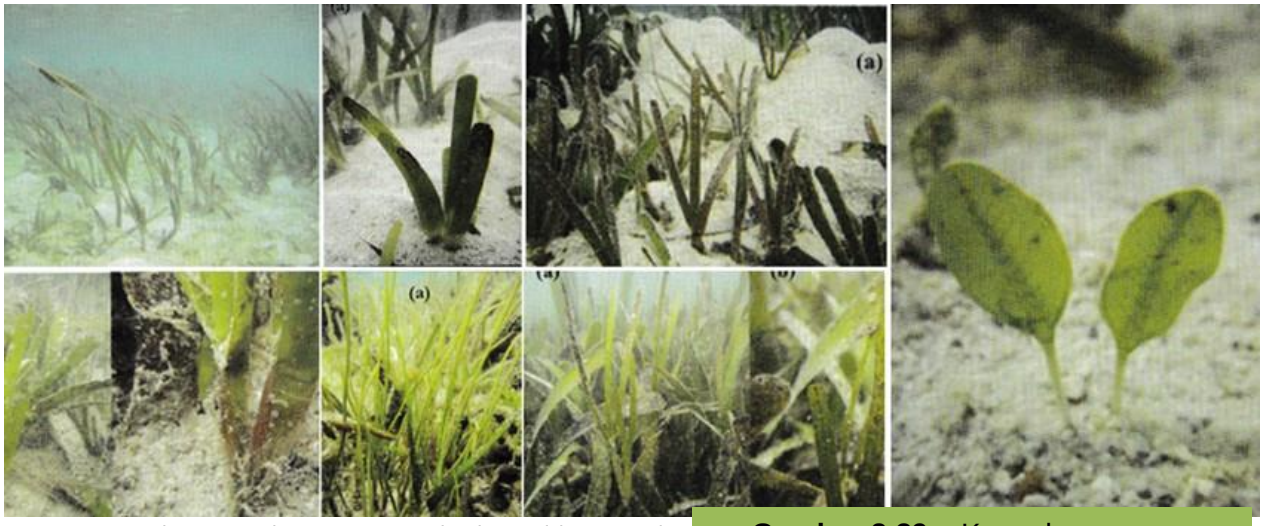

Sumber : Keanekaragaman Hayati Pulau Pari (LIPI, 2017)

Gambar 2.39. Keanekaragaman spesies lamun di Pulau Pari

2.2.1.2. Ekosistem Lahan Basah Pulau Rambut

Pulau Rambut merupakan salah satu dari tujuh ekosistem lahan basah yang ditetapkan sebagai *Ramsar Site* untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia. Penetapan *Ramsar Site* merupakan bentuk dari Konvensi Ramsar (*The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat*), yaitu perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Pulau Rambut berada di Kel. Untung Jawa Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Kepulauan Seribu, dan secara geografis terletak pada 106,5^0 41'30"BT dan 5,5^0 58'30" LS. Pulau Rambut ditetapkan sebagai Cagar Alam melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 7 tanggal 3 Mei 1937 dengan luas sebesar 20 Ha.

Gambar 2.40. Pulau Rambut

Selanjutnya, pada tahun 1999 terjadi perubahan status dari Cagar Alam menjadi Suaka Margasatwa yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 275/KPTS-II/1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang perubahan status Cagar Alam Pulau Rambut menjadi Suaka Margasatwa Pulau Rambut dengan luas 90 Ha yang terdiri dari 45 Ha daratan dan 45 Ha perairan.

Suaka Margasatwa Pulau Rambut merupakan kawasan suaka alam dengan ciri khas sebagai habitat Mangrove dan habitat burung khususnya jenis-jenis burung merandai dan beberapa burung migran. Pulau Rambut yang dulunya disebut *Midburt Eiland* ini merupakan pulau yang tidak dihuni oleh manusia, yang membuat burung-burung dari mancanegara sangat senang menjadikan pulau ini sebagai “klinik bersalin” karena merupakan habitat berbagai jenis burung termasuk jenis burung migran. Kelimpahan populasi burung air Suaka Margasatwa Pulau Rambut berjumlah 18.257 ekor, dengan komposisi 41,42% kowak malam abu, 35,77% pecuk padi hitam, 15,68% kuntul, 4,41% cangak,1,62% pecuk ular Asia, dan 1,10% jenis burung lainnya. Jenis burung yang dijumpai pada saat itu sebanyak 21 jenis burung air dan 23 jenis burung terestrial. Dari 44 jenis yang ditemukan, 16 jenis diantaranya merupakan jenis burung yang dilindungi Undang-undang. Pada musim-musim tertentu Suaka Margasatwa Pulau Rambut juga didatangi oleh beberapa burung migran. Jumlah di atas juga bukan merupakan angka mati karena dari waktu ke waktu jumlah tersebut dapat berubah (fluktuatif) sesuai dengan kondisi lingkungan. Jenis-jenis burung yang dapat dijumpai di Suaka Margasatwa Pulau Rambut secara lengkap seperti pada Tabel 2.30 (Laporan BKSDA Tahun 2015).

Tabel 2.30. Jenis Burung yang Dijumpai di Suaka Margasatwa Pulau Rambut

NO	NAMA JENIS		STATUS KONSERVASI		
	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	PP	CITES	IUCN
1	Belibis kembang	*Dendrocygna arcuata*			LC
2	Pecuk ular	*Anhinga melanogaster*	√		NT
3	Kowak maling	*Nycticorax nycticorax*			LC
4	Cangak abu	*Ardea cinerea*			LC
5	Cangak merah	*Ardea purpurea*			LC
6	Kuntul kecil	*Egretta garzetta*	√		LC
7	Kuntul karang	*Egretta sacra*			LC
8	Kuntul besar	*Egretta alba*	√		LC
9	Kuntul perak	*Egretta intermedia*			IC
10	Kuntul kerbau	*Bubulcus ibis*			LC
11	Bluwok	*Mycteria cinerea*	√	I	EN
12	Kokokan laut	*Butorides striatus*			LC
13	Cikalang besar	*Fregata minor*			LC
14	Pecuk padi kecil	*Microcarbo niger*			LC
15	Pecuk padi hitam	*Phalacrocorax sulcirostris*			LC
16	Gajahan penggala	*Numenius phaeopus*			LC
17	Trinil pantai	*Actitis hypoleucos*			LC
18	Kedidi ekor tambal putih	*Philomachus pugnax*			LC
19	Ibis Roko-roko	*Plegadis falcinellus*			LC
20	Pelatuk besi	*Threskiornis melanocephalus*		II	LC
21	Elang laut perut putih	*Haliaeetus leucogaster*	√		LC
22	Raja udang biru	*Alcedo caerulescens*	√		LC
23	Raja udang Meninting	*Alcedo meninting*			LC
24	Cekakak Sungai	*Halcyon chloris*	√		LC
25	Cekakak suci	*Halcyon sancta*			LC
26	Walet Linchi	*Collocalia linchi*			LC
27	Kekep babi	*Artamus leucorhynchus*			LC
28	Pergam laut	*Ducula bicolor*			LC
29	Tekukur biasa	*Streptopelia chinensis*			LC
30	Tuwur Asia	*Eudynamys scolopacea*			LC
31	Bubut alang-alang	*Centropus bengalensis*			LC
32	Srigunting gagak	*Dicrurus annectans*			LC
33	Srigunting hitam	*Dicrurus macrocercus*			LC
34	Sikantan Bakau	*Cyornis rufigastra*			LC
35	Burung Madu Kelapa	*Anthreptes malacensis*			LC
36	Burung Madu Sriganti	*Nectarinia jugularis*			LC
37	Kepudang kuduk hitam	*Oriolus chinensis*			LC
38	Caladi ulam	*Dendrocopus macei*			LC
39	Bondol peking	*Lonchura punctulata*			LC
40	Jalak kerbau	*Acridotheres javanicus*			LC
41	Remetuk Laut	*Gerygone sulphurea*			LC
42	Kucica kampung	*Copsychus saularis*			LC
43	Trinil Pantai	*Tringa hypoleucos*			LC
44	Kedidi Golgol	*Calidris ferruginea*			NT

NO	NAMA JENIS		STATUS KONSERVASI		
	NAMA DAERAH	NAMA LATIN	PP	CITES	IUCN
45	Dara laut tiram	*Sterna nilotica*			LC
46	Dara laut jambul	*Sterna bergii*			LC
47	Layang-layang asia	*Hirundo rustica*			LC
48	Kicuit Kerbau	*Motacilla flava*			LC
49	Cikrak kutub	*Phylloscopus borealis*			LC
50	Cerek jawa	*Charadrius javanicus*			NT
51	Cikrak mahkota	*Phylloscopus coronatus*			LC
52	Sikatan sisi gelap	*Muscicapa sibirica*			LC

Sumber: BKSDA Provinsi DKI Jakarta, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) *Species,* status *Appendices I* (*most endangered*), *II* (*not necessarily threatened*), *atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*) *Red List of Threatened Species*, status VU (*Vulnerable*), EN (*Endangered*), NT (*Near Threatened*), atau LC (*Least Concern*)

Sumber Foto : https://www.biodiversitywarriors.org

Gambar 2.41. Populasi Burung di SM Pulau Rambut

Sedangkan, jenis reptil yang dapat dijumpai di Suaka Margasatwa Pulau Rambut antara lain biawak (*Varanus salvator*), sanca batik (*Phyton reticulatus*), Ular cincin mas (*Boiga dendrophyla*) , Tokek (*Gecko gecko*), Cicak (*Hemidactylus* sp.). Jumlah kelimpahan jenis reptil hingga saat ini belum dapat diketahui. Jenis mamalia yang terdapat di Suaka Margasatwa Pulau Rambut adalah kalong (*Pteropus vampyrus*). Katak dan kodok merupakan jenis Amphibi penghuni Suaka Margasatwa Pulau Rambut, namun data dan informasi mengenai jenis Amphibi ini belum tersedia secara lengkap.

Suaka Margasatwa Pulau Rambut terdiri dari tiga tipe ekosistem hutan, yaitu: hutan pantai, hutan sekunder campuran dan hutan mangrove. Sekurang-kurangnya ditemukan 159 spesies flora dengan 31 spesies merupakan tumbuhan eksotik. Vegetasi yang terdapat di tipe hutan pantai, adalah: Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), Kepuh (*Sterculia foetida*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Waru laut (*Thespesia populnea*) dan Centigi (*Pemphis acidula*). Tipe hutan sekunder campuran ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi diantaranya adalah Kepuh (*Sterculia foetida*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Kayu Hitam (*Diospyros maritima*), Mengkudu (*Morinda citrifolia*), Soka (*Ixora timorensis*), dan Ketapang (*Terminalia catappa*). Sedangkan, vegetasi yang terdapat pada tipe hutan Mangrove, seperti Pasir-pasir (*Ceriops tagal*), Bakau (*Rhizophora mucronata*) dan Bola-bola (*Xylocarpus granatum*).

2.2.1.3. Ekosistem Semiterestrial

Ekosistem Semiterestrial terbentang di daerah limnik (air tawar) dan marin (air asin). Daerah ekoton ini mempunyai fungsi dan peran yang penting sehingga sering dimasukkan sebagai ekosistem esensial. Ekosistem semiterestrial terdiri dari: (1). Ekosistem Mangrove; dan (2). Ekosistem Riparian. Ekosistem limnik yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati adalah:

Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komunitas ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapat aliran air, terlindung dari gelombang besar dan air pasang surut yang keras.

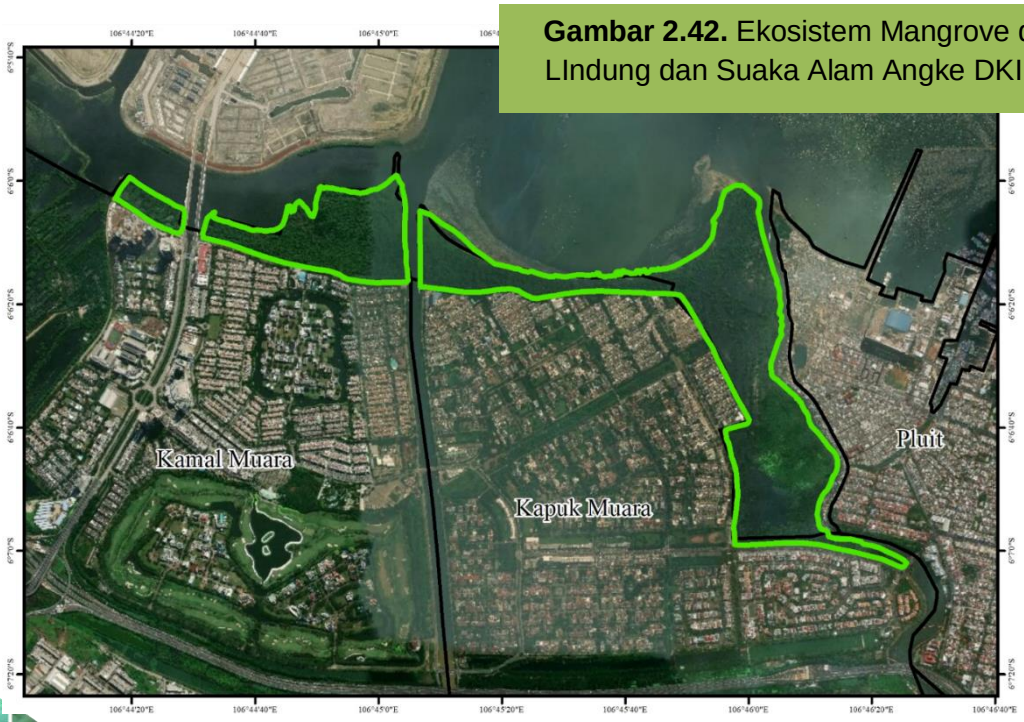

Gambar 2.42. Ekosistem Mangrove di Hutan LIndung dan Suaka Alam Angke DKI Jakarta

Mangrove tidak mampu tumbuh di pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat karena hal ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dan pasir, substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya (Nontji,1993). Sebagai suatu ekosistem yang khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting. Pengaruh yang menguntungkan dari hutan mangrove terhadap ekologi laut sebagai dasar dari rantai makanan yang kompleks, tempat memijah, tempat asuh bagi larva berbagai biota, menyaring polusi, menjaga kestabilan dari substrat mangrove dan menjaga pantai dari erosi (Riley, 2001). Selain berfungsi sebagai penyaring bahan nutrien dan penghasil bahan organik, mangrove juga berfungsi sebagai daerah penyangga antara daratan dan lautan dan penstabil bagi habitat satwa liar serta sebagai sumber produk perikanan dan sumber fotosintesis yang besar. Perairan mangrove merupakan daerah asuhan berbagai jenis ikan dan udang. Bagi manusia, manfaat langsung yang dapat dirasakan sebagai penghasil kayu, bahan obat-obatan, dan hasil-hasil hutan lainnya.

Kondisi ekosistem mangrove di DKI Jakarta hanya menyisakan sedikit hutan mangrove primer dan sebagian besar merupakan hutan mangrove sekunder hasil kegiatan rehabilitasi. Sebaran ekosistem mangrove di DKI Jakarta terdapat di dalam kawasan hutan sebagai berikut:

1. Ekosistem Mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk.
2. Ekosistem Mangrove di Hutan Produksi dan Lindung Angke Kapuk.
3. Ekositem Mangrove di Suaka Margasatwa Muara Angke.
4. Ekosistem Mangrove di Wilayah Kepulauan Seribu.
   Ekosistem ini terbentuk di Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Cagar Alam Pulau Bokor, serta pulau lainnya seperti Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Lancang Besar, Pulau Peteloran Barat, Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran Timur.

KEANEKARAGAMAN SPECIES & PERKEMBANGAN TUTUPAN MANGROVE DI DKI JAKARTA

Ekosistem mangrove dijumpai di Kawasan Hutan di Wilayah Teluk Jakarta dan beberapa Kawasan Konservasi di Kepulauan Seribu. Di wilayah Teluk Jakarta, ekosistem mangrove sekurang-kurangnya disusun oleh 15 spesies mangrove, 8 spesies merupakan jenis asli setempat dan sisanya merupakan spesies yang ditanam yang berasal dari kawasan lain. Jenis-jenis mangrove asli kawasan terbagi atas dua grup, yakni: (i). mangrove sejati yang terdiri atas 7 spesies, yaitu *Avicennia officinalis*, *Rhizophora apiculata*, *R. Mucronata*, *R. Stylosa*, *Sonneratia caseolaris* yang merupakan komponen mayor/utama, *Excoecaria agalloca* dan *Xylocarpus moluccensis* yang merupakan komponen minor/tambahan, dan (ii). sisanya sebagai asosiasi mangrove, yaitu *Terminalia catappa*. Sedangkan 7 jenis pohon mangrove yang merupakan jenis introduksi terdiri atas *Bruguiera gymnorrhiza,* dan 6 jenis asosiasi mangrove, yakni *Callophyllum inophyllum*, *Cerbera manghas*, *Paraserianthes falcataria*, *Tamarindus indica*, *Acacia mangium*, dan *A. Auriculiformis*. Jenis mangrove yang dijumpai di Cagar Alam Pulau Bokor terdiri dari *Soneratia alba* dan *Rhizophora mucronata*.

Berdasarkan data SLHD (2015), luas dan kerapatan tutupan mangrove di DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebanyak 376,02 Ha. Hutan Lindung Angke Kapuk persentase tutupannya pada Tahun 2015 adalah 75,00 persen meningkat dari 2010 sebesar 70,00 persen, Kawasan Taman Suaka Margasatwa Muara Angke pada Tahun 2015 persentase tutupannya sebesar 68,00 persen meningkat dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar 65,00 persen. Cagar Alam Pulau Bokor persentase tutupannya pada Tahun 2015 sebesar 83,00 persen apabila dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar 80,00 persen, Suaka Margasatwa Pulau Rambut persentase tutupannya pada Tahun 2015 sebesar 78,00 persen apabila dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar 75,00 persen.

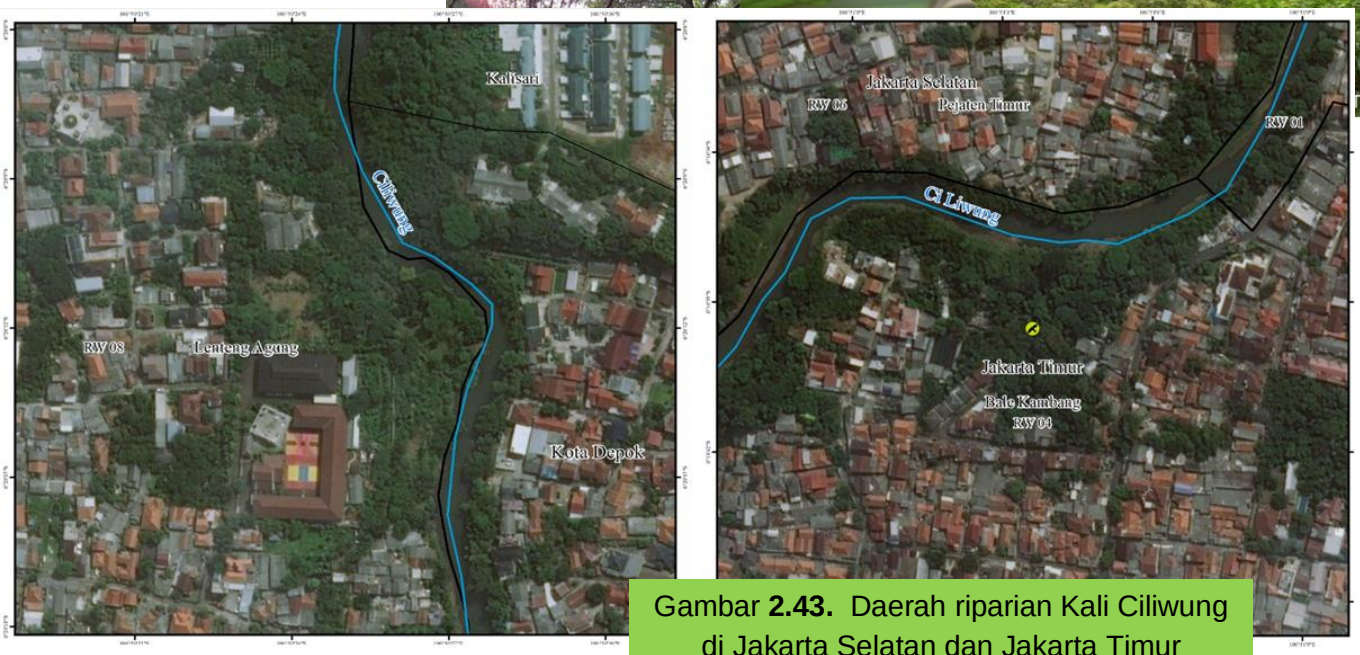

Gambar **2.43.** Daerah riparian Kali Ciliwung di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Ekosistem Riparian

Ekosistem riparian adalah ekosistem yang terbentuk di kanan kiri sungai. Ekosistem ini sangat penting karena mempunyai berbagai fungsi ekologis, diataranya: (a). sebagai habitat dan koridor flora fauna (Burger & Burger, 2005), fungsinya akan sangat terlihat pada saat musim kemarau; (b). mencegah aliran permukaan masuk ke dalam sungai sehingga mengurangi total *suspended solid* (TTS) yang masuk ke perairan. Karena peranannya tersebut ekosistem riparian seringkali menjadi kawasan ekosistem esensial di suatu daerah. DKI Jakarta memiliki 65 sungai dengan panjang aliran sungai 350 km, namun kondisi ekosistem riparian di DKI Jakarta sudah mengalami perubahan, hampir tidak menyisakan kondisi alamiahnya.

RIVARIAN EKOSISTEM LENTENG AGUNG

Kawasan Riparian ekosistem yang berada di kelurahan Lenteng Agung merupakan salah satu kawasan ekosistem riparian yang masih tersisa di DKI Jakarta. Masyarakat kelurahan Lenteng Agung yang tinggal berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung masih memanfaatkan sungai Ciliwung sebagai tempat memancing dan aktivitas lain.

Berdasarkan data dari Balai Penelitian Tanah (2006), di bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Lenteng Agung jenis tanahnya adalah Aluvial dan Kipas Aluvial, penyebarannya di daerah dataran Aluvial sungai. Namun di beberapa tempat ada juga jenis tanah Gleisol, tanah jenis ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal, topografi dataran rendah atau cekungan, hampir sering tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu sampai kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlumpur hingga basah, dan bersifat asam.

Jenis pohon yang dominan di sepanjang bantaran sungai adalah tanaman bambu, kelapa, belimbing, nangka, papaya, jambu biji dan tanaman hutan lainnya. Namun secara keseluruhan tanaman yang paling dominan di kawasan Lenteng Agung ini adalah tanaman bambu.

Gambar **2.44.** Fauna Ekosistem Riparian

Ekosistem riparian alamiah yang tersisa hanya di sebagin kecil bantaran Sungai Ciliwung terutama di wilayah perbatasan Kota Depok dan DKI Jakarta (Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung dan Tanjung Barat, serta di Wilayah Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur), di bagian hilir juga ditemukan beberapa lokasi bantaran sungai tanpa turap namun terokupasi oleh kepentingan lain. Ancaman terhadap ekosistem terutama akibat kegiatan manusia yang memanfaatkannya. Pemanfaatan tepian sungai di wilayah DKI Jakarta sangat massif misal penyerobotan bantaran sungai untuk lahan permukiman, pertanian, industri, transportasi dan penguatan tebing. Gangguan tersebut telah menghilangkan ekosistem riparian (Malanson,1995; Maryono,2005; Johnson et al.,1995). Jika vegetasi riparian telah hilang maka fungsi riparian itupun hilang. Petts (1996) menyebutkan hilangnya vegetasi riparian menjadi faktor utama penurunan dan kepunahan fauna akuatik. Oleh karena itu keberadaan ekosistem rivarian yang tersisa di DKI Jakarta menjadi hal yang penting.

Berdasarkan hasil survei di Wilayah Condet, Jakarta Timur menunjukkan bahwa ekosistem riparian memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Pada ekosistem tersebut dijumpai sejumlah flora dan satwa liar seperti ditemukan sekurang-kurangnya 17 spesies avifauna, satu spesies kelompok mamalia (Bajing Kelapa) dan herpetofauna (Cekiber), serta beberapa spesies serangga. Data keanekaragaman hayati pada ekosistem riparian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Keanekaragaman Jenis Flora Fauna pada Ekosistem Riparian

No.	Nama Indonesia	Nama Latin	PP	IUCN
Burung				
1	Kapinis rumah	*Apus nipalensis*		LC
2	Walet Linchi	*Collocalia linchi*		LC
3	Tekukur biasa	*Streptopelia chinensis*		LC
4	Raja udang meninting	*Alcedo meninting*	√	LC
5	Remetuk laut	*Gerygone sulphurea*		LC
6	Cipoh Kacat	*Aegithina tiphia*		LC
7	Sepah kecil	*Pericrocotus cinnamomeus*		LC
8	Cabai Jawa	*Dicaeum trochileum*		LC
9	Layang-layang batu	*Hirundo tahitica*		LC
10	Caladi Tilik	*Picoides moluccensis*		LC
11	Burung-madu kelapa	*Anthreptes malacensis*	√	LC
12	Burung-madu Sriganti	*Cinnyris jugularis*	√	LC
13	Burung-gereja Erasia	*Passer montanus*		LC
14	Cucak kutilang	*Pycnonotus aurigaster*		LC
15	Merbah cerukcuk	*Pycnonotus goiavier*		LC
16	Kipasan belang	*Rhipidura javanica*	√	LC
17	Cinenen Kelabu	*Orthotomus ruficeps*		LC
Mamalia				
1	Bajing Kelapa	*Callosciurus notatus*		LC
Hepertofauna				
1	Bunglon taman	*Calotes versicolor*		LC
2	Cekiber	*Draco volans*		LC
3	Cicak Tembok	*Hemidactylus frenatus*		LC
4	Kadal kebun	*Mabouya multifasciata*		LC
Capung				
1	Capung sambar jingga	*Brachitemis contaminata*		
2	-	*Crocothemis servilia*		
3	Sambar hijau	*Orthetrum sabina*		
4	-	*Orthetrum sp*		
5	Sambar perutpipih	*Potamarcha congener*		
Kupu-Kupu				
1		*Zizina otis*		
2		*Graphium agamemnon*		
3		*Appias olferna*		
4		*Delias hyparete*		
5		*Eurema hecabe*		
6		*Leptosia nina*		
Flora				
1	Salak	*Salacca zalacca*		
2	Pepaya	*Carica papaya*		
3	Bintaro	*Cerbera manghas*		
4	Melinjo	*Gnetum gnemon*		
5	Jati	*Tectona grandis*		
6	Kapuk	*Ceiba pentandra*		
7	Durian	*Durio zibethinus*		
8	Jambu air	*Syzygium aqueum*		
9	Bambu	*Bambusa sp.*		
10	Nangka	*Artocarpus heterophyllus*		

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

2.2.1.4. Ekosistem Limnik Setu Babakan

Ekosistem limnik merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai organisme yang berfungsi bersama-sama di suatu kumpulan massa air tawar pada suatu wilayah tertentu. Ekosistem limnik terbagi menjadi ekosistem sungai dan ekosistem danau/situ. Wilayah DKI Jakarta memiliki tipe ekosistem limnik karena memiliki 13 aliran sungai dan memiliki 74 waduk, danau atau situ. Namun ekosistem tersebut dalam kondisi yang rusak akibat pencemaran. Data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan kondisi kualitas air situ atau waduk di Jakarta pada 2011-2017 masuk kategori tercemar berat sampai 57,75 persen, tercemar sedang 19 persen, tercemar ringan 21,25 persen, dan kategori baik 2,5 persen.

Pencermaran akan merusak kondisi ekosistem limnik. Dampak pencemaran adalah berkurangnya keanekaragaman hayati penyusun ekosistem limnik. Disamping pencemaran ancaman terhadap keanekaragaman hayati biota ekosistem limnik adalah berkembangnya jenis-jenis biota perairan eksotik yang bersifat invasif baik yang sengaja dilepaskan atau terlepas tidak disengaja. Jenis-jenis eksotik tersebut akan tumbuh dan berkembang mengalahkan jenis-jenis asli setempat. Maryanto (2013) mengatakan, sekitar 90 persen ikan asli di pada ekosistem air tawar di Sungai Ciliwung sudah punah. Kelimpahan ikan didominasi oleh ikan-ikan invasif seperti ikan sapu-sapu (*Pterygoplichtys pardalis*) dan bawal (Colossoma macropopum). Ikan-ikan tersebut mengalahkan ikan betot (*Macrognathus maculatus*), senggal (*Hemibagrus cf. nemurus*), dan soro (Tor soro) yang merupakan ikan-ikan asli di Sungai Ciliwung.

Gambar 2.45. Peta Cagar Budaya Kampung Betawi Setu Babakan

Ekosistem limnik yang tersisa dan penting sebagai sumber keanekaragaman hayati di DKI Jakarta adalah Setu Babakan. Daerah Setu Babakan disamping merupakan ekosistem limnik dengan keanekaragaman flora dan fauna nya juga merupakan daerah cagar budaya Masyarakat Betawi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2000 yang menetapkan Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah sebagai Cagar Budaya. Luas keseluruhan

Kampung Betawi kurang lebih 289 Ha, Kawasan Perkampungan Budaya Betawi meliputi kawasan pemukiman, fasilitas, hutan kota, Setu Babakan, Setu Mangga Bolong dan mata air yang merupakan satu kesatuan yang dikelola secara terpadu. Keanekaragaman jenis tumbuhan dijumpai di areal pekarangan, kebun campuran maupun ruang terbuka hijau lainnya. Dalam hal ini, kawasan yang dijadikan Perkampungan Budaya Betawi ini lebih cenderung kearah lanskap Betawi yang umumnya diidentikan dengan keberadaan tanaman buah-buahan baik di pekarangan rumah penduduk ataupun sempadan situ. Selain sebagai penghijauan tanaman ini berfungsi sebagai peneduh ataupun estetis. Pada tahun 2002 Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta memberikan bantuan 1000 bibit buah-buahan untuk penghijauan produktif pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan situ. Vegetasi yang ada sebagai batas situ dan berjarak 12-50 meter dari situ antara lain andong (*Cordilyn frucosa*), jarak (*Jatropha multifida*), melinjo (*Gnetum gnemon*), pinus (*Pinus merkusii*), kelapa (*Cocos nucifera*), nangka (*Anthocarpus heterophilus*), mengkudu (*Morinda citrifolia*), meranti (*Shorea pinanga*), karet (*Ficus elastic*), aren (*Arenga pinnata*), kecapi (*Sandoricum loetjape*), rambutan (*Nephelium lappaceum*), Duku condet (*Lansium domesticum* Var. condet), Menteng (*Baccauria rasemosa*) dan berbagai tanaman buah lainnya. Keberadaan vegetasi yang sengaja ditanam di pinggir Setu Babakan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya longsor dan mencegah aliran permukaan yang berlebihan akibat air hujan, selain itu keberadaan vegetasi di Setu Babakan juga sebagai kawasan yang diperuntukan Pemerintah sebagai ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta.

Di Setu Babakan dijumpai dua jenis tumbuhan air yaitu teratai (*Nymphaea* sp.) dan eceng gondok (*Eichhornia crassipes*). Teratai adalah salah satu tanaman air yang memiliki nilai estetika, selain bentuknya menawan juga memiliki kemampuan menetralisir limbah. Demikian juga dengan eceng gondok yang selama ini lebih dikenal sebagai tanaman gulma, padahal sebenarnya eceng gondok memiliki kemampuan menyerap logam berat. Setu Babakan juga merupakan habitat yang baik bagi berbagai jenis ikan. Ikan-ikan yang terdapat di Setu Babakan antara lain ikan patin (*Pangasius* sp.), nilem (*Osteochilus hasselti*), mas (*Cyprinus carpio*), tawes (*Puntius javanicus*), benteur (*Puntius binotatus*), sepat rawa (*Tricogaster tricopterus*), nila (*Oreocromis niloticus*), gabus (*Channa striata*), mujair (*Oreochromis mossambicus*) dan ikan lele (*Clarias batracus*). Keberadaan ikan-ikan *native* di Setu Babakan hanya tinggal sepat rawa, nilem dan benteur yang kelimpahannya relatif lebih sedikit dibandingkan ikan-ikan hasil introduksi. Hal ini diduga selain karena tekanan ekologis yang tinggi pada perairan sehingga dari ketersediaan makanan, tempat memijah dan kondisi perairan yang tidak mendukung sebagai habitat ikan-ikan *native* tersebut, selain itu keberadaan ikan-ikan introduksi dan adanya ikan-ikan predator juga mempengaruhi keberadaan ikan-ikan *native* tersebut di perairan (Hobson 1974).

2.2.1.5. Ekosistem Buatan

Ekosistem buatan adalah sebuah ekositem yang terbentuk akibat campur tangan manusia (*man made ecosystem*). Ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia dengan dukungan teknologi yang dimiliki, baik itu teknologi yang sederhana ataupun modern untuk membentuk ekosistem baru. Ciri-ciri dari ekosistem buatan adalah kurang memiliki keanekaragaman dan kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ekosistem buatan yang menjadi sumber keanekaragaman hayati di DKI Jakarta adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan kota, taman kota, areal pertanian (kebun dan sawah), serta ekosistem pekarangan. Beberapa ekosistem buatan/ruang terbuka hijau yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di DKI Jakarta adalah:

1. Hutan Kota Universitas Indonesia

Hutan Kota merupakan bagian dari Lingkungan Kampus Universitas Indonesia dan ditetapkan sebagai kawasan hijau melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UI Nomor 84/SK/12/1988, tanggal 31 Oktober 1988. Surat itu kemudian diperbaharui melalui SK Gubernur Nomor 3487/1999 dengan nama Mahkota Hijau. Secara administrasi hutan Kota Kampus UI ini terbagi dalam dua wilayah administrasi kota, yaitu: Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Pemerintah Kota Depok dengan rincian 55,40 hektar masuk ke dalam wilayah Kota Jakarta Selatan, tepatnya Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah. Sisanya sekitar 34,6 hektar, masuk dalam wilayah administrasi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Keanekaragaman jenis fauna yang dapat dijumpai di Hutan Kota UI disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota UI

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
Avifauna					
1	Burung Gereja Erasia	*Passer montanus*			*LC*
2	Burung Madu Kelapa	*Anthreptes malacensis*	√		LC
3	Cucak Kutilang	*Pycnonotus aurigaster*			*LC*
4	Cinenen Kelabu	*Orthotomus ruficeps*			*LC*
5	Cipoh Kacat	*Aegithina tiphia*			*LC*
6	Layang-layang Batu	*Hirundo tahitica*			*LC*
7	Merbah Cerukcuk	*Pycnonotus goiavier*			*LC*
8	Raja Udang Meninting	*Alcedo meninting*	√		*LC*
9	Sepah Kecil	*Pericrocotus cinnamomeus*			*LC*
10	Walet Linchi	*Collocalia linchi*			*LC*
Herpetofauna					
1	Belentuk	*Kaloula baleata*			
2	Bunglon Surai	*Bronchocela jubata*			
3	Bunglon Taman	*Calotes versicolor*			
4	Cicak Tembok	*Cosymbotus platyurus*			
5	Cicak Terbang	*Draco volans*			
6	Kadal Kebun	*Eutropis multifasciata*			
7	Katak Pohon Bergaris	*Polypedates leucomystax*			

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
8	Kodok Puru Hutan	*Bufo biporcatus*			
9	Kongkang Gading	*Hylarana erythraea*			
10	Ular Pucuk	*Ahaetulla prasina*			
Kupu-kupu					
1	Ulat Cendana	*Delias descombesi*			
2	*Striped Blue Crow*	*Euploea mulciber*			
3		*Eurema sp*			
4	*Tailed Jay*	Graphium agamemnon			
5	Kupu-kupu Bulan Biru	*Hypolimnas bolina*			
6	*Chocolate Pansy*	Junonia iphita			
7	Kupu Kerai Payung	*Leptosia nina*			
8	Kupu Pastur	*Papilio memnon*			
9	*Plain Nawab Butterfly*	*Polyura hebe*			
Capung					
1	Capung Tombak Loreng	*Copera marginipes*			
2		*Libellago lineata*			
3	Capung Bawang	*Neurothemis ramburii*			
4	Capung Bawang	*Neurothemis terminata*			
5		*Orthetrum pruinosum*			
6		*Potamarcha congener*			
7		*Tholymis tillarga*			

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES *Species*, status *Appendices I* (*most endangered*), *II* (*not necessarily threatened*), *atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

Sementara itu, berdasarkan Buku Inventarisasi Jenis-jenis Pohon Hutan Kota Universitas Indonesia terdapat kurang lebih 114 jenis pohon.

2. Hutan Kota Srengseng

Luas Hutan Kota Srengseng sekitar 15 Ha. Di Hutan Kota ini terdapat sekitar 65 spesies pohon diantaranya Jati, Flamboyan, Ketapang, Akasia, Mahoni, dan lain-lain. Banyaknya pohon di hutan kota ini menjadi habitat berbagai satwa. Selain burung, juga ada reptil, tikus, kadal, biawak, dan lain-lain. Berdasakan hasil survey terdapat empat jenis burung yang dilindungi, yaitu: Burung Betet Biasa, Burung Madu Kelapa, Burung Madu Sriganti dan Raja Udang dan beberapa jenis fauna lainya (Tabel 2.33).

Tabel 2.33. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota Srengseng

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
Avifauna					
1	Bondol Peking	*Lonchura punctulata*			*LC*
2	Burung Gereja Erasia	*Passer montanus*			*LC*
3	Burung Madu Kelapa	*Anthreptes malacensis*	√		LC
4	Burung Madu Sriganti	*Nectarinia jugularis*	√		LC
5	Cabai Jawa	*Dicaeum trochileum*			LC
6	Cekakak Sungai	*Todirhamphus chloris*	√		*LC*
7	Cucak Kutilang	*Pycnonotus aurigaster*			*LC*

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
8	Cinenen Kelabu	*Orthotomus ruficeps*			*LC*
9	Cinenen Pisang	*Orthotomus sutorius*			*LC*
10	Cipoh Kacat	*Aegithina tiphia*			*LC*
11	Kapinis Rumah	*Apus affinis*			*LC*
12	Layang-layang Batu	*Hirundo tahitica*			*LC*
13	Merbah Cerukcuk	*Pycnonotus goiavier*			*LC*
14	Perenjak Jawa	*Prinia familiaris*			*LC*
15	Walet Linchi	*Collocalia linchi*			*LC*
16	Wiwik Kelabu	*Cacomantis merulinus*			LC
17	Wiwik Uncuing	*Cuculus sepulcralis*			LC
Mamalia					
1	Bajing Kelapa	*Callosciurus notatus*			*LC*
2	Cecadu-pisang Besar	*Macroglossus sobrinus*			*LC*
3	Celurut Rumah	*Suncus murinus*			*LC*
4	Codot *Horsfield*	*Cynopterus horsfieldii*			*LC*
5	Codot Krawar	*Cynopterus brachyotis*			*LC*
6	Monyet Ekor Panjang	*Macaca fascicularis*			*LC*
Herpetofauna					
1	Bangkong Kolong	*Duttaphrynus melanostictus*			
2	Bunglon Surai	*Bronchocela jubata*			
3	Bunglon Taman	*Calotes versicolor*			
4	Cicak Tembok	*Cosymbotus platyurus*			
5	Cicak Terbang	*Draco volans*			
6	Kadal Kebun	*Eutropis multifasciata*			
7	Katak Pohon Bergaris	*Polypedates leucomystax*			
8	Kodok Puru Hutan	*Bufo biporcatus*			
9	Kodok Tegalan	*Fejervarya limnocharis*			
Kupu-kupu					
1		*Catopsilia sp*			
2		*Danaus chrysippus*			
3		*Delias hyparete*			
4		*Euploea mulciber*			
5		*Eurema sp*			
6		*Graphium agamemnon*			
7		*Hypolimnas bolina*			
8		*Junonia hedonia*			
9		*Papilio memnon*			
10		*Zizina otis*			
Capung					
1		*Agriocnemis femina*			
2		*Crocothemis servilia*			
3		*Lathrecista asiatica*			
4		*Neurothemis terminata*			
5		*Orthetrum sabina*			
6		*Orthetrum sp*			
7		*Potamarcha congener*			
8		*Zyxomma obtusum*			
9		*Agriocnemis femina*			

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES *Species*, status *Appendices I* (*most endangered*), *II* (*not necessarily threatened*), *atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

Gambar 2.46. Fauna di Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana

3. Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana

Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana memiliki banyak fungsi. Selain menjadi tempat konservasi dan edukasi, Hutan Sangga Buana juga bisa menjadi lokasi rekreasi. Kawasan ini berada di pinggiran DKI Jakarta di sekitar Kali Pesanggrahan dengan luas area 120 hektar terdiri dari 40 hektar berada di wilayah DKI Jakarta dan 80 hektar berada di wilayah Tanggerang Selatan.

Hutan Kota Pesanggrahan merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Kelompok Tani Sangga Buana di bantaran kali Pasanggrahan. Memiliki fungsi konservasi alam dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Jenis fauna yang terdapat di Hutan Kota Pasanggrahan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.34. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota Pesanggrahan Sangga Buana

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUNC
Avifauna					
1	Burung Gereja Erasia	*Passer montanus*			*LC*
2	Cucak Kutilang	*Pycnonotus aurigaster*			*LC*
3	Layang-layang Batu	*Hirundo tahitica*			*LC*
4	Merbah Cerukcuk	*Pycnonotus goiavier*			*LC*
5	Walet Linchi	*Collocalia linchi*			*LC*
Herpetofauna					
1	Bunglon Taman	*Calotes versicolor*			
2	Cicak Terbang	*Draco volans*			
Kupu-kupu					

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUNC
1		*Danaus chrysippus*			
2		*Eurema sp*			
3		*Leptosia nina*			
Capung					
1		*Brachythemis contaminata*			
2		*Crocothemis servilia*			
3		*Orthetrum sabina*			
4		*Orthetrum sp*			
5		*Potamarcha congener*			

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES *Species,* status *Appendices I* (*most endangered*)*, II* (*not necessarily threatened*)*, atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

4. Hutan Kota Munjul

Hutan Munjul berada di Jalan Raya Munjul, Jakarta Timur. Hutan Kota Munjul merupakan hutan kota yang memiliki fungsi utama sebagai hutan kota konservasi. Selain itu, hutan kota ini juga mempunyai fungsi untuk kawasan resapan air dan memiliki luasan 2,8 Ha. Berdasarkan survey keanekaragaman fauna di Hutan Kota Munjul disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35. Keanekaragaman Jenis Fauna di Hutan Kota Munjul

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUNC
Avifauna					
1	Burung Gereja	*Passer montanus*			*LC*
2	Madu Sriganti	*Nectarina jugularis*			*LC*
3	Cabai Jawa	*Dicaeum trochileum*			*LC*
4	Cucak Kutilang	*Pycnonotus aurigaster*			*LC*
5	Merbah Cerukcuk	*Pycnonotus goiavier*			*LC*
6	Linchi	*Colocalia linchi*			*LC*
7	Bondol Peking	*Lonchura punctulata*			*LC*
8	Burung Madu Kelapa	*Anthreptes malacensis*			*LC*
9	Caladi Itik	*Dendrocoppus molucensis*			*LC*
10	Cekakak Sungai	*Todirhampus chloris*			*LC*
11	Cinenen Jawa	*Orthotomus sepium*			*LC*
12	Cinenen Kelabu	*Orthotomus ruficeps*			*LC*
13	Cipoh Kacat	*Aeghitina tiphia*			*LC*
14	Kacamata Biasa	*Zosterops palpebrosus*			*LC*
15	Kepudang Kuduk Hitam	*Oriolus chinensis*			*LC*
16	Kipasan Belalang	*Rhipidura javanica*			*LC*
17	Perenjak Jawa	*Primia familiaris*			*LC*
18	Perkutut Jawa	*Geopelia stritata*			*LC*
Herpetofauna					
1	Biawak	*Varanus salvator*			
2	Bunglon	*Calotes jubates*			
3	Kadal	*Eutropis multifasciata*			
4	Kodok Bungu Sungai	*Phrynoidis asper*			

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUNC
5	Kodok Sawah	*Fejervarya cancrivora*			
6	Ular Kobra	*Ophiophagus Hannah*		*II*	*VU*
7	Ular Pucuk	*Ahaeutulla prasina*			
8	Ular Sanca	*Phyton reticulatus*		*II*	
Mamalia					
1	Bajing Kelapa	*Callosciurus notatus*			
2	Monyet	*Macaca fascicularis*			

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES *Species*, status *Appendices I* (*most endangered*), *II* (*not necessarily threatened*), *atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

5. Taman Honda Tebet

Taman Honda Tebet (Taman Honda) adalah taman seluas 2,6 Ha, merupakan taman terbuka hijau. Kawasan taman ini terbelah oleh anak sungai yang mengalir dari arah Pasar Minggu menuju ke Manggarai. Di taman ini terdapat kurang lebih 1.180 pohon.

Berdasarkan survey tahun 2018, terdapat 1 jenis herpetofauna, yaitu: kadal kebun (*Eutropis multifasciata,* 6 jenis kupu-kupu dan 2 jenis capung dan terdapat 18 jenis burung yang tersaji dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36. Keanekaragaman Jenis Fauna di Taman Honda Tebet

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
Avivauna					
1	Burung Gereja Erasia	*Passer montanus*			*LC*
2	Burung Madu Kelapa	*Anthreptes malacensis*	√		*LC*
3	Cabai Jawa	*Dicaeum trochileum*			*LC*
4	Caladi Ulam	*Dendrocopus macei*			*LC*
5	Cucak Kutilang	*Pycnonotus aurigaster*			*LC*
6	Cinenen Kelabu	*Orthotomus ruficeps*			*lC*
7	Cinenen Pisang	*Orthotomus sutorius*			*LC*
8	Cipoh Kacat	*Aegithina tiphia*			*LC*
9	Kacamata Biasa	*Zosterops palpebrosus*			*LC*
10	Kapinis Rumah	*Apus affinis*			*LC*
11	Layang-layang Batu	*Hirundo tahitica*			*LC*
12	Merbah Cerukcuk	*Pycnonotus goiavier*			*LC*
13	Punai Gading	*Treron vernans*			LC
14	Remetuk Laut	*Gerygone sulphurea*			*LC*
15	Sepah Kecil	*Pericrocotus cinnamomeus*			*LC*
16	Sikatan Belang	*Ficedula westermanni*			*LC*
17	Takur Ungkut-ungkut	*Megalaima haemacephala*			*LC*
18	Walet Linchi	*Collocalia linchi*			*LC*
Herpetofauna					
1	Kadal Kebun	*Eutropis multifasciata*			
Kupu-kupu					
1		*Appias olferna*			
2		*Eurema sp*			
3		*Papilio demoleus*			

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
4		*Papilio memnon*			
5		*Zizina otis*			
6		*Appias olferna*			
Serangga					
1		*Crocothemis servilia*			
2		*Orthetrum sabina*			

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES *Species*, status *Appendices I* (*most endangered*), *II* (*not necessarily threatened*), *atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

6. Taman Monas

Taman Monas terletak dalam areal yang memiliki luasan sebesar 80 Ha yang telah ada sejak tahun 1961. Dalam kawasan ini terdapat 31 jenis burung yang empat di antaranya merupakan burung yang dilindungi oleh PP No.7 tahun1999, terdapat 40 jenis pohon yang didominasi oleh famili Fabales.

Tabel 2.37. Keanekaragaman Jenis di Taman Monas

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
Avivauna					
1	Burung Gereja	*Passer montanus*			*LC*
2	Cabai Jawa	*Dicaeum trochileum*			LC
3	Cucak Kutilang	*Pycnonotus aurigaster*			*LC*
4	Gagak Hutan	*Corvus enca*			*LC*
5	Kapinis Rumah	*Apus affinis*			*LC*
6	Kekep Babi	*Artamus leucorhynchus*			*LC*
7	Layang-layang Batu	*Hirundo tahitica*			*LC*
8	Takur Ungkut-ungkut	*Megalaima haemacephala*			*LC*
9	Tekukur Biasa	*Streptopelia chinensis*			*LC*
10	Walet Linchi	*Collocalia linchi*			*LC*
Herpetofauna					
1	Bangkong Kolong	*Duttaphrynus melanostictus*			
2	Bunglon Taman	*Calotes versicolor*			
3	Kadal Kebun	*Eutropis multifasciata*			
Kupu-kupu					
1		*Graphium agamemnon*			
2		*Neptis hylas*			
3		*Zizina otis*			
Capung					
1		*Agriocnemis femina*			
2		*Crocothemis servilia*			
3		*Ischnura senegalensis*			
4		*Macrodiplax cora*			
5		*Orthetrum sabina*			
6		*Pantala flavescens*			

Sumber: Survei primer, 2019
Keterangan: Status Konservasi* : PP = UU Nomor 5 Tahun 1990 dan/atau Permen LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /8/2018; CITES = the CITES *Species*, status *Appendices I* (*most endangered*), *II* (*not necessarily threatened*), *atau III* (*trade regulated*); IUCN = IUCN = LC (*Least Concern*)

7. Ekosistem Budidaya, Lahan Pekarangan dan Kebun Bibit

Sumber keanekaragaman hayati lain yang penting di DKI Jakarta adalah ekosistem budidaya, ekosistem pekarangan, dan kebun bibit sebagai habitat bagi berbagai jenis flora yang sudah bernilai ekonomis atau memiliki nilai pemanfaatan berkelanjutan. Ekosistem budidaya yang dijumpai di DKI Jakarta berupa lahan pertanian sawah dan kebun sayur dengan luas yang terbatas dan tersebar di Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing dan Jakarta Timur di Kecamatan Cakung dan Cipayung.

Kebun bibit memiliki peranan yang sangat penting dalam mengkonservasi plasma nutfah di DKI Jakarta. Kebun bibit saat ini dikelola oleh Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman secara umum bertugas untuk memproduksi benih unggul tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan; mengoleksi dan melestarikan pohon induk sebagai plasma nutfah; pengadaan pohon induk sebagai bahan biakan dan sumber mata tempel; dan pendistribusian benih kepada masyarakat. Jumlah kebun bibit yang ada di DKI Jakarta disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38. Kebun Bibit di DKI Jakarta

No.	Kebun Bibit	Alamat	Luas (m^2)
1.	Kebun Bibit Ragunan	Jl. Harsono RM No. 1 Rt. 001/04 Kel. Ragunan Ps. Minggu, Jakarta Selatan. (021) 7805236.	23.235
2.	Kebun Bibit Ciganjur	Jl. Aselih No.100 Rt. 09/01 Kel. Cimpedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.	132.166
3.	Kebun Bibit Cibubur	Jl. Jambore Raya No. 1 Rt. 05/06 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.	106.307,46
4.	Kebun Bibit Wisata Agro Cibubur	Jl. Karya Bhakti Cibubur Rt. 011/07 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.	42.067
5.	Kebun Bibit Agrowisata Cilangkap	Jl. Raya Cilangkap No. 45 Rt. 06/01 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.	195.000
6	Kebun Bibit Condet	Jl. Batu Ratna Condet Rt. 08/05 No. 25 Kelurahan Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.	1.620
7.	Kebun Bibit Kelapa Dua Wetan	Jl. Raya PKP Gg. Persahabatan Rt.10/08 No. 23 Kel. Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Kode Pos 13730.	4.850
8.	Kebun Bibit Lebak Bulus	Jl. Pertanian Raya No. 47 Rt.03/04 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.	13.300
9.	Kebun Bibit Ujung Menteng	Jl. Tambun Rengas Selatan Rt.02/08 No. 28 A. Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung. Jakarta Timur.	30.630

No.	Kebun Bibit	Alamat	Luas (m^2)
10.	Kebun Bibit Sukapura	Jl. Malaka Bulak Rt.15/12 No. 23 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara.	44.722,50
11.	Kebun Bibit Kamal Muara	Jl. Kamal Muara Rt.07/01 No. 13 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.	36.879
12.	Kebun Bibit Cengkareng	Jl. Kamal Raya No. 75 Rt.02/07 Rawa Bengkel Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Utara.	94.000
13.	Kebun Sawah Abadi	Jl.Inspeksi Kanal Banjir Timur Kelurahan Cakung Timur. Kec. Cakung. Kota Adtministrasi Jakarta Timur.	56.000
14.	Kebun Cagar Buah Condet	Jl. Kayu Manis Kelurahan Balekambang, Kec. Kramatjati. Jakarta Timur.	34.050

Sumber : Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman (2019)

Koleksi jenis flora di kebun bibit secara keluruhan terdiri dari 48 jenis pohon buah, tanaman toga 70 jenis, dan tanaman hias kurang lebih 15 jenis.

Tabel 2.39. Daftar Jenis Tumbuhan yang Terdapat di Kebun Bibit

JENIS TANAMAN					
A.	TANAMAN BUAH	B.	TOGA	C.	TANAMAN HIAS
1	Alkesa	1	Adas	1	Aglonema
2	Alpukat	2	Andong laut	2	Aglonema Sumatra
3	Asam Jawa	3	Bangle	3	Anggrek
4	Belimbing	4	Binahong	4	Anthorium G.Cinta
5	Belimbing buah	5	Bluntas	5	Bawang2an
6	Bisbol	6	Brotowali	6	Bougenvile
7	Buni	7	Cabe Jawa	7	Drasena
8	Daun Salam	8	Cakra Cikri	8	Palem kuning
9	Duku	9	Cincau	9	Palem Waregu
10	Durian	10	Cocor Bebek	10	Philodendron
11	Gandaria	11	Daun Dewa	11	Pucuk merah
12	Jamblang	12	Daun Saga	12	Soka
13	Jambu air	13	Daun Suji	13	Song Of India
14	Jambu biji	14	Gandaria	14	Song Of Jamaika
15	Jambu bol	15	Gandarusa	15	Tabe buya
16	Jambu mawar	16	Gingseng		
17	Jambu Mente	17	Handalem		
18	Jengkol	18	Insulin		
19	Jeruk	19	Jahe		
20	Jeruk lemon/nipis	20	Jarak		
21	Jeruk lemon	21	Jeruju		
22	Juwed	22	Jinten		
23	Kecapi	23	Kaca piring		
24	Kelapa	24	Karuk/Cabe jawa		
25	Kelengkeng	25	Katuk		

JENIS TANAMAN					
A.	**TANAMAN BUAH**	B.	**TOGA**	C.	**TANAMAN HIAS**
26	Kemang	26	Kecombrang		
27	Kokosan	27	Kedondong laut		
28	Mahoni	28	Keji beling		
29	Malaka	29	Keji beling		
30	Mangga	30	Kelor		
31	Manggis	31	Kembang teleng		
32	Matoa	32	Kemuning		
33	Menteng	33	Kencur		
34	Mundu	34	Kenikir		
35	Nangka Cipedak	35	Kikolot		
36	Nangka	36	Krokot		
37	Pete	37	Kumis kucing		
38	Pisang	38	Kunyit		
39	Produktif	39	Lavender		
40	Rambutan	40	Lempuyang		
41	Randu	41	Lengkuas		
42	Rukem	42	Lidah buaya		
43	Salak	43	Mahkota Dewa		
44	Salam	44	Mangkokan		
45	Sawo	45	Mengkudu		
46	Sawo kecik	46	Miana		
47	Sirsak	47	Pacar cina		
48	Sukun	48	Pala		
		49	Pandan		
		50	Pandan Wangi		
		51	Patah tulang		
		52	Pucuk Merah		
		53	Saga		
		54	Salam		
		55	Sambiloto		
		56	Sambung Dara		
		57	Sambung nyawa		
		58	Samiloto		
		59	Sembung		
		60	Sendokan		
		61	Sereh		
		62	Sirih		
		63	Soka		
		64	Sosor Bebek		
		65	Suji		
		66	Tapak dara		
		67	Tapak Liman		
		68	Tempuyung		
		69	Temu Ireng		
		70	Temu lawak		

Sumber : Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman (2019)

2.2.2. Keanekaragaman spesies dan genetik

Spesies merupakan dasar unit organisasi dalam ekologi dan sebagai unit evolusi yang dapat dilakukan pengukuran secara mudah di lapangan. Spesies merupakan hal penting bagi evaluasi ekologis dan pola-pola evolusioner serta memiliki proses-proses yang umumnya dianggap sebagai unit yang paling sesuai untuk tujuan pengelolaan dan konservasi kawasan alami.

Spesies penting yang menjadi prioritas konservasi di DKI Jakarta mempertimbangkan *tingkat keterancaman spesies atau status konservasinya, endemisitas, spesies yang ditetapkan sebagai spesies khas/identitas wilayah, dan memiliki potensi untuk pemanfaatan secara berkelanjutan*. Untuk tingkat keterancaman, kriterianya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991, IUCN dan spesies tumbuhan/satwa liar yang statusnya telah terdaftar dalam CITES.

2.2.2.1. Flora dan Fauna Nusantara Khas/Identitas DKI Jakarta

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Tanaman Nusantara Khas Jakarta, yaitu: jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas sebuah kawasan di Jakarta serta jenis tanaman yang sesuai dengan pendekatan Nama Kelurahan/ Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu: sebanyak 103 spesies tanaman nusantara khas Jakarta (Tabel 2.40).

Tabel 2.40. Flora Nusantara Khas DKI Jakarta

No.	Nama Lokal	Nama Latin
1	Alpukat Cipedak	*Persea americana* var Cipedak
2	Anggrek Betawi Jaya	*Dendrobium bigibbum* var Betawi Jaya
3	Anggrek Anggur Merah	*Dendrobium bigibbum* var Anggur Merah
4	Anggrek Fatahillah	*Dendrobium bigibbum* var Fatahillah
5	Bambu	*Bambusa vulgaris*
6	Bawang-bawangan/Bakung	*Crynum asiaticum*
7	Bayur	*Pterospermum javanicum* Jungh
8	Belimbing Dewa Baru	*Averrhoa carambola* var Dewa Baru
9	Belimbing Simanis	*Averrhoa carambola* var Simanis
10	Bidara	*Ziziphus mauritiana*
11	Bintaro	*Cerbera manghas*
12	Bisbol	*Diospyros philipensis*
13	Buah Nona	*Annona reticulata*
14	Bungur	*Lagerstroemia speciosa*
15	Buni	*Antidesma reticulata*
16	Cempaka	*Magnolia champaca*

No.	Nama Lokal	Nama Latin
17	Cempedak	*Artocarpus integer*
18	Ceremai	*Phyllanthus acidus*
19	Damar	*Agathis dammara*
20	Duku Condet	*Lansium domesticum* var Condet
21	Durian Cipaku	*Durio zibhentinus* var cipaku
22	Durian Sitokong	*Durio zibhentinus* var sitokong
23	Gadung	*Dioscorea hispida* Dennst.
24	Gamal	*Gliricidia sepium*
25	Gambir	*Uncaria gambir*
26	Gandaria	*Buoea marcophylla*
27	Glodogan Tiang	*Polyalthia longifolia* Sonn.
28	Gondang	*Ficus variegata* B1
29	Jati	*Tectona Grandis*
30	Jati Belanda	*Guazuma ulmifolia*
31	Jati Cina	*Senna alexandrina*
32	Jambu Biji Mega Merah	*Psidium guajava* var Mega Merah
33	Jambu Biji Wijaya Merah	*Psidium guajava* var Wijaya Merah
34	Jambu Bol Harman	*Sizygium malaccense* var Harman
35	Jambu Mawar	*Eugenia Jambos*
36	Jeruk Bali	*Citrus maxima*
37	Jeruk Varietas Kingkit	*Triphasia tnfolia*
38	Jeruk Lemon Cui	*Citrus microcarpa*
39	Juwet/Jamblang	*Eugina cuminiz*
40	Johar	*Senna siamea*
41	Kacangan Pintoi	*Arachis pintoi*
42	Kamboja Bali	*Plumeria acumnita*
43	Kapuk	*Ceiba pentandra*
44	Kapulasan	*Nephelium mutabile*
45	Karet	*Hevea brasiliensis*
46	Karet Kebo	*Ficus elastica*
47	Kayu Manis	*Cinnamomum verum*
48	Kayu Putih	*Melaleuca leucadendra*
49	Kawista Batu	*Feronica ludicia*
50	Kecapi	*Sandoricum koetjape*
51	Kedaung	*Parkia roxburghii*
52	Kedoya	*Dysoxylum gaudichaudianum*
53	Kelapa Gading	*Cocos nucifera*
54	Kelapa Sawit	*Elaeis guineensis*
55	Kemang	*Mangifera caesia*
56	Kenari	*Canarium indicum*
57	Kepa/Kupa/Gowok	*Syzygium polycephalum*
58	Kepel/Burahol	*Stelechocarpus burahol*
59	Kerendang	*Carissa carandas*
60	Kesambi	*Schleichera oleosa*
61	Koko san	*Lansium domesticum*
62	Kopi	*Coffea arabica*
63	Krokot	*Portulaca villosa*
64	Kweni	*Mangifera odorata*
65	Labu	*Cucurbita moschata*
66	Lechi	*Leachi chinensis*
67	Lobi-lobi	*Floacourtia inermis*
68	Malaka	*Phylantus emblica*

No.	Nama Lokal	Nama Latin
69	Mangga	*Mangifera indica*
70	Mangga Gedong	*Mangifera indica* var Gedong
71	Manggis (Garcinia mangostana)	*Garcinia mangostana*
72	Melati Putih	*Jasminum sambac*
73	Menteng/Kemundung	*Baccuria Rasemosa*
74	Mengkudu	*Morinda Citrifolia*
75	Mundu	*Gracinta dulcis*
76	Nam-Nam	*Cynometro cauliflora*
77	Pala	*Myristica fragrans*
78	Palem Merah	*Cyrtostachys lakka*
79	Pandan Bali	*Cordyline australis*
80	Paria Tresno	*Momordica charantia* var Tresno)
81	Petai	*Parkia speciose*
82	Pinang	*Areca catechu*
83	Pisang-pisangan/Heliconia	*Heliconia rostrate*
84	Pisang Kepok Belanda	*Musa acuminata* var Kepok Belanda
85	Pulai	*Alstonia scholaris* L. R. Br.
86	Talas Pitung	*Colocasia esculenta* var Pitung
87	Talas Ketan	*Colocasia esculenta* var ketan
88	Umbi Taka Varietas Kecundang	*Tacca leontopetaloides* var Kecundang
89	Rambutan Binjai	*Nephellium lappacium* var Binjai
90	Rambutan Rapiah	*Nephellium lappacium* var rapiah
91	Rambutan Lebak Bulus	*Nephelium lappaceum*
92	Rotan	*Daemonorops draco*
93	Rukem	*Falcourtia rukam*
94	Salak Condet	*Salacca edulis cainato - condet*
95	Salak Condet 8592	*Salacca edulis* var 8592
96	Salak Condet 8590	*Salacca edulis* var 8590
97	Sawo Kecik	*Manilkara kaukz*
98	Sawo Duren	*Chrysophillum cainato*
99	Selada Betawi	*Lactuca sativa* var Betawi
100	Sirih Gading	*Epipremnum aureum*
101	Srikaya	*Annona squamosa*
102	Sukun Pulo Seribu	*Artocarpus atilis* var Pulo Seribu
103	Teratai	*Nymphaea lotus*

Sementara itu, fauna yang ditetapkan sebagai identitas DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1796 Tahun 1989 tentang Penetapan Salak Condet (*Salacca zalacca*). Dari Jenis Flora dan Burung Elang Bondol (*Haliastur Indus*). Dari Jenis Fauna Sebagai Identitas/Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gambar **2.47.** Elang Bondol (*Haliastur indus*)

Elang Bondol (*Haliastur indus*) termasuk salah satu jenis burung pemangsa yang memiliki wilayah penyebaran yang luas. Di Indonesia penyebaran Elang Bondol dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di Indonesia khususnya Pulau Jawa, keberadaan elang bondol mengalami penurunan populasi sangat drastis dan terancam punah (Ballen *et al*. 1993). Penurunan populasi Elang Bondol di Pulau Jawa disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas habitat, berkurangnya mangsa, perburuan, dan penggunaan pestisida (Ballen *et al*. 1993).

Sejak tahun 2004, status konservasi Elang Bondol menurut IUCN, yaitu: *Least Concern* (Risiko Rendah). Di Indonesia, satwa ini dilindungi sejak tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 421/Kpts/Um/8/8/1970, kemudian diperkuat oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pemanfaatan Elang Bondol diatur dalam CITES dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. CITES mengkategorikannya dalam Apendiks II, hal ini berarti Elang Bondol termasuk dalam daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.

Sebaran Elang Bondol alami di DKI Jakarta terdapat di Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut. Untuk meningkatkan populasi Elang Bodol dilakukan kegiatan pelepasliaran sejak tahun 2005, melalui program penyelamatan dan rehabilitasi Elang Bondol oleh Jakarta *Animal Aid Network* (JAAN) di Pulau Kotok Besar. Sampai dengan tahun 2017, JAAN telah

melepasliarkan sebanyak 62 ekor. Namun, tingkat keberhasilan pelepasliaran belum terpantau dengan baik.

2.2.2.2. Flora Fauna Dilindungi

Konservasi kenakeragaman hayati pada tingkat spesies di DKI Jakarta di samping mempertimbangkan *spesies yang ditetapkan sebagai spesies khas/identitas wilayah* juga mempertimbangkan *tingkat keterancaman spesies atau status konservasinya, dan memiliki potensi untuk pemanfaatan secara berkelanjutan*.

A. Flora Dilindungi/Terancam

Keanekaragaman jenis flora di DKI Jakarta yang berhasil diinventarisasi berdasarkan data profil kenekaragaman hayati, adalah: 662 jenis yang terdiri dari berbagai habitat. Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa spesies flora tergolong status konservasinya dilindung atau terancam, namun sebagian besar merupakan spesies introduksi yang berada pada ekosistem buatan atau di ruang-ruang terbuka hijau, kecuali beberapa jenis mangrove dan lamun yang tumbuh pada habitat alaminya.

Tabel 2.41. Keanekaragaman Jenis Flora Dilindungi atau Terancam

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
1	Lamun	*Cymodocea rotundata*			LC
2	Lamun	*Cymodocea serulata*			LC
3	Lamun	*Enhalus acoroides*			LC
4	Lamun	*Halodule uninervis*			LC
5	Lamun	*Halodule pinifolia*			LC
6	Lamun	*Halophila decipiens*			LC
7	Lamun	*Halophila minor*			LC
8	Lamun	*Halophila ovalis*			LC
9	Lamun	*Syringodium Isoetifolium*			LC
10	Api-api	*Avicennia marina*			LC
11	Api-api Ludat	*Avicennia officinalis*			LC
12	Bakau Jankar	*Rhizophora macrophylla*			LC
13	Bakau Kecil	*Rhizophora stylosa*			LC
14	Bakau Kurap	*Rhizophora mucronate*			LC
15	Bakau Minyak	*Rhizophora apiculatablume.*			LC
16	Bogem	*Bruguiera cylindrica*			LC
17	Keben/Butun	*Barringtonia asiatica*			LC
18	Pidada Merah	*Sonneratia caseolaris*			LC
19	Pidada Putih	*Sonneratia alba.*			LC
20	Prepet/Tancang	*Bruguiera gymnorrhiza*			LC
21	Api-api	*Avicennia alba*			LC
22	Mahoni	*Swietenia macrophylla*		II	EN
23	Bisbul Blancio	*Diospyros blancio*			VU
24	Cendana	*Santalum album*			VU
25	Pinus	*Pinus merkusii*			VU
26	Angsana	*Pterocarpus indicus*			VU
27	Eboni/Kayu Hitam	*Diospyros celebica*			VU
28	Merbau Pantai	*Intsia bijuga*			VU
29	Meranti	*Shorea sp*			

No.	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	CITES	IUCN
30	Palem Kuning	*Chrysalidocarpus lutescens*			NT
31	Tengkawang	*Dipterocarpus palembanica*			VU
32	Palem Kipas	*Livistona chinensis*			EN
33	Meranti Buto	*Shorea arminia*			EN
34	Meranti Kuning	*Shorea Pinanga*			EN
35	Meranti Merah	*Shorea Leprosula*			EN
36	Meranti Putih	*Shorea resinosa*			EN
37	Jati	*Tectona grandis*			CR

B. Fauna Dilindungi/Terancam

1. Avifauna (Burung)

Berdasarkan Profil Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta (2018), keanekaragaman avifauna (burung) yang terinventarisir sebanyak 133 jenis burung yang tersebar di berbagai habitat. Berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 tercatat sebanyak 39 jenis yang dilindungi undang-undang. Berdasarkan kriteria IUCN, tercatat jenis *Vulnerable* (VU) antara lain Bangau Tongtong (*Leptoptilops javanicus*) dan Bayan (*Lorius loratus*); jenis *Endangered* (EN) antara lain Bangau Bluwok (*Mycteria cinerea*), Kakatua Cempaka (*Cacatua sulphurea citrinocristata*) dan Merak Hijau (*Pavo muticus*).

Tabel 2.42. Burung Dilindungi dan Status Konservasinya

No	Nama Nasional	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	Cites	IUCN
1	Bangau Bluwok	*Mycteria cinerea*	√	I	EN
2	Bangau Tongtong	*Leptoptilops javanicus*	√		VU
3	Bayan	*Lorius loratus*			VU
4	Betet Biasa	*Psittacula alexandri*	√	II	NT
5	Betet Kalung	*Psittacula alexandri*	√		
6	Madu Sriganti	*Nectarinia jugularis*			LC
7	Dara Mahkota Cristata	*Goura cristata*	√		
8	Dara-laut Sayap-putih	*Chlidonias leucopterus*	√		LC
9	Elang Bondol	*Haliastur indus*	√		LC
10	Elang Laut Perut Putih	*Haliaeetus leucogaster*	√		LC
11	Elang Tiram	*Pandion haliaetus*	√		LC
12	Elang Ular Bido	*Spilornis cheela*	√		LC
13	Elang Ular Putih/Brontok	*Nisaetus cirrhatus*	√		
14	Wili-wili Besar	*Esacus magnirostris*	√		NT
15	Julang Irian	*Rhyticeros plicatus*	√	II	LC
16	Julang Sulawesi	*Rhyticeros cassidix*	√	II	VU
17	Kakaktua Raja	*Probosciger aterrimus*	√	I	LC
18	Kakatua Besar Jambul Kuning	*Cacatua sulphurea*	√	I	CR
19	Kangkareng Hitam	*Anthracoceros malayanus*	√	II	VU
20	Kangkareng Perut Putih	*Anthracoceros albirostris*	√	II	LC
21	Kerak Ungu	*Acridotheres tristis*	√		LC
22	Kipasan Belang	*Rhipidura javanica*	√		LC
23	Macaw Biru Kuning	*Ara araruana*		II	LC

No	Nama Nasional	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			PP	Cites	IUCN
24	Merak Hijau	*Pavo muticus*	√	I	EN
25	Pecuk Ular Asia	*Anhinga melanogaster*			NT
26	Pelikan Australia	*Pelecanus crispus*	√	I	LC
27	Itik Benjut	*Anas gibberifrons*			NT
28	Kerak Kerbau	*Acridotheres Javanicus*			*VU*

Gambar 2.48. Bangau Bluwok di Pulau Rambut
(Koleksi Foto BKSDA DKI Jakarta)

Bangau Bluwok (*Mycteria cinerea*) adalah salah satu jenis burung air anggota Ciconidae. Jenis bangau ini berukuran besar dengan tinggi pada saat berdiri 91-95 cm. Bulu berwarna putih kecuali pada bagian ekor dan bulu terbang yang berwarna hitam, paruh melengkung ke bawah berwarna kuning gading. Kulit muka berwarna merah jambu sampai merah dan tidak berbulu (Hancock *et al*, 1992, Mac Kinnon *et al*, 1998).

Oleh IUCN sejak tahun 1979 burung ini telah dimasukkan ke dalam kateori *red data species* (King 1979). Berdasarkan dokumen *Bird to Watch to* 2 (Collar *et al*. 1994) spesies ini dimasukkan ke dalam kategori *Endangered*. Oleh CITES, Bangau Bluwok dimasukkan ke alam Apendix I CITES yang artinya spesies ini tidak dapat diperdagangkan untuk tujuan komersil di pasar internasional (Soehartono & Mardiastuti 2002).

Menurut Situs BKSDA Jakarta, penyebaran Burung Bluwok terbatas hanya di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah populasi terbesar berada di Indonesia. Populasi yang pasti di dunia diperkirakan sekitar 6.000 ekor (1986) dimana 5.900 ekor (97%) berada di Indonesia. Pusat penyebaran burung ini adalah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Sumbawa dan Semenanjung Malaysia. Populasi di Sumatera berkisar 5.000 ekor, Jawa berkisar 602 ekor dimana sekitar 400 ekor menetap di Jawa Barat dan populasi minimum 341 individu di pantai selatan Jawa Tengah dengan 68 individu masih juvenil. Di Pulau Jawa Burung Bluwok terdapat di Pulau Dua, Indramayu, Segara Anakan dan Pulau Rambut (*Sumber: Bird Conservation Officer Burung Indonesia*).

Burung Bangau Bluwok termasuk burung migran, walaupun hanya migrasi lokal. Setelah melakukan perkembangbiakan di Pulau rambut, burung Bangau Bluwok akan kembali ke pantai utara Jawa. Di Pulau Jawa hingga saat ini Pulau Rambut adalah satu-satunya tempat yang digunakan untuk berbiak dan juga seringkali dijumpai singgah di daerah Teluk Jakarta. Di Pulau Rambut Bangau Bluwok meletakkan telur pada bulan Maret hingga Mei (Hoogerwerf 1949). Setelah migrasi, sekitar bulan Agustus tidak ada burung Bangau Bluwok yang terlihat di Pulau rambut hanya terlihat beberapa ekor untuk singgah sebentar dan kemudian pergi lagi dan akan kembali ke Pulau Rambut sekitar bulan Desember atau Januari.

Walaupun burung Bangau Bluwok tidak termasuk kedalam 25 spesies terancam punah yang harus ditingkatkan populasinya. Namun karena keunikan dan kekhasannya, maka Balai KSDA DKI menetapkan Bangau Bluwok sebagai salah satu jenis penting yang ada di SM Pulau Rambut. Populasi Bangau Bluwok saat ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan oleh tingginya ancaman terhadap kelestarian populasinya. Meningkatnya perburuan mengakibatkan menurunnya populasi burung ini di habitat aslinya. Selain itu semakin berkurangnya tempat mencari makan dan berkembang biak menjadi ancaman lain bagi keberlangsungan hidup burung ini.

2. Herpetofauna

Berdasarkan Profil Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta 2018), keanekaragaman jenis herpetofauna yang terinventarisasi sebanyak 17 jenis yang tersebar di 28 RTH. Hanya terdapat 1 jenis yang dilindungi oleh No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan termasuk dalam status *Critically Endangered* yaitu Penyu Sisik (*Eretmocelys imbricata).* Penurunan populasi penyu disebabkan oleh tingginya ancaman dari beberapa faktor yang meliputi faktor alam (predator, penyakit, dan perubahan iklim) dan faktor antropogenik (pemanfaatan penyu maupun turunannya dan pemanfaatan habitat peneluran serta telurnya) (Samanya 2015).

PENYU SISIK

E R E T M O C H E L Y S I M B R I C A T E

Kingdom	: AnimaliaPhylum : Chordata
Class	: Sauropsida
Ordo	: Testudines
Sub Ordo	: CryptodiraSuperfamily : Cheloniidea
Family	: Cheloniidae (Oppel, 1811)
Spesies	: Eretmochelys imbricate
Nama lokal	: Penyu sisik

Wilayah Kepulauan Seribu, khususnya sejumlah pulau di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, merupakan habitat penyu sisik (*Eretmochelys imbricate)*. Penyu itu merupakan satu dari tujuh jenis penyu dunia. Selain penyu sisik, ada lima jenis lain yang ditemukan di Indonesia, yakni penyu hijau (Chelonia mydas), penyu tempayan (Caretta caretta), penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), dan penyu pipih (Natator depressus). Semua jenis penyu tersebut memiliki status dilindungi.

Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) mencatat, tempat-tempat peneluran penyu sisik ditemukan di sejumlah pulau di kawasan ini, seperti Pulau Penjaliran Timur, Peteloran Timur, Penjaliran Barat, dan Pulau Belanda.

International Union for Conservation of Nature/IUCN menetapkan penyu sisik sebagai hewan yang terancam punah. Di alam bebas, anak-anak penyu yang baru menetas menghadapi ancaman kematian dari hewan seperti biawak, burung, dan kepiting. Akan tetapi, ancaman terbesar penyu adalah manusia. Pembangunan daerah pesisir, termasuk di sejumlah gugusan pulau di Kepulauan Seribu, kian mengimpit habitat penyu sisik. Di samping itu, pembangunan *breakwater* di Kepulauan Seribu dapat juga menjadi ancaman jika tanpa mempertimbangkan pola pergerakan penyu sisik.

2.2.2.3. Tumbuhan Hias dan Penghasil Pangan

DKI Jakarta memiliki beberapa jenis flora yang dibudidayakan pada areal budidaya yang luasnya sangat terbatas dan ekosistem pekarangan. Walaupun hanya sebagian kecil warga DKI yang memiliki areal pekarangan namun ekosistem pekarangan dapat menjadi pilihan RTH yang mampu mengkonservasi keanekaragaman hayati secara ex-situ.

Pekarangan bagi Masyarakat Betawi merupakan tempat dimana aktivitas masyarakat Betawi sehari-hari terjadi. Menurut Nursyirwan (2015), dalam pengelolaan pekarangan di Masyarakat Betawi, terdapat setidaknya tujuh elemen kombinasi kearifan lokal yang dikelompokkan menjadi elemen fisik pekarangan dan aktivitas pekarangan. Elemen fisik mencakup pagar, tempat menjemur, bale, kandang ternak, tabunan, air, dan tanaman.

1. Pagar. Pagar yang ditemukan pada pekarangan Betawi di Setu Babakan memiliki 2 jenis yaitu pagar hidup yang terbuat dari tanaman dan pagar tak hidup yang terbuat dari material sintetis seperti besi, almunium, atau bambu. Saat ini pagar dibuat untuk alasan keamanan lingkungan dan juga batas kepemilikan tanah. Masyarakat Betawi menggunakan pagar atau jaro yang sederhana pada pekarangan hanya untuk menentukan batas antara tanah pribadi dengan jalan umum. Jaro berupa anyaman bambu setinggi satu meter yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk perbatasan antara tanah pribadi dengan jalan.

2. Tempat menjemur. Tempat menjemur yang ditemui di pekarangan sampel tidak memiliki zona tertentu atau bentuk yang khas. Tempat menjemur berguna untuk menjemur pakaian atau bahan makanan. Tempat menjemur dibuat dari dua batang bambu, kayu atau besi yang tengahnya dibentangkan tali, ada juga tempat menjemur modern yang terbuat dari alumunium dan bisa dipindahkan. Tempat menjemur sudah ada pada pekarangan masyarakat Betawi dulu, biasanya diletakkan pada area pribadi di bagian samping atau belakang pekarangan. Tempat menjemur dibuat permanen dengan bambu atau kayu yang jaraknya besar, tali yang digunakan adalah tali yang berasal dari kulit kayu.
3. Tabunan. Orang Betawi yang memiliki pekarangan yang cukup luas dan menanam berbagai macam tanaman mengumpulkan daun-daun kering dan gugur di sebuah lubang yang mereka buat disebut tabunan. Daun-daunan dan sampah tersebut kemudian dibakar dan didiamkan selama 3 hari untuk dijadikan pupuk pada tanaman.
4. Kandang ternak Kegiatan pertanian di pekarangan Betawi juga dilengkapi dengan kegiatan berternak seperti ternak ayam atau kambing. Masyarakat betawi memanfaatkan hewan ternak sebagai hobi dan untuk konsumsi sendiri. Oleh masyarakat Betawi, kotoran dari kandang ternak ayam, bebek, atau kambing dimanfaatkan sebagai campuran pupuk untuk pekarangannya.
5. Bale-bale. Bale-bale adalah tempat pemilik rumah bersantai dan bercengkrama, bentuknya seperti tempat tidur panjang yang terbuat dari bambu yang ditutupi dengan atap. Bale-bale merupakan tempat terjadinya interaksi sosial antar keluarga atau dengan tetangga.
6. Penampungan Air. Penampungan air yang ditemukan berupa kolam empang, tampungan air hujan, dan kolam buatan. Masyarakat Betawi di Setu Babakan menggunakan tampungan air hujan untuk menyiram tanaman di pekarangannya, pada beberapa pekarangan ditemukan tampungan air hujan dari ember plastik yang besar. Di pekarangan besar juga ditemukan salah satu pemilik rumah membuat tampungan air hujan yang diarahkan ke bawah tanah, sehingga kebutuhan air untuk pekarangannya tercukupi.

Saat ini, tentu hanya tersisa sedikit masyarakat Betawi yang masih memiliki areal pekarangan dan mengelola sebagaimana kearifan lokalnya. Oleh karena, yang tersisa sebaiknya dapat dipertahankan sebagai bagian dari upaya konservasi. Berdasarkan hasil survey BPTP DKI Jakarta, peran areal pekarangan dalam pelestarian keanekaragaman hayati cukup penting. Di empat wilayah Kota di DKI Jakarta, areal pekarangan yang ada di samping ada yang ditanamani tanaman hortikultura, rempah, dan tanaman pangan terdapat pula sebagian besar ditanami dengan tanaman hias. Sekurang-kurangnya terdapat 73 jenis tanaman hias yang menjadi komponen ekosistem pekarangan di DKI Jakarta.

2.2.3. Potensi Pemanfaatan

DKI Jakarta memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Keanekaragaman hayati tersebut memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat sebagai penyangga kehidupan dan pembangunan daerah. Pearce, dkk, (2002) membagi nilai kehati menjadi: (i). Nilai guna, yaitu nilai guna langsung (barang), nilai tidak langsung (jasa); dan (ii). Nilai non-guna (non- *use values*). Pengelompokkan nilai menurut Pearce ini akan digunakan karena lebih mudah untuk diterapkan dapat menilai manfaat kehati.

Nilai kehati yang berguna langsung dapat terdiri dari nilai konsumtif dan produktif yang dapat berbentuk makanan, obat-obatan, material bangunan, dan serat maupun bahan bakar. Sedangkan nilai tidak langsung adalah nilai jasa lingkungan dan antara lain dapat berupa pengolahan limbah organik, penyerbukan, regulasi iklim dan atmosfer maupun perlindungan tanaman dan siklus hara; maupun nilai keindahan dari kehati dan nilai yang dimanfaatkan bersama-sama dengan budaya dan spiritual masyarakat. Nilai non-guna terdiri atas nilai potensial/pilihan, nilai eksistensi. Nilai eksistensi merupakan nilai kehati di masa depan, karena keberadaannya akan bermanfaat untuk masa depan, meskipun secara spesifik belum diketahui pada saat sekarang. Nilai eksistensi akan memberikan kesempatan untuk generasi mendatang memperoleh pengetahuan sebagai modal kehidupan bagi generasi masa depan.

Tabel 2.43. Kategori Nilai Manfaat Keanekaragaman Hayati

KATEGORI NILAI KEHATI		BENTUK
Nilai Guna Langsung	• Nilai Konsumtif • Nilai Produktif	Pangan, obat-obatan, bahan bangunan, serat, bahan bakar
Nilai Guna Tidak Langsung	Nilai Jasa Lingkungan	a. Pengolahan limbah organik, penyerbukan, regulasi iklim dan atmosfer, perlindungan tanaman, siklus hara dan pemurnian air; b. Budaya, spiritual dan estetika (keindahan)
Nilai Non-Guna: • Nilai Pilihan (potensi) • Nilai Eksistensi		a. Nilai masa depan, baik sebagai barang atau jasa; b. Nilai keberadaan dan pengetahuan tentang keberadaannya

Sumber: IBSAP 2015-2020

Gambaran nilai keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.44. Nilai Kehati dan Contoh Pemanfaatannya

NO	NILAI KEHATI	CONTOH PEMANFAATAN
1	Nilai Konsumsi	Komoditas pertanian, perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan yang diperlukan oleh masyarakat DKI Jakarta. Walaupun dalam jumlah yang tebatas DKI Jakarta menghasilkan tanaman pokok padi, beberapa jenis tanaman sayuran/hortikultura seperti kangkung dan jagung. Komoditas perikanan didominasi oleh perikanan tangkap dan sedikit areal perikanan budidaya air patau di wilayah Teluk Jakarta
2	Nilai Produksi	Produksi komoditas pertanian terutama seperti sayuran (kangkung) dengan produksi mencapai 58.246 kwintal, buah mangga sebagai buah-buahan yang paling banyak diproduksi, yaitu: sebesar 60.002 kwintal; tanaman obat yang banyak dihasilkan, yaitu: jahe sebanyak 5.227 kg; serta tanaman hias, terutama anggrek menjadi tanaman hias yang paling banyak dibudidaya dengan jumlah produksi 109.065 tangkai. Produksi Sektor perikanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, terbagi ke dalam dua jenis yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi ikan tangkap mencapai 135.619 ton (96,88% dari jumlah produksi ikan di Provinsi DKI Jakarta) dan Jakarta Utara sebagai penyumbang terbesar dalam produksi ikan tangkap (134.404 ton atau 99,10% dari jumlah produksi ikan tangkap di Provinsi DKI Jakarta). Potensi nilai ekonomi produksi tanaman pertanian yang dihasilkan di wilayah DKI Jakarta relatif kecil, karena luasan areal yang sangat terbatas. Demikian pula dengan nilai produksi perikanan tangkap.
3	Nilai Jasa Lingkungan	Nilai jasa lingkungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta berupa: 1. Nilai Manfaat Wisata Kenekaragaman hayati yang ada di Provinsi DKI Jakarta juga memiliki potensi jasa lingkungan wisata yang potensial dan kecenderungan peningkatan nilai jasa lingkungan dari wisata alam terus mengalami peningkatan karena minat terhadap wisata alam dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada sangat tinggi. Berbagai destinasi wisata yang memanfaatkan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta, meliputi : Taman Nasional (TN) Kepulauan Seribu, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Hutan Lindung, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Kebun Binatang Ranggunan, *Sea World*, dan Akuarium Jakarta.

NO	NILAI KEHATI	CONTOH PEMANFAATAN
		Pemanfaatan produk jasa lingkungan tersebut diduga cukup besar. 2. Kemampuan sekuestrasi Karbon Tumbuhan yang berhijau daun termasuk *phytoplankton* memiliki kemampuan sebagai penyimpan karbon yang diambil dari karbondioksida di atmosfir. Karbondioksida (CO_2) merupakan gas penyusun atmosfir yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup dan limbah yang dilepaskan dari proses pembakaran. Senyawa ini dapat masuk kedalam tumbuhan hijau daun melalui fotosintesis dan memakainya sebagai bahan untuk membuat karbohidrat. Oleh karena itu, fotosintesis merupakan salah satu mekanisme penting pengambilan CO_2 dari atmosfer (Anonim, 2010) dan melalui fotosistesis tersebut karbon dapat masuk ke *pool* lain. Kemampuan setiap tanaman dalam menyerap CO_2 berbeda. *Samanea saman* merupakan spesies yang dapat menyerap CO_2 terbesar, yaitu: 28.488,39 kg/pohon/tahun, disusul oleh *Bauhinia purpurea* sebesar 11.662,89 kg/pohon/tahun, dan *Polyalthia longifolia* sebesar 6.304,92 kg/pohon/tahun (Dahlan, 2007; Gratimah, 2009; Yusuf, 2015). Jumlah C yang tersimpan dalam tubuh tanaman hidup (biomassa) pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO_2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman. Pengukuran jumlah karbon yang disimpan dalam tubuh tanaman hidup (biomassa) pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO_2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman. Potensi cadangan karbon di DKI Jakarta tersebar di ekosistem lamun, ekosistem mangrove, dan jalur hijau serta ruang terbuka hijau lainnya. Ekosistem lamun dan mangrove memiliki nilai manfaat karbon yang besar. 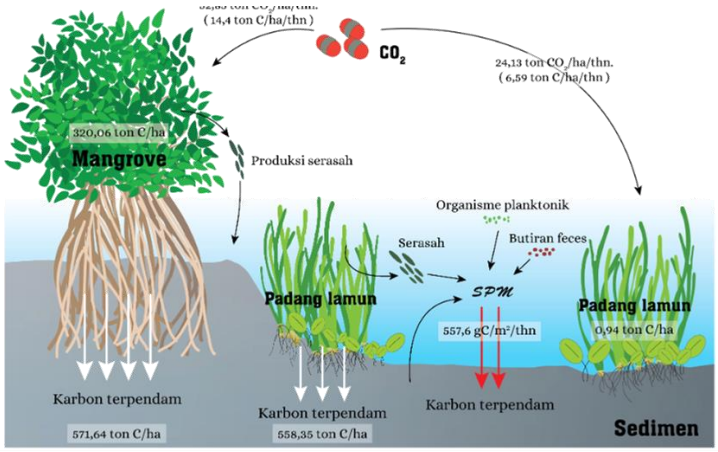

NO	NILAI KEHATI	CONTOH PEMANFAATAN
		Kemampuan sekuestrasi karbon ekosistem padang lamun sebesar 830 ton/ha, sementara luasan lamun di DKI Jakarta Menurut Gahzali (2014) tersebar di gugus Pulau Pari terdapat di Pulau Biawak dan Pulau Karang Kudus, Pulau Burung, dan Pulau Pari dengan total luasan 324.200 m^2. Potensi cadangan karbon dapat diduga sekitar 26,9 ribu ton. Pada ekosistem mangrove potensi cadangan karbon juga cukup besar. Kemampuan sekuestrasi karbon akan berdampak pada pencegahan bahaya perubahan iklim, disamping itu nilai ekonomi jasa lingkungan berupa cadangan karbon dapat diperoleh melalui mekanisme perdagangan karbon. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim (Perpres No. 46 tahun 2008). Kegiatan perdagangan karbon terjadi karena adanya pasar (*market*) terhadap karbon. Menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim (2013), pasar karbon adalah kumpulan kebutuhan/keinginan terhadap hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara ton/CO_2. 3. Jasa Lingkungan lainnya Jasa lingkungan lain dari keanekeragaman hayati yang ada di DKI Jakarta adalah penyaringan udara dan air, stabilitas pantai dan garis pantai, mitigasi banjir, moderasi iklim mikro, pengurangan kebisingan, dekomposisi, penyerbukan, pengaturan spesies hama, siklus hara, penyebaran nutrisi, infliltrasi air, manfaat kesehatan dan kesejahteraan, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai estetika (Elmqvist *et al*., 2004; *Millennium Ecosystem Assessment*, 2005).
4.	Nilai Pilihan	Berdasarkan data profil keanekaragaman hayati yang ada menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi keanekaragaman hayati yang baik. Tingginya potensi keanekaragaman hayati memberikan nilai pilihan atau nilai potensi yang terkait dengan potensi kehati dalam memberikan keuntungan bagi masyarakat di masa depan.
5.	Niiai Eksistensi	Nilai keberadaan Kawasan Konservasi Laut Kepulauan Seribu secara agregat sebesar USD 78.751,03/tahun

Hasil identifikasi jasa ekosistem yang ada di provinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45. Identifikasi Nilai Manfaat Ekosistem di Provinsi DKI Jakarta

No	Tipe Ekosistem	Tipe Jasa Ekosistem	Bentuk Barang/Jasa	Keterangan
1.	Terumbu Karang	*Provisioning services* (produk-produk yang diperoleh dari ekosistem)	▪ Karang hias ▪ Ikan Hias ▪ Ikan konsumsi ▪ Potensi senyawa Biofarmaka	Studi terhadap besarnya kesediaan membayar oleh masyarakat untuk konservasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove dalam Kawasan Konservasi Laut Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa kesediaan membayar rata-rata Rp. 146,5 ribu per kapita per tahun atau secara agregat sebesar USD 78.751,05, adalah nilai yang cukup layak untuk menggambarkan nilai eksistensi kawasan konservasi laut Kepulauan Seribu (Fauzi, dkk, 2007).
		Regulating services (jasa yang diperoleh dari proses pengaturan/ proses ekologis esensial dalam suatu ekosistem)	▪ Menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut ▪ Pelindung pantai dan pesisir ▪ Mengurangi pemanasan global	
		Cultural Services (jasa non-materi yang diperoleh dari suatu ekosistem)	▪ Wisata bahari ▪ Nilai Keindahan ▪ Ilmu Pengetahuan	
		Supporting Services (jasa-jasa pendukung yang diperlukan untuk memproduksi beragam jasa ekosistem)	Siklus mineral	
2.	Padang Lamun	*Provisioning services* (produk-produk yang diperoleh dari ekosistem)	▪ Sumber pangan ▪ Pakan ternak	Masyarakat di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua dan Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku memanfaatkan lamun sebagai makanan. Hasil analisis gizi bagian lamun *Enhalus acoroides* diperoleh hasil *rhyzoma*: Air 89,99%, Abu 0,79%, Lemak 0,52%, Protein 0,75% dan karbohidrat 4,16%. Sedangkan biji lamun: Air 92,16%, Abu 0,51%, Lemak 0,47%, Protein 0,68% dan karbohidrat 3,22%.

No	Tipe Ekosistem	Tipe Jasa Ekosistem	Bentuk Barang/Jasa	Keterangan
		Regulating services (jasa yang diperoleh dari proses pengaturan/ proses ekologis esensial dalam suatu ekosistem)	▪ Menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut ▪ Pelindung pantai dan pesisir ▪ Penyerapan karbon	Produksi ekosistem lamun di Indonesia pada beberapa lokasi sebesar 1.23-4.7 gC m^2 tahun-1. Kiswara (2009) mendapatkan nilai biomass jenis C*ymodocea serrulata* 30.62 gC/m^2 dan *Enhalus acoroides* 545.33 gC/m^2 di Pulau Pari, Teluk Jakarta.
		Cultural Services (jasa non-materi yang diperoleh dari suatu ekosistem)	▪ Wisata bahari ▪ Nilai Keindahan ▪ Ilmu Pengetahuan	
		Supporting Services (jasa-jasa pendukung yang diperlukan untuk memproduksi beragam jasa ekosistem)	▪ Siklus Hara ▪ Siklus Karbon	
3	Mangove	*Provisioning services* (produk-produk yang diperoleh dari ekosistem)	▪ Sumber pangan ▪ Pakan Ternak ▪ Biofarmaka/obat	Beberapa spesies mangrove dapat dijadikan sebagai tanaman obat seperti air rebusan kulit batang *Rhizophora* spp dipakai untuk astrigen, anti-diare dan anti muntah. Kulit batang yang sudah dilumatkan bila ditempelkan pada luka baru dapat menghentikan pendarahan luka. Potensi karbon pada hutan mangrove juga sangat tinggi. Kandungan karbon pada hutan mangrove primer lebih tinggi dibandingkan tipe tutupan lahan lainnya, yaitu sebesar 188,3 ton C/Ha lebih; hutan lahan kering primer hanya 123 ton C/ha. Mangrove sekunder 94,97 tob C/Ha.
		Regulating services (jasa yang diperoleh dari proses pengaturan/ proses ekologis esensial dalam suatu ekosistem)	▪ Menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota ▪ Pelindung pantai dan pesisir ▪ Penyerapan karbon	
		Cultural Services (jasa non-materi yang diperoleh dari suatu ekosistem)	▪ Wisata bahari ▪ Nilai Keindahan ▪ Ilmu Pengetahuan	
		Supporting Services (jasa-jasa pendukung yang diperlukan untuk memproduksi beragam jasa ekosistem)	▪ Siklus Hara ▪ Siklus Karbon	

No	Tipe Ekosistem	Tipe Jasa Ekosistem	Bentuk Barang/Jasa	Keterangan
4.	Hutan Pantai	*Regulating services* (jasa yang diperoleh dari proses pengaturan/ proses ekologis esensial dalam suatu ekosistem)	▪ Pelindung daratan	Hutan pantai alami di DKI Jakarta yang tersisa hanya terdapat di TNKs
		Cultural Services (jasa non-materi yang diperoleh dari suatu ekosistem)	▪ Wisata ▪ Nilai Keindahan	
5.	Hutan Kota/Taman Kota	*Regulating services* (jasa yang diperoleh dari proses pengaturan/ proses ekologis esensial dalam suatu ekosistem)	▪ Pengendalian Iklim mikro (Ameliorasi Iklim) ▪ Penyerapan polutan dan kebisingan ▪ Pengaturan Tata air ▪ Perlindungan keanekaragaman hayati/habitat satwa liar	Dedaunan tanaman dapat menyerap kebisingan sampai 95% (Grey and Deneke, 1978).
		Cultural Services (jasa non-materi yang diperoleh dari suatu ekosistem)	▪ Rekreasi ▪ Identitas kota	
		Supporting Services (jasa-jasa pendukung yang diperlukan untuk memproduksi beragam jasa ekosistem)	▪ Siklus Karbon	
6	Ekosistem Pekarangan & Budidaya	*Provisioning services* (produk-produk yang diperoleh dari ekosistem)	▪ Areal pekarangan dapat memproduksi pangan, buah-buahan, tanaman obat dan hias secara terbatas	
		Regulating services (jasa yang diperoleh dari proses pengaturan/ proses ekologis esensial dalam suatu ekosistem)	▪ Keindahan ▪ Identitas kota	

2.3. Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pemetaan permasalahan pengelolaan kenakeragaman hayati dilakukan dengan pendekatan kerangka pikir sebab-akibat untuk menguraikan hubungan/interaksi antara masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini popular dikenal sebagai analisis *Driver* (Pendorong), *Pressure* (Tekanan), *State* (Status), *Impact* (Dampak) and *Response* (Respons) disingkat DPSIR.

Status keanekaragaman hayati di kota-kota besar seperti DKI Jakarta sangat ditentukan oleh faktor pendorong dan penekan. Faktor pendorong terkait dengan kebutuhan manusia yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap status keanekaragaman hayati. Faktor pendorong yang teridentifikasi adalah peningkatan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, kelemahan penegakkan hukum, perubahan iklim, dan kondisi riset dan teknologi faktor pendorong tersebut menyebabkan terjadi dua permasalahan utama, yaitu: hilangnya habitat dan penurunan daya dukung pada habitat yang tersisa. Permasalahan utama seringkali disebut sebagai faktor penekan primer (*primary pressures*). Di samping penekan primer, berdasarkan hasil FGD dan observasi dapat diidentifikasi pula beberapa penekan sekunder terhadap status keanekaragaman hayati di DKI Jakarta, setidaknya terdapat penekan sekunder, yaitu: pencemaran lingkungan, ekspansi ruang terbangun/okupasi lahan, spesies alien dan perburuan liar, serta pemanfaatan berlebih.

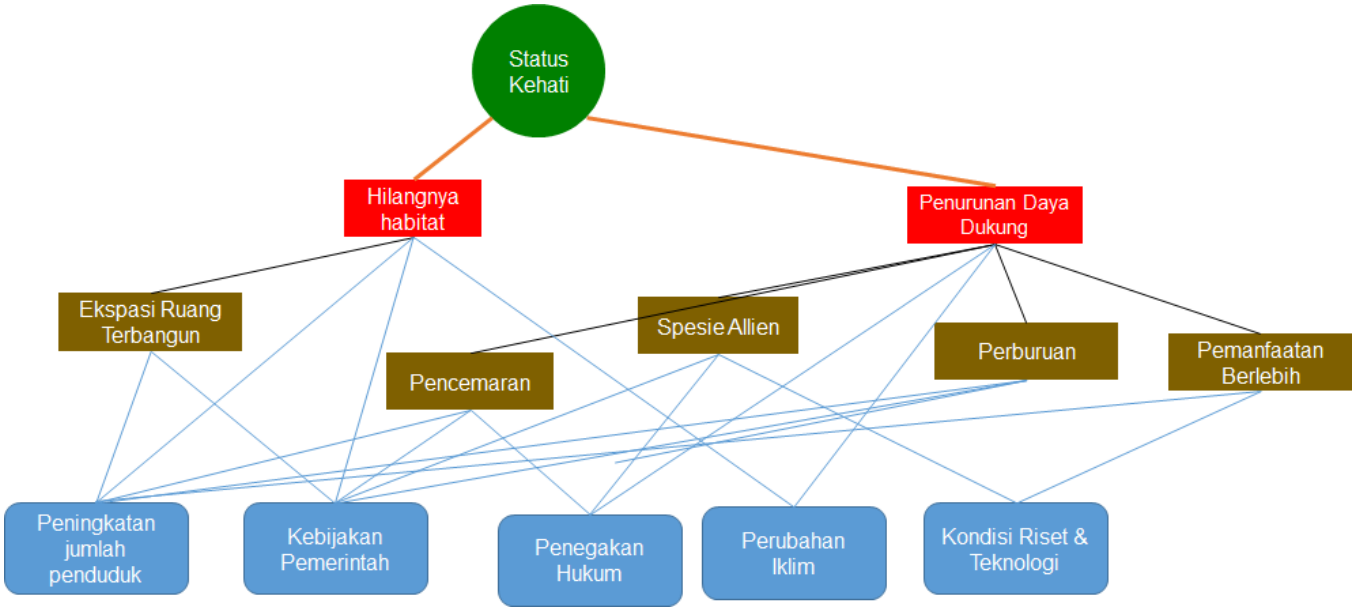

Gambar 2.49. Pendorong (*Drivers*), Tekanan (*Pressures*) dan Status (*State*) Keanekaragaman Hayati di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Gambar 2.49 menunjukkan hubungan sebab akibat antara pendorong, tekanan sekunder, tekanan primer, dan status keanekaragaman

hayati. Masing-masing pendorong telah menyebabkan terjadinya minimal dua tekanan sekunder/primer. Satu tekanan sekunder/primer dapat disebabkan oleh minimal satu pendorong. Sebagai contoh penurunan daya dukung habitat merupakan tekanan primer yang disebabkan oleh paling banyak penyebab, yaitu: enam macam penyebab tidak langsung/pendorong dan empat macam penyebab langsung/tekanan sekunder.

2.3.1. Faktor Penekan

Kondisi hilangnya habitat sebagai tempat hidup flora-fauna merupakan kecenderungan yang terjadinya akibat ekspansi ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau Publik di DKI Jakarta sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati yang paling penting di lingkungan perkotaan mengalami penurunan luas dari waktu ke waktu.

Kondisi eksisting RTH Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1972 mencapai sekitar 19,14%, kemudian pada tahun 2015 berdasarkan data dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) menunjukkan penurunan luasan RTH Jakarta menjadi 9,97%. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan sebaran RTH Publik sebesar 5.152 ha atau sebesar 7,8%. Luasan RTH ini masih terbatas pada RTH yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum termasuk RTH yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan RTH Privat. RTH tersebut tersebar di semua wilayah Administratif Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data luasan tersebut, luas RTH hijau masih sangat terbatas. Disamping luasan, fragmentasi RTH juga sangat tinggi sehingga patut diduga memberikan ruang yang tidak mendukung kehidupan satwa liar yang ada di dalamnya.

Kehilangan habitat terjadi akibat ekspansi ruang-ruang terbangun. Berdasarkan Citra satelit Tahun 2014, DKI Jakarta didominasi oleh ruang-ruang terbangun sehingga hanya menyisakan sedikit ruang terbuka hijau. Penutupan lahan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI/TIRS dengan akuisisi tanggal 13 September 2014 sebagaimana disajikan pada hasil penelitian Shamila (2017). Penutupan lahan hasil interpretasi data citra dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu: kelas badan air, vegetasi pohon, vegetasi non pohon, dan lahan terbangun. Kelas badan air mencakup sungai, kanal, waduk, danau, dan rawa. Kelas lahan terbangun mencakup daerah pemukiman, daerah industri, serta daerah komersial. Kelas vegetasi pohon berupa daerah yang didominasi oleh pohon seperti jalur hijau, hutan kota, kebun, maupun pekarangan yang ditumbuhi pepohonan. Kelas vegetasi non pohon berupa semak belukar, lapangan, padang rumput, sawah, ladang, serta taman. Pada tahun 2014, tutupan lahan berupa lahan terbangun seluas 47.559.3 ha dengan persentase 74,1%. Vegetasi pohon memiliki luas 10.234,6 ha dengan persentase 16,0%, vegetasi non pohon memiliki luas sebesar 4.933,9 ha dengan persentase sebesar 7,7%. Badan air memiliki luasan terendah yaitu sebesar 1.418,5 ha dengan persentase sebesar 2,2%.

Tingginya ekspansi ruang terbangun terjadi akibat peningkatan kebutuhan infrastruktur, akibat peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan tata ruang yang kurang berpihak terhadap perlindungan ruang terbuka hijau. Pembangunan kawasan perkotaan, kerap terlalu mengedepankan aspek ekonomis saja. Padahal, akibat tidak adanya RTH menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi juga tidak efisien. Misal, terjadinya bencana alam yang diakibatkan hilangnya RTH yang menghentikan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, lemahnya perencanaan, yang kurang memperhatikan/mempertimbangkan proses pembangunan dan pengelolaan menyebabkan keberadaan RTH di kawasan perkotaan dinilai masyarakat luas sebagai pemborosan dana dan malah menjadi lahan terbengkalai.

Di pihak lain, penurunan daya dukung pada habitat yang tersisa, di DKI Jakarta terutama diakibatkan oleh pencemaran, perburuan oleh manusia, kemunculan spesies alien, dan pemanfaatan berlebih. Tingkat pencemaran yang tinggi pada badan-badan air (sungai dan situ) mengakibatkan hilangnya keanekaragaman spesies aquatik baik tumbuhan maupun hewan. Demikian pula bentuk-bentuk pencemaran lainnya.

2.3.2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang menyebabkan tekanan pada status keanekaragaman hayati di DKI Jakarta adalah peningkatan jumlah penduduk, kebijakan pemerintah dan kelemahan penegakkan hukum, perubahan iklim, dan kondisi riset dan teknologi.

1. Peningkatan Jumlah Penduduk

Penduduk DKI Jakarta pada 2019 diproyeksikan mencapai 10,5 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 0,73% dari proyeksi jumlah penduduk pada 2018 yang sebanyak 10,4 juta jiwa. Berdasarkan BPS DKI Jakarta, pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan dari tahun 2016-2017 sebesar 0,94%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 1,05%. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka Jakarta merupakan kota terpadat di wilayah Negara Indonesia dan sudah melebihi kapasitas daya tampung penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk merupakan akar permasalahan lingkungan perkotaan. Peningkatan populasi penduduk di wilayah perkotaan tersebut menuntut peningkatan penyediaan infrastruktur perkotaan tersebut. Fenomena semacam ini pada akhirnya akan berakibat pada perubahan pengembangan lingkungan fisik dan tata kota yang lebih menekankan pada aspek ekonomi daripada aspek lingkungannya (termasuk nilai historisnya) yang mengakibatkan kota tersebut tidak nyaman, aman, indah, bersih, dan sehat untuk ditinggali.

2. Kebijakan Pemerintah dan Kelemahan Penegakan Hukum

Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia merupakan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan termasuk peristiwa kehilangan keanekaragaman hayati. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena aktivitas pembangunan jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Aktivitas pembangunan yang dilakukan kerap tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Akibat masih lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum, maka berdampak pada munculnya semua faktor penekan status keanekaragaman hayati, seperti ekspansi ruang terbangun, pencemaran, munculnya spesies invansif, perburuan, dan pemanfaatan yang berlebihan.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, merupakan faktor pendorong yang mengakibatkan hilangnya habitat dan berkurangnya daya dukung habitat yang tersisa. Tingginya variabilitas iklim, pergeseran awal musim dan adanya fenomena iklim ekstrim merupakan indikator terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global. IPCC (2007), mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan rata-rata dan atau variabilitas faktor-faktor yang berkaitan dengan iklim dan berlaku untuk satu periode yang panjang, umumnya puluhan tahun atau lebih. Perubahan iklim secara statistik didefinisikan sebagai perubahan kecenderungan baik naik atau turunnya dari unsur – unsur iklim yang disertai keragaman harian, musiman maupun siklus yang tetap berlaku untuk satu periode yang panjang. Perubahan iklim diukur berdasarkan perubahan komponen utama iklim, yaitu: suhu atau temperatur, musim (hujan dan kemarau), kelembaban dan angin. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, variabel yang paling banyak dikemukakan adalah suhu dan curah hujan (BMKG, 2011).

Perubahan iklim disamping akan berdampak pada eksistem terestrial, juga akan berdampak besar pada ekosistem perairan terutama daerah ekosistem pulau-pulau kecil dan pesisir seperti Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta, terhadap pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah adanya kenaikan muka air laut. Berdasarkan Data Beppenas (2013) data muka air laut tahunan Jakarta Utara tahun 1998–2013 terus mengalami kenaikan.

Tabel 2.46. Rata-rata Muka Air Laut di Jakarta Tahun 1998-2013

Tahun	Tinggi Muka Air Laut (cm)	Tahun	Tinggi Muka Air Laut (cm)
1998	90,08	2006	98,11
1999	92,89	2007	98,41
2000	93,30	2008	97,22
2001	92,05	2009	99,17
2002	95,89	2010	100,04
2003	93,97	2011	100,62
2004	94,88	2012	100,82
2005	97,18	2013	101,73

Sumber: Bappenas-Jakarta, 2013

Data tersebut jika diplot dalam grafik terlihat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.50.

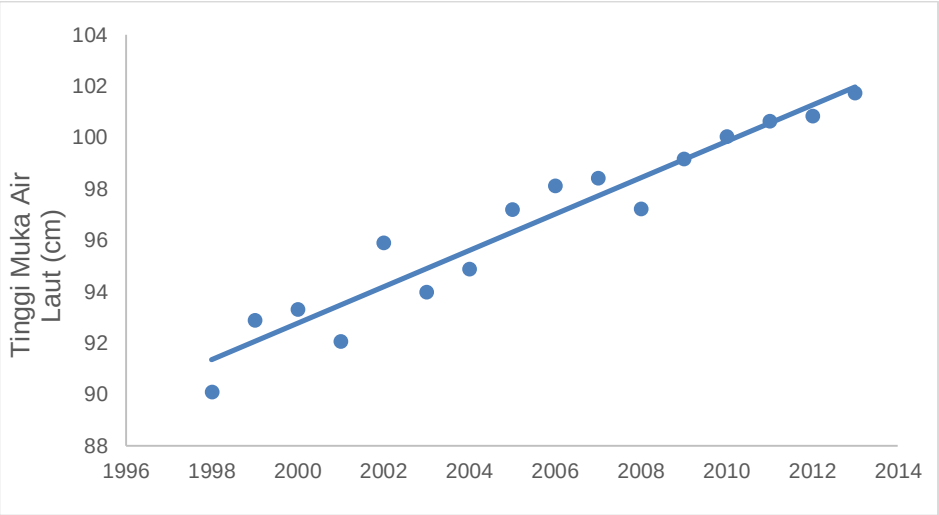

Gambar 2.50. *Trend* Kenaikan Muka Air Laut

Berdasarkan Gambar 2.50, diperkirakan terjadi *trend* kenaikan muka air laut sekitar 0,7 cm/tahun. Dengan demikian di Jakarta muka air laut akan naik sekitar 0,7 cm setiap tahunnya. Dampak dari kenaikan muka air laut adalah susutnya panjang garis pantai dan berkurangnya luas daratan karena tergenang oleh air laut, kondisi tersebut akan merubah kondisi keanekaragaman hayati yang ada.

4. Kondisi Riset dan Teknologi

Kondisi riset dan teknologi teridentifikasi sebagai salah satu pendorong menurunnya status keanekaragaman hayati. Penelitian dalam ekologis perkotaan diperlukan untuk mengidentifikasi tindakan konservasi penting. Perencanaan tata ruang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang intervensi

yang paling efisien dan efektif bagi konservasi keanekaragaman hayati berbasis karakter bioekologi tumbuhan dan satwa liar. Pengetahuan terkait bioekologi tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu topik riset yang jika dilakukan, setidaknya akan mengurangi tekanan terhadap status keanekaragaman hayati. Keperluan luasan RTH dan konektifitasnya untuk konservasi keanekaragaman hayati mutlak memerlukan informasi tentang bioekologi tumbuhan dan satwa liar. Kebutuhan riset dan teknologi juga terkait dengan perkembangbiakan beberapa spesies yang ditetapkan sebagai indentitas atau khas di DKI Jakarta dan dilindungi atau status konservasinya terancam punah, seperti: Elang Bondol, Bangau Bluwok, atau Penyu Sisik serta untuk penelitian tentang monitoring populasi dan kesehatan habitatnya.

Setiap kebijakan pembangunan memerlukan riset yang lengkap terkait dampaknya terhadap status keanekaragaman hayati, sebagai contoh pembangunan *breakwater* harus disertai kajian mendalam terhadap perubahan perilaku atau orientasi penyuk sisik untuk bertelur, atau pengaruhnya terhadap kesehatan habitat terumbu karang dan padang lamun.

Rendahnya kegiatan riset akan berdampak pada status keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta.

2.3.3. *State* (Status), *Impact* (Dampak) and *Response* (Respons)

Status keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta diidentifikasi melalui kegiatan survey primer, pemetaan partisipatif dalam rangkaian FGD dan pengumpulan berbagai pustaka pada institusi pemerintah pusat dan daerah, lembaga konservasi, dan lembaga peneltian seperti Balai Taman Nasional, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Pengembangan Teknologi Pertanian, Lembaga Konservasi pengelola Kebun Binatang Ragunan, Ancol, Aquarium Jakarta dan lain-lain serta data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan beberapa perguruan tinggi nasional. Sub-Bab “Potensi dan Kondisi Keanekaragaman Hayati” yang diuraikan sebelumnya merupakan rangkuman *State* (kondisi) dan *Impact* (dampak) yang dihasilkan dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut.

Respon merupakan tindakan telah dilakukan maupun yang diperlukan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pendorong dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Respon mecakup peraturan, kebijakan, program, maupun aksi yang dilakukan oleh para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Di DKI Jakarta respon untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan oleh banyak pihak.

Institusi Pemerintah Pusat seperti Balai TNKpS dalam merespon hilangnya habitat dan hilangnya daya dukung pada habitat yang tersisa telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek. Pada Tahun 2019 setidaknya telah dicapai beberapa sasaran kegiatan, yaitu:

1. Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
2. Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi
3. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)
4. Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air
5. Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air
6. Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah
7. Pengembangan ekowisata pada Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK Pariwisata

Demikian halnya dengan, BKSDA DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar baik didalam maupun diluar kawasan, pada setiap kawasan yang dikelola, BKSDA DKI Jakarta telah menyusun Rencana Pengelolaan yang intinya merespon faktor-faktor penekan yang muncul yang mengganggu status dan fungsi kawasan. Beberapa program yang dilakukan sebagai respon diantaranya adalah

1. Evaluasi kesesuaian fungsi kawasan
2. Penataan Blok
3. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam, seperti
    a. Identifikasi dan inventarisasi sebaran mangrove.
    b. Identifikasi dan inventarisasi sebaran burung.
    c. Identifikasi dan inventarisasi sebaran herpetofauna.
    d. Identifikasi dan inventarisasi primata.
    e. Identifikasi dan inventarisasi kupu-kupu.
    f. Identifikasi potensi biota air.
    g. Identifikasi potensi gangguan terhadap kawasan.
    h. Indentifikasi alien spesies.
    i. Survey potensi karbon.
    j. Monitoring jenis dan populasi burung.
    k. Monitoring jenis dan populasi herpetofauna
4. Pengawetan keanekaragaman hayati seperti pembinaan habitat satwa, pemantauan dampak lingkungan, pembibitan jenis tanaman endemik, pengendalian tumbuhan dan satwa pengganggu (*invasif species*), Rehabilitasi kawasan (penanaman), pembinaan *feeding ground*, pembinaan populasi pohon sarang dan lain-lain

5. Pengembangan potensi dan sarana prasarana penunjang, serta
6. Partroli gangguan hutan
7. Pengembangan SDM dan kerjasama

Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dan dinas-dinas terkait lainnya telah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai respon terhadap faktor pendorong dan penekan terhadap status keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam rencana stategis atau dalam masterplan terkait beberapa program prioritas. Program dan kegiatan yang dapat diidentifikasi sebagai respon adalah:

1. Dinas Kehutanan
   a. Pengadaan Tanah untuk RTH Hutan
   b. Pembangunan RTH Hutan
   c. Pemeliharaan RTH Hutan
   d. Penataan RTH Hutan
   e. Pengamanan Hutan Kota, TPK dan Pos Peredaran, Patroli Pengawasan dan Pengendalian Terpadu RTH Hutan
   f. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan
   g. Pembinaan Saka Wana Bhakti
   h. Operasi Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar
   i. Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
   j. Penyusunan Kebijakan di Bidang Kehutanan
   k. Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman
   l. Pembangun an Ruang Terbuka Hijau Taman
   m. Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau
   n. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit
   o. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman
   p. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau
   q. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit
   r. Penataan RTH Taman
   s. Penataan RTH Taman Jalur Hijau
   t. Penataan RTH Kebun Bibit
   u. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit
   v. Pengadaan Makanan Satwa TMR
   w. Pengadaan Makanan Satwa TMR
   x. Pengadaan Makanan Satwa TMR
   y. Pengadaan Obat Satwa, dan lain-lain
   z. Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau

2. Dinas Lingkungan Hidup
   a. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah
   b. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai
   c. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk
   d. Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
   e. Inventarisasi Kerusakan Lingkungan di Kelurahan Pulau Panggang
   f. Pengadaan Prasarana Sarana Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

g. Pengolahan Air Limbah dan Pemeliharaan IPAL Laboratorium
h. Inventarisasi dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta
i. Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
j. Pemantauan Kualitas Lingkungan disekitar TPST Bantar Gebang dan SPA Sunter
k. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (emisi tidak bergerak)
l. Pengelolaan sampah dan pembangunan TPS limbah B3
m. Pembangunan kampung iklim
n. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati

3. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
   a. Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Kelautan
   b. Pembangunan kebun bibit
   c. *Urban farming*
   d. Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis
   e. Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
   f. Program Peningkatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan
   g. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Lembaga-lembaga konservasi, lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta kelompok swadaya masyarakat yang bidangnya terkait dengan lingkungan juga memiliki peran dalam merespons penurunan status keanekaragaman hayati, misalnya Lembaga Konservasi PT. Taman Impian Jaya Ancol, UPT Kebun Binatang Ragunan, LIPI, Yayasan Kehati dan Terangi, Kelompok Masyarakat Peduli Ciliwung, melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Selain dalam bentuk program dan kegiatan respon juga diberikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Respon kebijakan secara khusus dibahas dalam sub bagian potensi pengelolaan.

2.4. Potensi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Potensi pengelolaan keanekeragaman hayati di DKI Jakarta dapat ditinjau dari potensi kebijakan sebagai respon terhadap faktor-faktor pendorong dan penekan serta potensi kelembagaan.

2.4.1. Kebijakan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

Indonesia termasuk dalam kelompok Lima Negara dengan keanekaragaman jenis tumbuhan tertinggi di Dunia. Berdasarkan keanakeragaman jenis flora yang ada 55%-nya adalah flora endemik yang hanya dapat dijumpai di belahan Bumi

Indonesia. Menurut LIPI (2014) jumlah keanekaragaman jenis yang terdokumentasi terdiri dari 1.500 spesies alga, tanaman sporofit seperti jamur sebannyak 80.000 spesies, 595 spesies *lichen*, 2.197 spesies pakis, dan 2.197 spesies spermatophyta. Jumlah ini berkontribusi 15,5% dari total flora di dunia, sementara fauna terdiri dari 8.157 spesies vertebrata; mamalia, burung, reptil dan amfibi dan ikan; dan invertebrata seperti 1.900 spesies kupu-kupu yang berkontribusi 10% dari spesies fauna dunia. Kondisi keanekaragaman hayati tersebut menuntut upaya konservasi sumberdaya hayati dilakukan sebaik mungkin untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati yang ada. Di sisi lain, konservasi sumbedaya alam hayati saat ini dihadapkan pada suatu kondisi dan tantangan yang sangat berat karena berbagai hal. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pengelolaan keanaekaragaman hayati terus disempurnakan sebagai respon untuk memperbaiki kondisi dan tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati di masa yang akan datang.

Beberapa produk kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam hayati dapat disajikan sebagaimana matrik kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.47. Perkembangan Kebijakan Terkait Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

No	Kebijakan	Materi Yang Diatur
1	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	UU No 5 Tahun 1990 merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. UU ini mengatur pelestarian jenis, pengawetan jenis, dan pemanfaatan secara lestari jenis dan ekosistem. UU ini kemudian menjadi dasar pengaturan kawasan konservasi dalam bentuk Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA).
2.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	UU ini mengatur tentang sistem budidaya tanaman, termasuk upaya peningkatan produksi pertanian melalui pelestarian plasma nutfah pertanian, pemuliaan serta penyediaan bibit unggul tanaman. Keterkaitan dengan UU KSDAHE adalah dalam hal budidaya sumberdaya alam nabati yang yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secari lestari, selaras, serasi, dan seimbang. Termasuk pemanfaatan plasma nutfah, pengembangan varietas, dan perlindungan tanaman.

No	Kebijakan	Materi Yang Diatur
3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	UU ini mengatur tujuan dan lingkup kegiatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Melalui UU ini dapat dihindari masuk/keluar dan berkembangnya organisme penganggu baik tumbuhan maupun hewan ke wilayah atau ke luar Indonesia sehingga mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan serta berkembangnya penyakit berbasis hewan/tumbuhan.
4.	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-undang nomor 5/1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Undang-undang nomor 41/1999 mengatur sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal penetapan hutan, pemerintah menetapkan hutan Negara berdasarkan fungsi pokoknya yaitu konservasi, lindung dan produksi. Selaras dengan UU No 12 Tahun 1992, hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. UU Kehutanan dan UU KSDAHE memiliki keterkaitan yang sangat erat satu dengan lainnya. Keterkaitan yang utama diantara keduanya dapat diketehui melalui “definisi” hutan dan konservasi; tujuan penyelenggaraan dan fungsi kehutanan; penetapan kawasan hutan; pengelolaan dan pemanfaatan; penyerahan kewenangan dibidang kehutanan; dan keberadaan masyarakat hukum adat.
5.	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	UU ini mengatur perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman, termasuk kegiatan pemuliaan tanaman dan pembagian keuntungannya melalui sistem royalti.
6.	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan	UU ini mengatur pemanfaatan sumber daya genetik laut, khususnya sumber daya genetik ikan dan tindakan konservasi ikan yang meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.
7.	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati	Ratifikasi Protokol Cartagena mengatur perlindungan yang memadai dalam hal persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari pergerakan lintas batas organisme hasil modifikasi

No	Kebijakan	Materi Yang Diatur
		genetik (OHMG). Dengan protokol ini, setiap negara pihak akan mengatur lalulintas produk rekayasa genetik (PRG) dari ancaman pencemaran keanekaragaman hayati yang ada dalam yuridiksi nasional. Sebagai aturan turunannya telah diikeluarkan PP nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Produk Rekayasa Genetik. Keterkaitan antara Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan UU KSDHAE adalah terkait keanekaragaman hayati itu sendiri yang pengaturannya secara prinsip tidak jauh berbeda dengan UU KSDAHE, hanya saja ada beberapa hal yang belum disinggung diantaranya adalah terkait pengertian keanekaragaman hayati serta juga pengertian sumber daya genetik, material genetik, dan bioteknologi yang pada prinsipnya masuk dalam kategori sumber daya hayati dalam kerangka konvensi. Kemudian konvensi juga menyinggung tentang istilah konservasi in situ yang pada prinspinya adalah konservasi di lingkungan asli/alami dan konservasi ex situ yang adalah konservasi di luar habitat asli. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan maka yang menjadi catatan penting adalah bahwa konvensi melindungi dan mendorong upaya-upaya yang berkenaan dengan pemantapan sumber daya alam hayati untuk menghindarkan atau memperkecil dampak merugikan terhadap keanekaragaman hayati, melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktek-praktek budaya/tradisional, dan mendukung penduduk setempat untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya perbaikan kawasan yang rusak yang mana keanekaragaman hayatinya telah berkurang. Penekanan akan hal-hal tersebut nampaknya cukup penting untuk ditegaskan dalam UU KSDAHE agar penyelenggaraan setiap tindakan konservasi tidak hanya berfokus pada kegiatan konservasi semata tetapi seluruh elemen terkait seperti misalnya masyarakat setempat, masyarakat adat dan praktek tradisional. Konvensi juga menekankan

No	Kebijakan	Materi Yang Diatur
		pentingnya kerjasama antar negara dalam hal akses pada sumber daya genetik yang mencakup pengalihan teknologi namun tetap harus menghormati hak-hak milik intekektual apabila dalam teknologi tersebut telah memperoleh paten dan hak milik intelektual lainnya.
8.	Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*	ITPGRFA merupakan instrumen internasional di bidang pemanfaatan sumber daya genetik pertanian yang didalamnya mengatur transaksi tukar-menukar material genetik pertanian melalui Perjanjian Pengalihan Bahan Genetik *(Material Transfer Agreement- MTA).*
9.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	UU ini mengatur proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatannya menggunakan teknologi ramah lingkungan.
10.	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	UU ini mengatur mengenai pentingnya lingkungan hidup dimana lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah serta mengamanatkan pengaturan sumberdaya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Disamping itu, di dalam UU ini menyebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan yang dilakukan melalui konservasi, pencadangan sumberdaya alam dan atau pelestarian fungsi atmosfir. Konservasi sumberdaya alam yang dimaksud adalah kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam.
12.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	UU ini mengatur mengenai peternakan dan kesehatan hewan, diatur juga hal-hal terkait dengan konservasi satwa liar, yakni mengenai medik konservasi yaitu penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar. Kemudian diatur mengenai sumber daya

No	Kebijakan	Materi Yang Diatur
		genetik yang dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan. Sedangkan Pelestarian sumber daya genetik dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya. Dalam hal pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan UU KSDAE.
13.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati	Protokol Nagoya mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (*biopiracy*) dan mendorong penelitian yang berbasis *bioresources.* Protokol Nagoya merupakan perjanjian yang sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Keterkaitan antara Protokol Nagoya dengan UU KSDAHE adalah dalam beberapa hal. Protokol Nagoya menekankan pentingnya mengatur akses, pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terhadap beberapa pihak yang terkait, dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
14.	Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	UU ini mengatur konservasi Tanah dan Air meliputi upaya pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
15.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	UU ini mengatur urusan pemerintahan pusat dan daerah sehingga tercipta keseimbangan kepentingan nasional dan daerah yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan

No	Kebijakan	Materi Yang Diatur
		pemerintahan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan kegitan konservasi terdapat pembagian urusan kewenangan antara pusat dan daerah ditingkat provinsi ataupun kota/kabupaten.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan setelah undang-undang terdapat aturan perundang-undangan di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan gubernur serta peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa peraturan selain undang-undang yang terkait dengan korservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagai berikut:

A. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

B. Peraturan dan/atau Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Peraturan dan/atau Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Peraturan Menteri Kehutanan P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008–2018;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
5. PeraturanMenteri Kehutanan P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
6. Peraturan Menteri Kehutanan P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

D. Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur

1. Keputusan Gubernur Nomor 1796 Tahun 1989 Tentang Penetapan Salak Condet (*Salacca zalacca*) Dari Jenis Flora Dan Burung Elang Bondol (*Haliastur indus*) Dari Jenis Fauna Sebagai Identitas/Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 671 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

2.4.2. Potensi Kelembagaan Pengelola Keanekaragaman Hayati

Tanggung jawab pengelolaan keanekaragaman hayati tidak hanya terletak di tangan pemerintah, tetapi juga semua pihak. Pada saat ini banyak pihak yang terkait dengan penanganan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Untuk itu perlu disepakati pembagian kerja antar semua unsur. Di lingkup pemerintahan, pengelolaan keanakeragaman hayati dilakukan mulai oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota dan kabupaten sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diinventarisasi pembagian urusan terkait dengan konservasi sumberdaya alam hayati sebagaimana disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48. Pembagian Kewenangan Terkait dengan Kegiatan Konservasi

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kota/ Kabupaten
1	Penataan Ruang	a. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. b. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antarnegara	Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi.	Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota
2.	Kenekaragaman Hayati	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
3.	Pengelolaan Hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan g. Penatausahaan hasil hutan. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK); b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK); c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.	-

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kota/ Kabupaten
			g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m³/tahun. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.	
4.	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman hHtan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
5.	Pengelolaan DAS	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	
6.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mill dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara. d. Penetapan jenis ikan	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mill di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mill di luar minyak dan gas bumi.	

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kota/ Kabupaten
		yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.	c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	
7.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.
8.	Cagar Budaya	a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Pada Tingkat Pusat, saat ini setidaknya terdapat empat kementerian dan satu lembaga yang tugas pokok dan fungsinya langsung terkait dengan pengelolaan kenekaragaman hayati untuk melakukan upaya penelitian, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Kementerian dan lembaga (K/L) terkait

tersebut, adalah: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti); LIPI; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); dan Kementerian Pertanian (Kementan). Di samping itu terdapat lembaga terkait pengelolaan kehati yang sudah dibentuk, antara lain: Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) dan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (KNSDG).

Di Wilayah Administratif Provinsi DKI Jakarta, pemangku kepentingan atau lembaga pengelola dan pemanfaatan keanekaragaman hayati terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat peran berbagai pihak dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, antara lain peran perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya, pihak swasta pengelola kenakeragaman hayati/kawasan konservasi ek-situ, serta organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional atau komunitas-komunitas masyarakat yang peduli terhadap keanekaragaman hayati.

Tabel 2.49. Pemangku kepentingan kehati di Provinsi DKI Jakarta

No	Instasi	Uraian Tupoksi
1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : ▪ Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dinas lingkungan hidup. ▪ Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas lingkungan hidup. ▪ Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan. ▪ Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan. ▪ Pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan. ▪ Penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL. ▪ Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca. ▪ **Pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah.** ▪ Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan. ▪ Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan. ▪ Pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah. ▪ Penelitian/pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat, dan ramah lingkungan. ▪ Pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota. ▪ Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah. ▪ Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja. ▪ Pemantauan, pengawasan dan pengendalian Limbah B3. ▪ Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan. ▪ Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan. ▪ Pemantauan kualitas lingkungan. ▪ Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup. ▪ Pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah. ▪ Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi; ▪ Pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		▪ Pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan; ▪ Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. ▪ Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. ▪ Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. ▪ Pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup. ▪ Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah. ▪ Pelaksanaan standar pelayanan minimal. ▪ Pengelolaan informasi lingkungan hidup dan kebersihan. ▪ Pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang lingkungan dan kebersihan. ▪ Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Lingkungan Hidup. ▪ Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup. ▪ Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup. ▪ Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian yang memiliki peran terdepan dalam pengelolaan keanekaragam hayati, berdasarkan tugas, yaitu: ▪ Melaksanakan upaya konservasi keanekaragaman hayati. ▪ Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. ▪ Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan basis data keanekaragaman hayati.

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		▪ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Mitigasi dan Perubahan Iklim
2.	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehutanan, pertamanan dan pemakaman. Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi: ▪ Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kehutanan; ▪ Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kehutanan; ▪ Penyusunan kebij akan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kehutanan, pertamanan dan pemakaman; ▪ Perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kawasan hutan, taman, jalur hijau, pemakaman, dan keindahan kota; ▪ Pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan,keindahan kota dan pemakaman; ▪ Pengkoordinasian penyediaan tanah hutan, hutan kota, taman dan jalur hijau dan pemakaman; ▪ Penyelenggaraan pelayanan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar; ▪ Penyusunan rancang bangun, data dan informasi ruang terbuka hijau; ▪ Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman; ▪ Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pada Dinas Kehutanan; ▪ Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman; ▪ Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ▪ kehutanan, pertamanan, keindahan kota dan pemakaman; ▪ Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kehutanan;

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		▪ Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kehutanan; ▪ Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kehutanan; dan ▪ Pelaporan dan pertanggungja aban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan
3.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kelautan	Melaksanakan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Untuk menjalankan tugasnya, DKPK menyelenggarakan fungsi: ▪ Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DKPKP; ▪ Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP; ▪ Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pembangunan pengembangan dan pembinaan kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pengendalian kesehatan hewan, ikan dan tanaman; ▪ Perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, ikan dan tanaman; ▪ Pemantauan dan pengendalian distribusi, ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan; ▪ Pengelolaan sistem informasi rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Fasilitasi pemasaran hasil rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		▪ Fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil; ▪ Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pengawasan dan pengendalian izin di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; ▪ Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang dkpkp; ▪ Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dkpkp; ▪ Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dkpkp; ▪ Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dkpkp.
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan. Uraian fungsi yang terait dengan konservasi keanekaragaman hayati adalah: ▪ Pembangunan, perlindungan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		▪ Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan lingkungan cagar budaya dan benda cagar budaya; ▪ pengembangan kawasan destinasi pariwisata dan perkampungan budaya lokal;
5.	Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi DKI Jakarta	BKSDA DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar baik didalam maupun diluar kawasan. Untuk melaksanakan tugas diatas BKSDA DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut: ▪ Penataan blok, penyusunan rencana, program, dan evaluasi pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar didalam maupun diluar kawasan. ▪ Pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar didalam maupun diluar kawasan. ▪ Perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati didalam dan diluar kawasan. ▪ Perlindungan, pengamanan, dan penanggulangan kebakaran kawasan. ▪ Promosi dan informasi konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya, kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. ▪ Pelaksanaan bina wisata alam dan cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. ▪ Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6.	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai UPT Ditjen PHKA di daerah sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional, tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional adalah : ▪ Melaksanakan pengelolaan Taman Nasional dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ▪ Menyusun rencana, program dan evaluasi pengelolaan Taman Nasional. ▪ Pengelolaan Taman Nasional.

No	Instasi	Uraian Tupoksi
		▪ Pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari Taman Nasional. ▪ Perlindungan, pengamanan dan penanggulangan kebakaran Taman Nasional; ▪ Promosi dan informasi bina wisata dan cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosist ▪ emnya. ▪ Kerjasama pengelolaan Taman Nasional. ▪ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Disamping lembaga pemerintah, potensi kelembagaan pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta juga berada di lembaga-lembaga swasta yang mengelola konservasi ek-situ seperti Taman Impian Jaya Ancol, Aquarium Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, dan keterlibat swasta lain pengelolaan keanekaragaman hayati. Potensi lembaga pengelola kehati lain adalah kelompok masyarakat peduli kehati. Potensi kelembagaan di lingkungan pemerintah DKI Jakarta secara umum telah ditopang oleh jumlah personil yang memadai dan dukungan sarana dan prasaran yang baik. Namun terkait pengelolaan keanekaragaman hayati masih memerlukan upaya-upaya penguatan kelembagaan.

Kebijakan dan kelembagaan merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan dan memiliki hubungan yang sangat erat. Dua hal ini harus beriringan dan saling menguatkan. Kebijakan yang bagus tetapi dilandasi pengembangan kelembagaan yang baik tidak akan membawa proses pengeloaan keanekaragaman hayati dengan hasil maksimal. Demikian juga sebaliknya, kelembagaan yang bagus tetapi kebijakannya tidak mendukung juga membuat tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta sulit dicapai sesuai harapan. Pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya alam menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan keanekaragaman hayati ditopang oleh kebijakan publik yang lengkap walapun tuntutan revisi terhadap kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem terus diupayakan dengan alasan masih terdapat hal-hal yang perlu diperkuat dalam hal pengaturannya seperti terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan keanekeragaman hayati pada tingkat genetic dan hal-hal lain sesuai dengan kemajuan pembangunan dan ilmu pengetahuan. Namun secara umum kebijakan tersebut telah cukup lengkap sebagai pijakan pengelolaan

keanekaragaman hayati. Di tingkat daerah, kebijakan pengelolaan keanekeragaman hayati memerlukan kelengkapan aturan kebijakan seperti peraturan untuk memperkuat posisi legal rencana induk pengelolaan keanekeragaman hayati sebagai instrumen pengelolaan yang harus dintergrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan di DKI Jakarta, dan aturan-aturan kebijakan lain sebagai pendukung seperti terkait dengan penetapan ruang terbuka hijau serta kawasan-kawasan yang bernilai konservasi penting.

Kompleksitan pengelolaan kenekaragaman hayati di DKI Jakarta memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan non pemerintah dalam mengantisipasi isu strategis pengelolaan keanekaragaman hayati serta prospek pemanfaatannya. Penguatan kelembagaan harus dilakukan secara beriringan. Penguatan kelembagaan tidak diartikan atau terbatas pada pembentukan organisasi yang memiliki tupoksi terkait keanekeragaman hayati saja, tetapi bagaimana membangun kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas organisasi mencakup:

1. **Penguatan SDM Keanekaragaman Hayati**

   Sumberdaya manusia adalah unsur pokok untuk mewujudkan penguasaan keanekaragaman. Pengetahuan dan keahlian pengeloalan keanekeragaman hayati perlu dimiliki oleh aparatur pemerintah di DKI Jakarta dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

   Pengembangan SDM dilakukan dengan fokus personel yang profesional dan memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta rekrutmen SDM. Peningkatan kesadartauan masyarakat terhadap keanekaragaman hayati di DKI Jakarta juga menjadi hal yang sangat penting. Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadartauan masyarakat adalah melalui pendidikan formal dengan memperkuat muatan pendidikan lokal terkait keanekaragaman keahati di DKI Jakarta, promosi kehati melalui brosur, poster di ruang-ruang publik atau sarana transportasi kota, serta melalui aktivitas media sosial dengan peran komunitas peduli kehati.

2. **Penguatan Infrastruktur dan Informasi**

   Pengembangan kelembagaan tidak berhasil kalau tidak ada keseimbangan informasi. Ketimpangan akses dan penguasan informasi (*information asymmetry*) menjadi salah satu penyebab gagalnya pencapaian tujuan pengelolaan atau pembangunan, Kunci konservasi keanekaragaman hayati di DKI Jakarta adalah membangun rantai informasi yang baik dari peneliti kepada perencana, kemudian birokrat dan politisi, serta *stakeholder* lain

Informasi memerlukan proses transformasi dan transfer yang memadai. Sarana dan prasarana penyebaran informasi sangat vital peranannya dalam mendukung pengembangan kelembagaan yang baik bagi pengeloaan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu pembentukan Balai Kliring di DKI Jakarta menjadi sebuah keharusan.

Mandat untuk membangun Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (BK kehati) tertuang dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, sedangkan pada tingkat nasional dimandatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum terbentuk Balai Kliring Kehati Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan BK Kehati sejak tahun 2002. Pemerintah DKI Jakarta dapat segera mengupayakan pembentukannya di daeran.

3. **Penguatan sumberdaya pendanaan**

DKI Jakarta merupakan daerah dengan pendapatan daerah tertinggi di Indonesia. Di bandingkan dengan alokasi anggaran untuk sektor lain, keberpihakan anggaran terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta masih sangat rendah. Namun demikian tidak berarti pengelolaan keanekaragaman hayati hanya bersumber dari anggaran pembangunan daerah. Beberapa sumber pendanaan yang menopang kegiatan pengelolaan keanekeragaman hayati diantaranya adalah:

a. **Anggaran pemerintah pusat**

Dana pemerintah pusat Khususnya dalam pengelolaan kawasan sumber keanekaragaman hayati yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Swaka Margasatwa yang ada di DKI Jakarta.

b. **Anggaran pemerintah daerah**

Merupakan sumber pendanaan yang dianggarkan di dalam APBD melalui program dan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah

c. **Dana Masyarakat Swasta dan Masyarakat Nasional**

Dana swasta memiliki kapabilitas yang cukup baik dari segi jumlah dana dan mekanisme pendanaannya. Dana swasta lokal tidak hanya terbatas kepada CSR ataupun investasi namun juga kepada institusi independen yang khusus dalam penanganan kehati seperti pendanaan yang dilakukan oleh Yayasan Kehati.

Dalam penggalangan dana masyarakat swasta pemerintah daerah dapat membentuk forum CSR yang menjadi wadah koordinasi dan singkronisasi dalam pengelolaan CSR yang bersinergi dengan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta.

d. Dana Masyarakat Swasta dan Masyarakat Internasional

Dana ini dalam bentuk hibah atau invesatasi yang dapat diakses baik oleh pemerintah atau kelompok masyarakat. Sumber dana internasional yang lazim digunakan adalah hibah luar negeri. Hibah Luar negeri secara global berasal dari dana bilateral dan multilateral. Untuk dana bilateral, beberapa negara maju telah melakukan kontribusi dalam bentuk hibah untuk membantu pengelolaan keanekerag- aman hayati. Beberapa contoh lembaga internasional yang memberikan hibah terkait keanekaragaman hayati adalah *Global Environment Facility* (GEF), *World Bank* (WB), *United Nation Development Program* (UNDP), *United Nation Environmental Program* (UNEP), *CBD Lifeweb Initiative* (CBD LI) dan Bank Jerman – KFW.

e. Sumber pendanaan lain.

Pemerintah DKI Jakarta dapat pula mengambil opsi pendanaan lain seperti skema perdagangan karbon atau melalui restribusi emisi karbon yang dikeluarkan sektor industri dan transportasi. Dana restribusi digunakan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati.

3 RENCANA PENGELOLAAN

Kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta mempertimbangkan Dokumen *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020, RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022, dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta dokumen perencanaan instansi terkait baik lembaga pemerintah pusat, maupun lembaga-lembaga konservasi eks-situ. Proses lain yang dijadikan masukan adalah berbagai hasil kajian terkait kondisi pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta, serta berbagai FGD dan pertemuan terkait pemutakhiran data status keanekaragaman hayati di DKI Jakarta.

Dalam rangka pengelolaan keanekeragaman hayati di DKI Jakarta dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.

3.1. Visi

Pernyataan Visi merupakan ungkapan keinginan atau harapan atau pandangan masa depan yang ingin dicapai semua pihak yang terkait (*stakeholders*) terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta. Dengan meletakkan visi bersama diharapkan keanekaragaman hayati yang ada dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan yang ditujukan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua". Visi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di DKI Jakarta sejalan dengan Visi Pemerintah DKI Jakarta yaitu:

"Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"

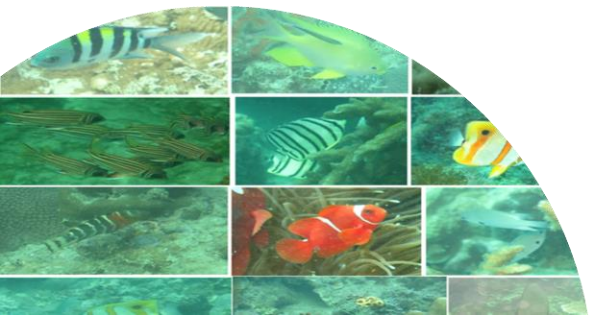

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi. Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang yang terkait erat dengan pengelolaan keanekaragaman hayati adalah

"Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial"

3.3. Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi serta memperhatikan permasalahan dan potensi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dihadapi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Penetapan tujuan dimaksudkan untuk menentukan arah sasaran dan kebijakan yang akan diambil serta program-program dan penjabaran kedalam kegiatan-kegiatan. Tujuan dan sasaran dijabarkan lebih lanjut, sebagai berikut :

Tujuan 1:

Mempertahankan daya dukung lingkungan untuk menjaga kemerosotan spesies dilindungi atau spesies terancam punah di dalam kawasan hutan

Sasaran :

1. Peningkatan kelentingan (resiliensi) ekosistem terumbu karang dan lamun
2. Rehabilitasi ekosistem Mangrove
3. Pembinaan Habitat dan Perlindungan Spesies dilindungi atau terancam punah
4. Pengendalian spesies asing, invasif dan/atau predator
5. Pengendalian faktor pengganggu di dalam kawasan hutan

Tujuan 2:

Meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di kawasan ekosistem esensial/kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya

Sasaran :

1. Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial untuk pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
2. Restorasi ekosistem riparian

3. Penanaman tanaman nusantara khas Jakarta, peningkatan budidaya dan pengembangan fungsi pekarangan (konservasi lekat lahan)
4. Pembangunan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi keanekaragaman hayati
5. Pengendalian pencemaran, alih fungsi dan perburuan untuk konservasi keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem esensial/kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya

Tujuan 3:

Meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan berbasis IPTEK dan kearifan lokal

Sasaran :

1. Pengembangan inovasi IPTEK yang menunjang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program melalui upaya partisipatif dan kolaboratif
4. Pengendalian konflik pemanfataan keanekaragaman hayati dan konflik satwa dengan masyarakat
5. Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

3.4. PROGRAM DAN RENCANA AKSI

Program dan rencana aksi yang dipilih dalam pencapaian visi dan misi pengelolaan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Program dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

VISI

Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 4

Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Tujuan 1

Mempertahankan daya dukung lingkungan untuk menjaga kemerosotan spesies dilindungi atau spesies terancam punah di dalam kawasan hutan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 1 **Peningkatan kelentingan (resiliensi) ekosistem terumbu karang dan lamun**									
1. Inventarisasi dan monitoring tutupan terumbu karang dan padang lamun	Dokumen hasil inventarisasi dan monitoring 1. Tersedia data jenis terumbu karang dan padang lamun 2. Tersedia data perkembangan % kondisi tutupan terumbu karang 3. Tersedia data perkembangan % tutupan padang lamun	●	●	●	●	●	Terlaksananya inventarisasi dan monitoring terumbu karang dan padang lamun, di lokasi: 1. Arboretum terumbu karang 2. Taman koleksi terumbu karang 3. Di sekitar *water break* dan kolam labuh 4. Wilayah lain dengan tutupan karang hidup dan lamun tinggi	1. Balai TNKpS 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kelautan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. Puslit Oseanografi LIPI

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
2. Rehabilitasi terumbu karang dan lamun	Tutupan terumbu karang hidup dan padang lamun meningkat	●	●	●	●	●	Terlaksananya rehabilitasi terumbu karang dan lamun, di lokasi: 1. Arboretum terumbu karang 2. Taman koleksi terumbu karang 3. Di sekitar *water break* dan kolam labuh 4. Wilayah lain dengan tutupan karang hidup tinggi		
3. Pemeliharaan hasil kegiatan rehabilitasi terumbu karang dan lamun	Keberhasilan transplantasi terumbu karang dan lamun	●	●	●	●	●	Terlaksanannya pemeliharaan transplantasi terumbu karang dan lamun		
Sasaran 2 **Rehabilitasi ekosistem mangrove**									
1. Inventarisasi dan pemetaan ekosistem mangrove	Tersedia data hasil analisis vegetasi dan data peta sebaran mangrove di 1. Taman Wisata Alam Angke Kapuk 2. Hutan Produksi dan Lindung Angke Kapuk 3. Suaka Margasatwa Muara Angke 4. Taman Nasional Kepulauan Seribu	●	●	●			Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan pemetaan ekosistem mangrove	1. BKSDA DKI Jakarta 2. OPD Penanggungjawab bidang Kehutanan 3. OPD Penanggung Jawab bidang Kelautan	OPD penanggungjawab Bidang Lingkungan Hidup

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
	5. Suaka Margasatwa Pulau Rambut 6. Cagar Alam Pulau Bokor 7. Pulau lain yang dianggap penting (Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Lancang Besar, Pulau Peteloran Barat, Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran Timur)								
2. Penyusunan rancangan teknis rehabilitasi ekosistem mangrove dan pembentukan Pokja mangrove	Tersedia dokumen rancangan teknis rehabilitasi ekosistem mangrove	●	●	●			Terlaksananya penyusunan rancangan teknis rehabilitasi ekosistem mangrove		
3.Rehabiltasi ekosistem mangrove	Peningkatan luas areal terehabilitasi mangrove	●	●	●	●	●	Luas areal rehablitasi mangrove		
4.Pengawasan dan penilaian rehabilitasi ekosistem mangrove	Peningkatan % keberhasilan hidup tanaman mangrove	●	●	●	●	●	Terlaksananya pengawasan dan penilaian keberhasilan hidup tanaman mangrove		
5. Pemeliharaan tanaman mangrove	Peningkatan tutupan lahan bervegetasi mangrove	●	●	●	●	●	Luas areal pemeliharaan tanaman mangrove		

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 3 **Pembinaan habitat dan perlindungan spesies dilindungi atau terancam punah**									
1. Pembinaan habitat peneluran penyu sisik	Peningkatan kualitas habitat penyu sisik	●	●	●	●	●	Terselenggaranya pembinaan habitat penyu sisik di seluruh lokasi peneluran penyu	1. Balai TNKpS 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kelautan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. Puslit Oseanografi LIPI
2. Translokasi biawak predator telur penyu sisik di TNKpS	Terlindunginya telur penyu sisik	●	●				Terselenggaranya kegiatan translokasi penyu sisik dari lokasi peneluran penyu sisik	Balai TNKpS	1. OPD Penanggung Jawab bidang Kelautan 2. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 3. BKSDA Prov. DKI Jakarta

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
3. Pembinaan habitat burung di SM Pulau Rambut dan SM Muara Angke	Peningkatan kualitas habitat burung di Pulau Rambut	●	●	●	●	●	Terselenggaranya pembinaan habitat burung di SM Pulau Rambut dan Muara Angke	BKSDA Prov. DKI Jakarta	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung jawab bidang kehutanan dan pertamanan 3. OPD Penaggung jawab bidang kelautan
4. Monitoring populasi penyu sisik	Data populasi penyu sisik	●	●	●	●	●	Terselenggaraya kegiatan monitoring populasi penyu sisik di 1. Pulau Penjaringan 2. Pulau Penteloran 3. Pulau lain di Luar Taman Nasional	1. Balai TNKpS 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kelautan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. Puslit Oseanografi LIPI
5. Pelepasliaran (*restocking*) spesies satwa liar elang bondol dan elang laut	Peningkatan populasi elang bondol dan elang laut	●	●	●	●	●	Jumlah pelepasliaran (*restocking*) spesies satwa liar	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
5. Pembangunan arboretum mangrove dan kebun bibit endemik	Tersedianya plasma nuffah mangrove	●	●				Terbangunnya kebun bibit dan arboretum mangrove di lokasi: 1. TWA Muara Angke 2. Kawasan hutan di Teluk Jakarta 3. Pulau Rambut dan Pulau Untung Jawa	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan 3. OPD Penanggung Jawab bidang Pertanian	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup
6. Pembangunan dan pemeliharaan saluran air pasang surut/hidrologi untuk mempertahankan ekosistem mangrove	Terpeliharanya salinitas optimal bagi ekosistem mangrove	●	●	●	●	●	Terbangun dan terpeliharanya saluran air pasang surut di SM Muara Angke dan kawasan hutan mangrove lainnya di pesisir utara Jakarta	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. OPD Penanggung Jawab bidang sumberdaya air	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan 3. OPD Penanggung Jawab bidang Kelautan
Sasaran 4 **Pengendalian spesies alien/invasif dan/atau predator**									
1. Identifikasi jenis dan sebaran spesies invasif	Terdapat data jenis dan sebaran spesies invansif	●	●	●	●	●	Terlaksanannya identifikasi jenis dan sebaran spesies invansif	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup
2. Monitoring dan pengukuran dampak spesies invansif terhadap keanekaragaman hayati	Teridentifikasinya dampak spesies invansif terhadap keanekaragaman hayati	●	●	●	●	●	Monitoring dan pengukuran dampak secara berkala		
3. Operasi pengendalian tumbuhan dan satwa liar di lindungi	Tidak terdapat pelanggaran terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar	●	●	●	●	●	Jumlah kegiatan operasi pengendalian	BKSDA Prov. DKI Jakarta	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD bidang Kehutanan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 5 **Pengendalian faktor pengganggu di dalam kawasan hutan**									
1. Mitigasi pencemaran dan perburuan di dalam kawasan hutan	Peta kerawanan dan mitigasi faktor pengganggu (potensi pencemaran dan perburuan) di dalam kawasan yang terdiri dari kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi	●					Terlaksanannya penyusunan mitigasi pencemaran, alih fungsi lahan, dan perburuan di kawasan konservasi dan hutan lindung	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. Balai TNKpS 3. OPD Penanggung Jawab bidang kehutanan	1. OPD Penanggung Jawab bidang lingkungan hidup 2. OPD Penanggung jawab bidang kelautan
2. Pemantauan kualitas lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan di hutan lindung daerah Teluk Jakarta dan Kawasan Konservasi (Taman Wisata Alam dan Taman Nasional)	●	●	●	●	●	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan (lingkungan perairan dan daratan)	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. Balai TNKpS 3. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan 4. OPD Penanggung jawab bidang kelautan
3. Inventarisasi kerusakan lingkungan	Terpantaunya kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung daerah Teluk Jakarta dan Kawasan Konservasi (Taman Wisata Alam dan Taman Nasional)	●	●	●	●	●	Baku mutu kerusakan lingkungan yang diinventarisasi		
4. Pengolahan sampah	Terbangunnya sarana penahan sampah ke laut dan pengolahan sampah di wilayah 1. TWA Angke Kapuk	●	●	●	●	●	Terbangunnya pengolahan sampah di 1. TWA Angke Kapuk 2. SM Muara Angke	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. Pengelola kawasan 3. OPD Penanggung Jawab bidang kebersihan	1. OPD Penanggung Jawab bidang kehutanan 2. OPD Penanggung Jawab bidang kelautan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penanggung jawab	Instansi Terkait
	2. SM Muara Angke 3. Hutan lindung dan Hutan Produksi Muara Angke						3. Hutan lindung dan Hutan Produksi Muara Angke		

Tujuan II :
Meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di Kawasan Ekosistem Esensial/ kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 1 **Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial untuk pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati**									
1. Identifikasi potensi pengembangan RTH (Hutan Kota & Taman Kota)	Tersedia data potensi dan peta rencana pengembangan RTH	●					Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi pengembangan RTH	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	1. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung jawab bidang tata ruang
2. Identifikasi Potensi Lokasi Pembangunan Taman Kehati	Penetapan lokasi Taman Kehati	●					Terlaksananya identifikasi potensi lokasi pembangunan Taman Kehati	1. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup 2. Forum Kolaborasi KEE	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan
3. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dalam bentuk hutan kota/taman kehati/kebun bibit	Terbitnya SK penetapan Kawasan Ekosistem Esensial		●				Jumlah kawasan yang ditetapkan	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	1. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung jawab bidang pertanian 3. Dir BPEE KLHK

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
4. Penyusunan DED Taman Kehati dan Hutan/Taman Kota	Tersedia dokumen detail pembangunan Hutan/Taman Kota atau Taman Kehati	●	●	●	●	●	Jumlah Dokumen DED sesuai dengan rencana pengembangan	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	1. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung jawab bidang Tata Ruang
5. Pembangunan Hutan/Taman Kota dan Taman Kehati	Terbangunnya Hutan/Taman Kota dan Taman Kehati	●	●	●	●	●	Jumlah Hutan/Taman Kota dan Taman Kehati yang terbangun	1. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan 2. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup	Semua pihak terkait
6. Pemeliharaan Hutan/Taman Kota dan Taman kehati	Keberhasilan pembangunan Hutan/Taman Kota dan Taman Kehati	●	●	●	●	●	Frekuensi kegiatan pemeliharaan	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	Semua pihak terkait
7. Peningkatan sarana dan prasarana kebun bibit DKI Jakarta	Meningkatnya fungsi perlindungan plasma nutfah di kebun bibit	●	●	●	●	●	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasana kebun bibit	OPD Penanggung Jawab bidang pertanian	Semua pihak terkait
Sasaran 2 **Restorasi ekosistem riparian**									
1. Naturalisasi sempadan sungai	Peningkatan keanekaragaman hayati pada sempadan sungai	●	●	●	●	●	Panjang sempadan sungai yang dinaturalisasi	1. OPD Penanggung jawab bidang sumberdaya air 2. BBWSCC	1. OPD Penanggung jawab bidang kehutanan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
									2. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup
2. Penghijauan kawasan ekosistem riparian	Peningkatan tutupan lahan di kawasan riparian	●	●	●	●	●	Jumlah tanaman penghijauan	1. OPD Penanggung jawab bidang sumberdaya air 2. OPD Penanggung jawab bidang kehutanan 3. BPDAS-HL Citarum-Ciliwung	OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup
Sasaran 3 **Penanaman tanaman nusantara khas Jakarta, peningkatan budidaya dan pengembangan fungsi pekarangan (konservasi lekat lahan)**									
1. Penanaman pengkayaan tanaman nusantara khas Jakarta	Pengkayaan tanaman nusantara khas Jakarta dan dilindungi atau terancam punah di areal budidaya/ pekarangan atau RTH/RTB	●	●	●	●	●	Jumlah jenis dan populasi tanaman nusantara khas Jakarta dan dilindungi atau terancam punah	1. OPD Penanggung jawab bidang kehutanan dan pertamanan 2. OPD Penanggung jawab bidang pertanian 3. OPD Penanggung jawab bidang sumberdaya air 4. OPD Penanggung jawab bidang kehutanan	BPTP Provinsi DKI Jakarta
2. Peningkatan koleksi tanaman nusantara khas Jakarta dan dilindungi atau terancam punah pada kebun bibit di DKI Jakarta	Meningkatnya jumlah koleksi tanaman nusantara khas Jakarta dan dilindungi atau terancam punah		●				Jumlah koleksi tanaman di kebun bibit		
4. Penanaman pengkayaan tanaman nusantara khas Jakarta dan dilindungi atau	Tertanamnya tanaman nusantara khas Jakarta dan dilindungi atau terancam	●	●	●	●	●	Jumlah jenis dan populasi		

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
terancam punah di bantaran sungai dan jalur hijau	punah di bantaran sungai dan jalur hijau							5. OPD Penanggung jawab bidang Lingkungan Hidup	
5. Pemuliaan tanaman tanaman nusantara khas Jakarta	Tersedian varietas unggul tanaman nusantara khas Jakarta	●	●	●	●	●	Jumlah varietas tanaman unggul yang dilepaskan		
6. Penanaman pengkayaan tanaman pakan satwa liar, dilindungi atau terancam punah	Peningkatan tutupan lahan dan kehati RTH	●	●	●	●	●	Jumlah jenis dan populasi		
7.Pembangunan Kampung Kehati dan *Urban Farming*	Peningkatan tutupan lahan dan kehati	●	●	●	●	●	Jumlah Kampung Kehati dan *urban farming*		
7. Peningkatan koleksi dan kualitas pemeliharaan flora/fauna oleh lembaga konservasi	Terpelihara dan meningkatnya koleksi flora/fauna yang dipelihara oleh lembaga-lembaga konservasi	●	●	●	●	●	Peningkatan koleksi dan kualitas pemeliharaan oleh lembaga konservasi 1. Taman Margasatwa Ragunan 2. Taman Impian Jaya Ancol 3. Taman mini Indonesia Indah 4. Aquarium Jakarta 5. TWA Angke Kapuk (PT Murinda Karya Lestari) 6.	Lembaga Konservasi	1. BKSDA Prov. DKI Jakarta 2. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 3. OPD Penanggung Jawab bidang kehutanan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 4 **Pembangunan konektivitas RTH perkotaan untuk konservasi keanekaragaman hayati**									
1. Identifikasi jalur migrasi satwa	Terpetakannya jalur migrasi satwa	●	●				Terlaksananya kegiatan identifikasi	1. OPD Penanggung Jawab bidang kehutanan dan pertamanan 2. BKSDA Prov. DKI Jakarta	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung Jawab bidang Tata Ruang
2. Penyusunan desain konektivitas RTH yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati	Terdapat disain yang menghubungkan antar RTH	●	●				Terlaksanannya penyusunan desain		
3. Pengelolaan kawasan migrasi satwa dan pembangunan koneksi konektivitas kawasan konservasi dan ekosistem yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati	Mengurangi fragmentasi habitat	●	●	●	●	●	Jumlah kawasan yang dikelola dan pembangunan koridor hewan		
4. Penanaman jalur hijau dan sepanjang jalur rel kereta api untuk mendukung konektivitas RTH	Peningkatan konektivitas RTH	●	●	●	●	●	Terlaksannya penanaman jalur hijau	OPD Penanggung Jawab bidang perhubungan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan 2. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 5 **Pengendalian pencemaran, alih fungsi dan perburuan untuk konservasi keanekaragaman hayati di Kawasan Ekosistem Esensial/kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan ekosistem budidaya**									
1. Kajian mitigasi pencemaran dan perburuan satwa liar di Kawasan Ekosistem Esensial	Peta kerawanan dan mitigasi pencemaran, dan perburuan di Kawasan Ekosistem Esensial	●					Terlaksanannya kegiatan kajian mitigasi pencemaran, dan perburuan di kawasan ekosistem esensial	OPD Penanggung Jawab bidang kehutanan dan pertamanan	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup
2. Pemantauan kualitas lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial atau kawasan bernilai penting bagi konservasi kehati	●	●	●	●	●	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan (lingkungan perairan dan daratan)	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup	1. OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan 2. OPD Penanggung jawab bidang kelautan
3. Inventarisasi kerusakan lingkungan	Kerusakan lingkungan di Kawasan Ekosistem Esensial atau kawasan bernilai penting bagi konservasi kehati	●	●	●	●	●	Kerusakan lingkungan yang diinventarisasi		
4. Patroli keamanan dan pengendalian peredaran satwa dan tumbuhan	Terjaganya kerusakan RTH oleh aktivitas perburuan atau lainnya	●	●	●	●	●	Terlaksananya patroli keamanan gangguan hutan	OPD Penanggung Jawab bidang kehutanan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung Jawab bidang Pertanian

Tujuan III
Meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan berbasis IPTEK dan kearifan lokal

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
Sasaran 1 **Pengembangan Inovasi IPTEK yang menunjang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan**									
1. Riset potensi plasma nutfah tanaman nusantara khas Jakarta dan spesies pada ekosistem marine dan mangrove	Tersedia data potensi plasma nutfah	●					Terlaksananya identifikasi potensi plasma nutfah	1. OPD Penanggung jawab bidang kehutanan dan pertamanan 2. OPD Penanggung jawab bidang Ketahanan pangan dan pertanian 3. BPTP Provinsi DKI Jakarta 4. Lembaga Penelitian	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup
2. Pengembangan areal sumber benih tanaman nusantara khas Jakarta, tanaman mangrove dan lamun	Terbangunnya areal sumber benih hasil penelitian	●	●	●	●	●	Jumlah benih hasil riset		
3. Riset daya toleransi dan ketahanbalikan ekosistem terumbu karang dan habitat penyu terhadap pengembangan ekowisata dan pembangunan pesisir serta penahan ombak	Data daya dukung dan ketahanbalikan	●					Terlaksananya kegiatan riset di Taman Nasional Kepulauan Seribu dan pulau-pulau di luar taman nasional/zona penyangga	1. Balai TNKpS 2. OPD Penanggung jawab bidang kelautan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD penanggung jawab bidang sumberdaya air

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
4. Riset daya dukung RTH dalam penyerapan emisi karbon untuk arahan kebijakan perluasan RTH, penetapan nilai manfaat ekonomi dan pemilihan jenis	Data kemampuan serapan RTH terhadap emisi karbon dan arahan pengembangan RTH berdasarkan kemampuan serapan emisi	●					Terlaksananya kegiatan riset RTH	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup	OPD Penanggung jawab bidang kehutanan dan pertamanan
4. Pembentukan Balai Kliring keanekaragaman hayati Daerah sebagai sumber informasi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Terbetuknya Balai Kliring kehati Daerah berdasarkan SK Gubernur	●					Terbentuknya Balai Kliring Kehati yang terdiri dari para wali data Kehati dan para pemangku kepentingan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung Jawab bidang komunikasi dan Informasi	Semua pemangku Kepentingan
5. Penelitian Pola Konflik Monyet Ekor Panjang	Terdeskripsinya pola konflik	●					Terselenggaranya kegiatan penelitian pola konflik	LIPI dan Perguruan Tinggi	Semua pemangku Kepentingan
6. Penelitian Bioekologi Spesies Bernilai Penting bagi Konservasi Hayati	Terdeskripsinya Bioekologi Spesies Bernilai Penting bagi Konservasi Hayati	●	●	●	●	●	Terselenggaranya kegiatan penelitian bioekologi spesies		
Sasaran 2 **Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati**									
1. Pelatihan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kehati	●	●	●	●	●	Jumlah kegiatan dan peserta pelatihan	1. OPD Penanggung Jawab bidang pengembangan SDM 2. Perguruan Tinggi	Semua pemangku Kepentingan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
2. Penyediaan sarana prasarana perlindungan Kehati	Penyediaan sarana prasarana perlindungan Kehati	●	●	●	●	●	Sarana dan prasarana tercukupi	Semua pemangku kepentingan	Semua pemangku kepentingan
3. Penguatan kebijakan terkait keanekaragaman hayati	Penetapan peraturan tentang: 1.Rencana Induk Pengelolaan Kehati 2.Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (taman kehati, kawasan perlindungan ekosistem riparian, arboretum mangrove, kebun plasma nutfah) 3.Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Daerah	●	●	●			Terbit peraturan terkait pengelolaan kehati	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup	Biro Hukum
Sasaran 3 **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi program melalui upaya partisipatif dan kolaboratif**									
1. Sosialisasi keanekaragaman hayati dan Konservasinya	Partisipasi masyarakat meningkat	●	●	●	●	●	Terlaksananya kegiatan sosialisasi melalui lembaga pendidikan, media sosial, diskusi, dll	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung jawab Bidang pendidikan 3. OPD Penanggung jawab Bidang Komunikasi Publik 4. Mitra Kehati	Semua pemangku Kepentingan

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
2. Pembinaan dan faslitasi Kegiatan komunitas peduli kehati	Terdapat komunitas masyarakat peduli kehati	●	●	●	●	●	Jumlah komunitas peduli kehati	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung jawab Bidang Kehutanan dan Pertamanan 3. BKSDA DKI Jakarta 4. Balai TNKpS	1. Kelompok masyarakat/Mitra Kehati 2. Lembaga Konservasi
3. Penghargaan terhadap program CSR Peduli Kehati	Peningkatan partisipasi dunia usaha dalam konservasi kehati	●	●	●	●	●	Jumlah kegiatan CSR dalam bidang konservasi kehati	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup	1. OPD Penanggung jawab bidang komunikasi publik 2. Biro Kerja Sama Daerah
Sasaran 4 **Pengendalian konflik pemanfataan keanekaragaman hayati dan konflik satwa dengan masyarakat**									
Kegiatan									
1. Penyusunan peta potensi konflik satwa dan masyarakat	Teridentifikasi potensi konflik	●					Terlaksananya penyusunan peta potensi konflik	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. OPD Penanggung Jawab bidang Kebencanaan 3. OPD Penanggung Jawab bidang Tata Ruang 4. BKSDA Provinsi DKI Jakarta
2. Penyusunan mekanisme penyelesaian konflik	Konflik kehati dapat diselesaikan	●					Jumlah konflik kehati yang dapat diatasi		

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
									5. Balai TNKpS 6. Lembaga Konservasi
3. Pembentukan Pokja dan Unit Penanganan Konflik Satwa dan Masyarakat	Terbentuk Unit *Rescue* penanganan konflik satwa dan masyarakat	●	●	●	●	●	Penyelesaian masalah konflik satwa dan masyarakat	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	Kelompok masyarakat
4. Pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa Liar (PSL)	Terbangunnya Pusat PSL	●					Terselenggaranya kegiatan pembangunan TSL	OPD Penanggung Jawab bidang Kehutanan dan pertamanan	1. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup 2. BKSDA Provinsi DKI Jakarat
Sasaran 5 **Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati**									
1. Pemanfaatan kearifan lokal untuk konservasi keanekaragaman hayati	Partisipasi masyarakat meningkat	●	●	●	●	●	Terpeliharanya kearifan lokal dalam pengelolaan kehati	1. OPD Penanggung Jawab bidang kebudayaan 2. OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup	Semua Pihak
2. Pembentukan kampung kehati berbasis kearifan lokal	Kampung kehati di wilayah Setu Babakan, Condet, pada ekosistem riparian lenteng agung	●	●	●	●	●	Terbentuk kampong kehati berbasis kearifan lokal		
3. Perlindungan cagar budaya dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pengembangan wisata	Terlindunginya cagar budaya dan berkembangnya destinasi wisata keanekaragaman hayati	●	●	●	●	●	Terlindungnya cagar budaya	1. OPD Penanggung Jawab bidang kebudayaan 2. OPD Penanggung Jawab bidang pariwisata	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup

Program/Rencana Aksi	Keluaran	Waktu Tahun Ke:					Indikator Kinerja	Peran Para Pihak	
		1	2	3	4	5		Penaggung jawab	Instansi Terkait
								3. BKSDA DKI Jakarta 4. Balai TNKpS 5. Lembaga Konservasi	
4. Pembinaan Kelompok Penakar TSL	Meningkatkan kemampuan penakar TSL	●	●	●	●	●	Terlenggaranya kegiatan pembinaan penakar TSL	1. BKSDA DKI Jakarta 2. OPD Penanggung jawab Bidang Kehutanan dan Pertamanan	OPD Penanggung Jawab bidang Lingkungan Hidup

4 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam Implementasi Rencana Induk Pengelolaan Kehati pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu pengelolaan yang dilaksanakan.

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkala, dilakukan pada lembaga/sektor terkait oleh unsur-unsur lembaga yang secara fungsional memiliki kewenangan di bidang tersebut. Bappeda akan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan RIP Kehati melalui mekanisme yang telah baku di lingkungan pemerintahan. Instansi lingkungan hidup di daerah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan RIP Kehati. Secara independen, masyarakat dan swasta juga diberikan keleluasaan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIP Kehati sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Program pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan RIP Kehati Upaya pemantauan dan evaluasi berfokus pada beberapa indikator yang dapat diukur. Tujuan dari pemantauan terhadap pelaksanaan RIP Kehati adalah sebagai berikut:

1. Menentukan derajat keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.
2. Memastikan bahwa berbagai rencana aksi/program kerja yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik
3. Mengukur bagaimana rencana aksi yang telah disusun berkontribusi dalam mencpai tujuan RIP Kehati

4. Mengidentifikasi penyebab rencana aksi gagal dilaksanakan
5. Sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan dan peningkatan kualitas RIP di masa yang akan datang.
6. Menentukan derajat keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.

Keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati diukur dari keberadaan keaneragaman hayati yang terhindar dari keterancamannya. Selain itu keanekaragaman hayati telah memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan bagi keaneragaman hayati. Untuk itu perlu melakukan kegiatan:

1. Pemantauan keberadaan spesies yang terancam punah
2. Membandingkan, menganalisis tingkat keterancaman spesies yang terancam punah
3. Menilai, menganalisis dan membandingkan keberadaan ekosisitem penunjang perlindungan spesies sepanjang waktu
4. Mengukur manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah dari aktivitas pemanfaatan keanekaragaman hayati dari keaneragaman spesies, genetik dan ekosistem yang ditargetkan
5. Memastikan bahwa berbagai rencana aksi/program kerja yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik

Pengendalian pelaksanakan RIP Kehati membutuhkan konsistensi yang tinggi Untuk itu segala persiapan program kerja harus dipersiapkan lebih dini yang menyangkut:

1. Tata kelola organiasi pelaksana yang menyangkut :
   a. Peraturan perundangan yang berlaku
   b. Organisasi pelaksana yang siap melaksanakan program kerja
   c. Sumberdaya manusia yang kompeten
   d. Standar operasional program yang menjadi acuan
2. Pendanaan yang mencukupi
3. Sarana dan prasarana
4. Dukungan para pihak
5. Mengukur bagaimana rencana aksi yang telah disusun berkontribusi dalam mencapai tujuan RIP Kehati

Dalam penyusunan RIP Kehati telah ditentukan keluaran dan standar kinerja suatu program. Oleh karena itu kontribusi diukur berdasarkan keluaran dan standar kinerja program. Selanjutnya dihubungkan dengan derajat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Kehati serta dengan misi yang diemban dalam pengelolaan Kehati DKI Jakarta. Maka dari itu, yang perlu dilakukan adalah:

a. Mengidentifikasi penyebab rencana aksi gagal atau tertunda
   Identifikasi penyebab kegagalan rencana aksi dilihat masing-masing program. Identifikasi dilakukan terhadap kekuatan, kelemahan secara internal dan ancaman dan peluang dari faktor eksternal sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan dan peningkatan kualitas RIP di masa yang akan datang

b. Evaluasi RIP dilakukan setiap 5 tahun baik untuk revisi program maupun untuk peningkatan kualitas RIP yang akan datang. Direncanakan pada Tahun 2022 akan disinkronisasi RIP Kehati yang telah disusun ini dengan RPJMD 2022-2027.

c. Akan disusun suatu Sistem Informasi dan Pengelolaan *Database* Kehati berupa Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Arthama, Pradana, 2015. Kajian Potensi Sumberdaya Setu Babakan DKI Jakarta Untuk Pengelolaan Ekowisata, (Bogor Agricultural University (IPB)Bogor Agricultural University (IPB)

Bappenas, 2003, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan for 2003- 2020*, Jakarta.

Baihaqi, A, *et al.* 2015. Geledah Jakarta, Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibukota. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta

Bengen, D.G.2013. Bio –Ekologi Terumbu Karang Status dan Tantangan Pengelolaan. dalam Coral Governance. IPB Press

Dahuri, R., 2003. Keanekaragaman Hayati Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Darma Adi, 2017. Model Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Secara Berkelanjutan Di Kepulauan Seribu. Pascasarjana IPB

Dinas Kehutanan DKI Jakarta, 2018. Masterplan Ruang Terbuka Hijau Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018-2038

Edy, S, Sultan, Y, Silvianita, T (editor). 2011. Terumbu Karang jakarta. Laporan Pengamatan Jangka Panjang Terumbu Karang Kepulauan Seribu (2005-2009. Yayasan Terumbu Karang Indonesia Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu The David and Lucile Packard Foundation

Giyanto, iet al. 2017. STATUS TERUMBU KARANG INDONESIA . COREMAP-CTI Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI

Handayani, AD, 2014, Analisis Hubungan Keragaman Pohon Dengan Jumlah Jenis Burung Di Ruang Terbuka Hijau Taman Monas, Jakarta. {skripsi}. Institut Pertanian Bogor

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015 – 2020. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Ghazali, IK, 2014. Distribusi Lamun Dan Mangrove Menggunakan Citra Satelit Worldview-2 Di Gugus Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Institut Pertanian Bogor

Kiswara, W. 2010. Studi Pendahuluan: Potensi Padang Lamun sebagai Karbon Rosot dan Penyerap Karbon di Pulau Pari, Teluk Jakarta. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia

Onrizal, Rugayah, Suhardjono, 2005. Flora Mangrove Berhabitus Pohon di Hutan Lindung Angke-*Kapuk Floristics of mangrove tree species in Angke-Kapuk Protected Forest*. BIODIVERSITAS, Volume 6, Nomor 1

Rickr,r, et, al. 2017. 5 Dekade LIPI di Teluk Jakarta : Review Penelitian Oseonografi di Teluk Jakarta 1970-2015. LIPI

Sekar, MC, Muhamdad A, Sam W (Ed tor), 2015. Keanekaragaman Hayati di Pulau Pari. LIPI

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi dan Kegiatan Penyusunan Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta

1. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Arboretum PIK, Jakarta Utara

Raja udang biru *(Alcedo coerulescens)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi / Yayasan KEHATI

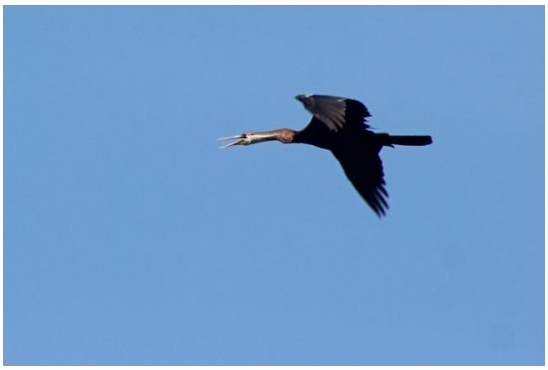

Pecuk ular Asia *(Anhinga melanogaster)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Biawak *(Varanus salvator)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi / Yayasan KEHATI

Bakau (*Rhizopora mucronata)*
Fotografer: Fajar Saputra/ Biodiversity Warrior KEHATI

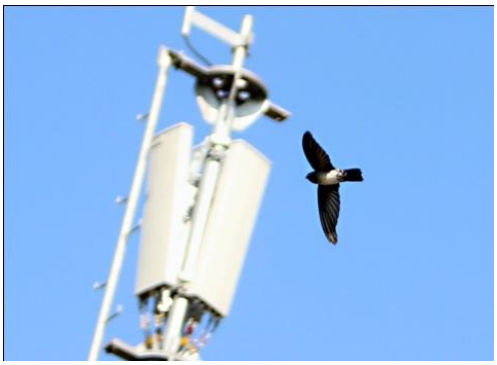

Walet linchi (*Collocalia linchi*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Raja udang meninting (*Alcedo meninting*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Remetuk laut (*Gerygone sulphurea*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Cipoh kacat (*Aegithina tiphia*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Sepah kecil (*Pericrocotus cinnamomeus*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Cabai jawa (*Dicaeum trochileum*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Burung madu kelapa (*Anthreptes malacensis*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

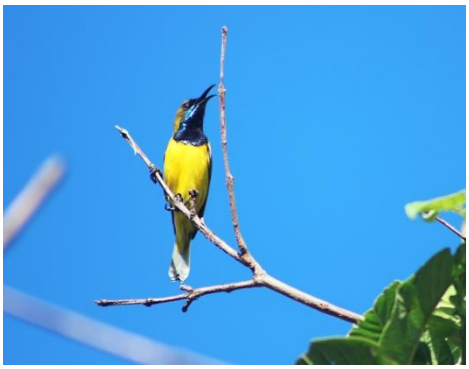

Burung madu sriganti (*Cinnyris jugularis*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Burung gereja erasia (*Passer montanus*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bondol peking (*Lonchura punctulata*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Cucak kutilang (*Pycnonotus aurigaster*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Merbah cerukcuk *(Pycnonotus goiavier*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Kipasan belang (*Rhipidura javanica*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Blekok sawah (*Ardeola speciosa*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Caladi tilik (*Dendrocopos moluccensis*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Capungsambar hijau (*Orthetrum sabina)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Capungsambar perutpipih *(Potamarcha congener*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Danaus chrysippus
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Eurema hecabe
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

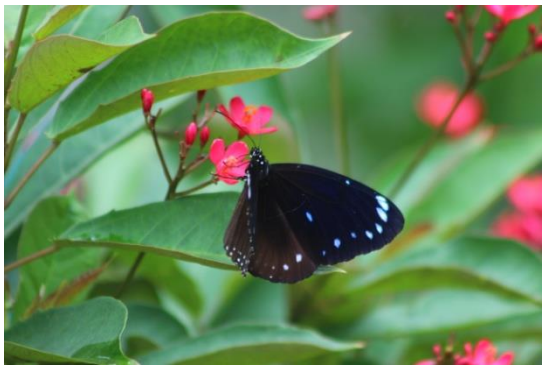

Euploea mulciber
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Hypolimnas bolina
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Appias alfferna
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bunglon taman (*Calotes versicolor*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bangkong kolong *(Duttaphrynus melanostictus)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bajing kelapa (*Callosciurus notatus*). Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Dokumentasi kegiatan

2. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan

Betet biasa *(Psittacula alexandri)*. Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Pantala flavescens
Fotografer: Ahmad Baihaqi/ Yayasan KEHATI

Papilio memnon
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Rambutan *(Nephelium lappaceum)*. Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Tekukur biasa (*Streptopelia chinensis*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Punai gading (*Treron vernans*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Cekakak sungai (*Todirhampus chloris*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kareo padi (*Amaurornis phoenicurus*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kekep babi (*Artamus leucorynchus*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kepudang kuduk hitam (*Oriolus chinensis*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

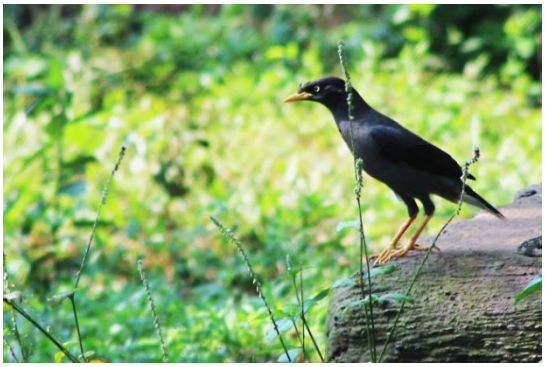

Kerak kerbau (*Acridotheres javanicus*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kerak ungu (*Acridotheres tristis*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kowak malam abu (*Nycticorax nycticorax*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Junonia hedonia
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

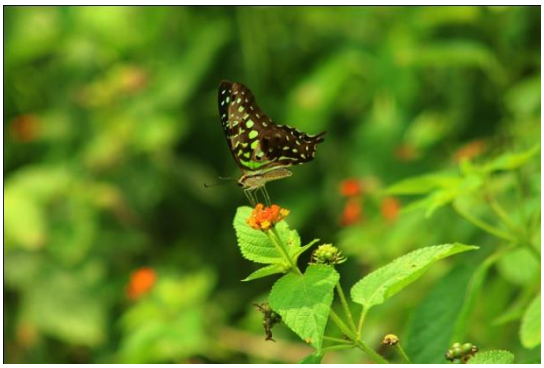

Graphium agamemnon
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Papilio memnon
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Appias olferna
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Dokumentasi kegiatan

3. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Hutan Kota Munjul, Jakarta Timur

Cucak kutilang *(Pycnonotus aurigaster)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Kadal kebun *(Mabouya multifasciata)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Capungsambar putih (*Zyxomma obtusum)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Karet kebo *(Ficus elastica)*
Fotografer: Ahmad Yusuf/Biodiversity Warriors KEHATI

Layang-layang batu (*Hirundo tahitica*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Brachythemis contaminata
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Tholymis tillarga
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Ictinogomphus decoratus
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Dokumentasi Kegiatan

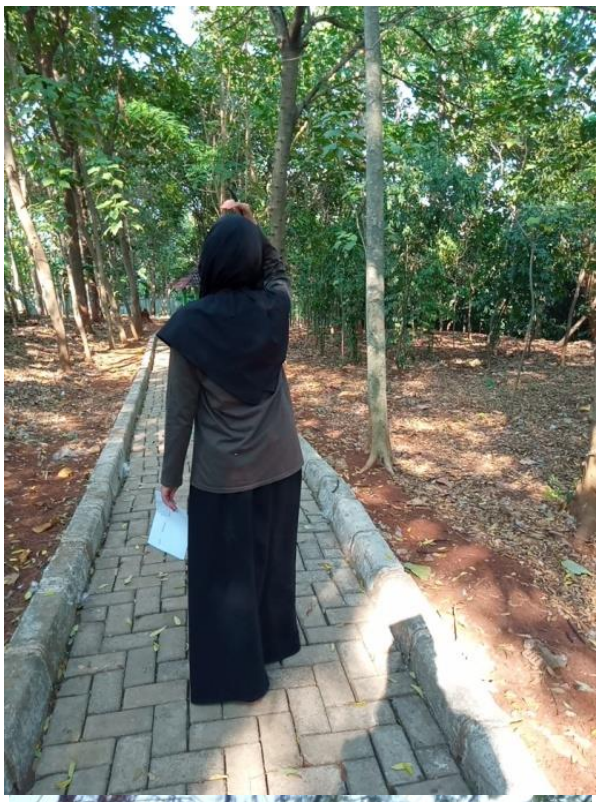

4. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Hutan Kota Sangga Buana, Jakarta Selatan

Raja udang meninting *(Alcedo meninting)*. Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bajing kelapa *(Callosciurus notatus)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Capung sambar hijau *(Orthetrum sabina)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Mangga *(Mangifera indica)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Catopsilia pomona
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Kacamata biasa (*Zoosterops palpebrosus*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Libellago lineata
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Crocothemis servilia
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Doleschallia bisaltidae
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

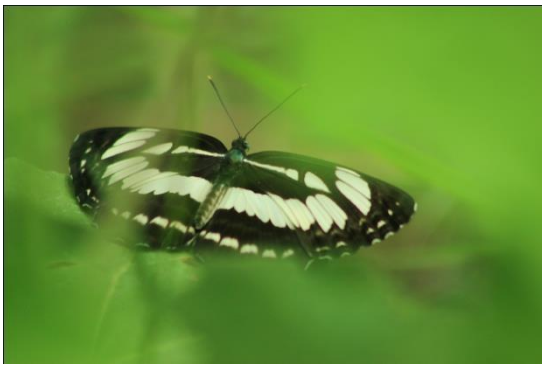

Neptis hylas
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

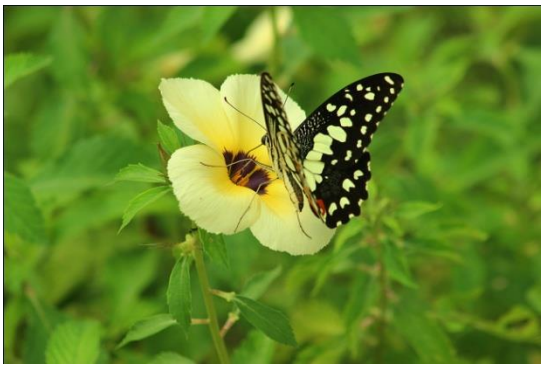

Papilio demoleus
Fotografer: Ahmad Baihaqi /Yayasan KEHATI

Dokumentasi kegiatan

5. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat

Burungmadu sriganti (*Cynniris jugularis)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Zizina otis
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bunglon taman *(Calotes versicolor)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Kersen *(Muntingia calabura)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bondol jawa (*Lonchura leucogastroides*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Bunglon surai (*Bronchocela jubata*)
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Ular pucuk (*Ahaetulla prasina*).
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Dokumentasi kegiatan

6. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Setu Babakan Jakarta Selatan

Merbah cerukcuk *(Pycnonotus goiavier)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Ictinogomphus decoratus
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Hypolimnas bolina
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Sawo duren *(Chrysophyllum cainito)*
Fotografer: Ahmad Yusuf/Biodiversity Warriors KEHATI

Dokumentasi kegiatan

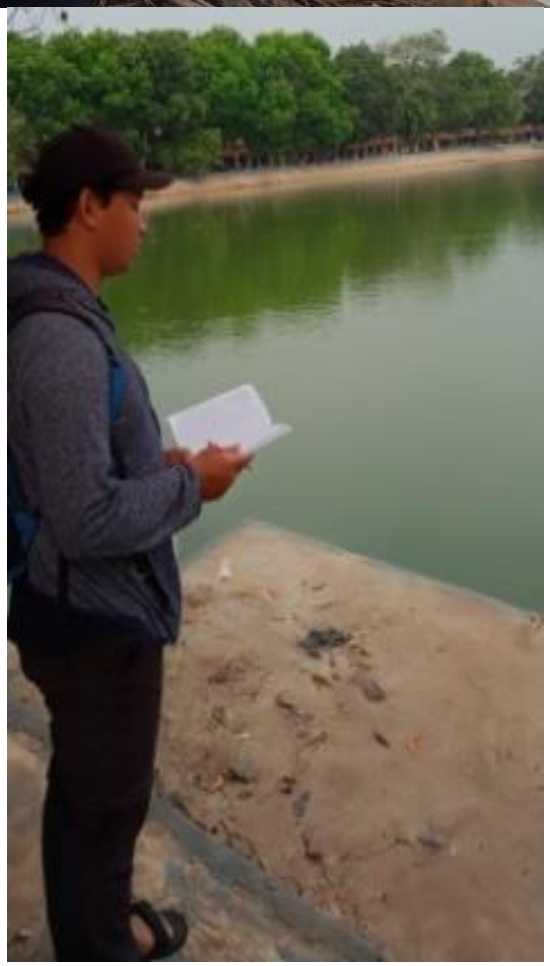

7. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Sungai Ciliwung Condet, Jakarta Timur

Cabai jawa *(Dicaeum trochileum)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Brachitemis contaminata
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Cekiber *(Draco volans)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Salak Condet *(Salacca zalacca)*
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Dokumentasi kegiatan

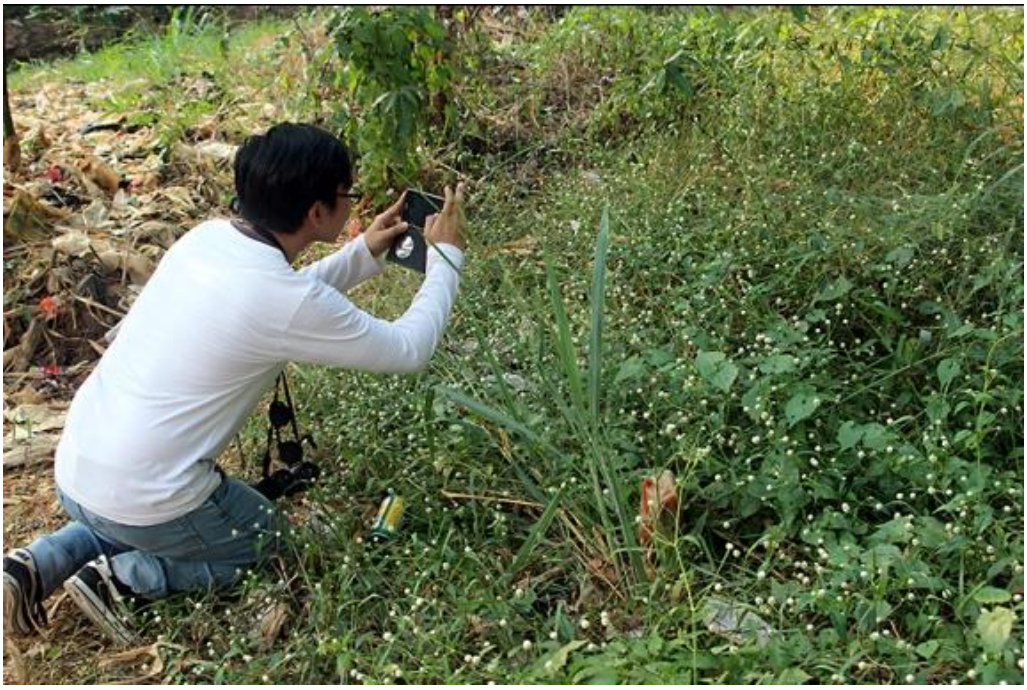

8. Keragaman Spesies Flora dan Fauna di Taman MONAS, Jakarta Pusat

Takur ungkut-ungkut *(Psilopogon haemachepala)*.
Fotografer:Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Pantala flavescens
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

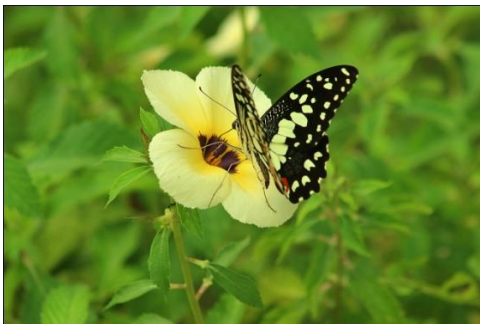

Papilio demoleus
Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Maja *(Aegle marmelos)*. Fotografer: Ahmad Baihaqi/Yayasan KEHATI

Dokumentasi kegiatan

9. **Kegiatan Koordinasi, *Focus Group Discussion* dan Paparan Laporan**

(a) Paparan Laporan Tanggal 16 Juli 2019

(b) Kegiatan Focus *Group Discussion* di Dinas Kehutanan Tanggal 30 Oktober 2019

(c) Kegiatan *Focus Group Discussion* di Dinas Lingkungan Hidup

Tanggal 07 November 2019

(d) Kegiatan *Focus Group Discussion* di BKSDA Tanggal 30 Oktober 2019

(e) Kegiatan Konsultasi Publik Tanggal 21 November 2019

Lampiran 2. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Ekosistem Riparian Lenteng Agung dan Bale Kambang

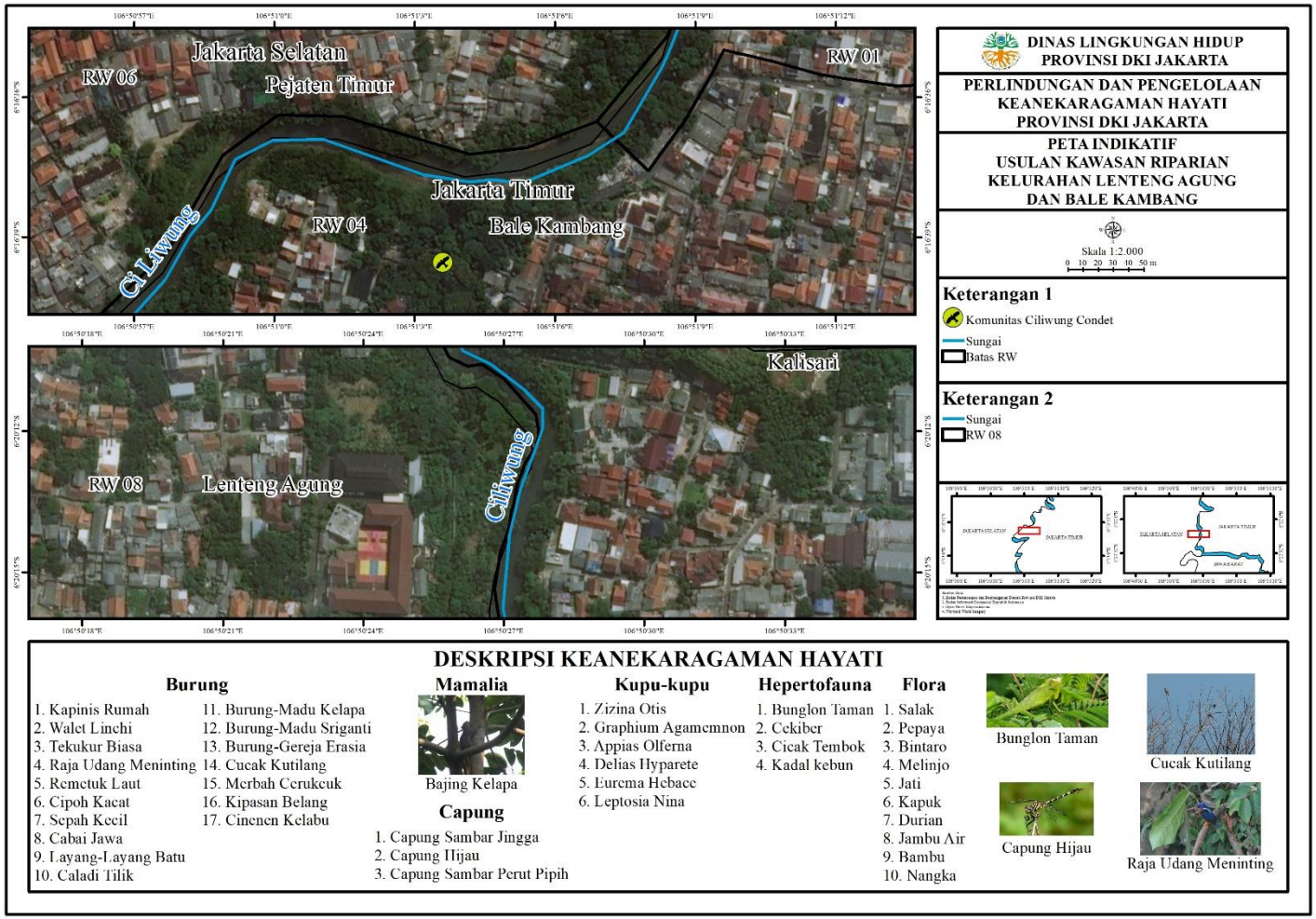

Lampiran 3. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Taman Monumen Nasional

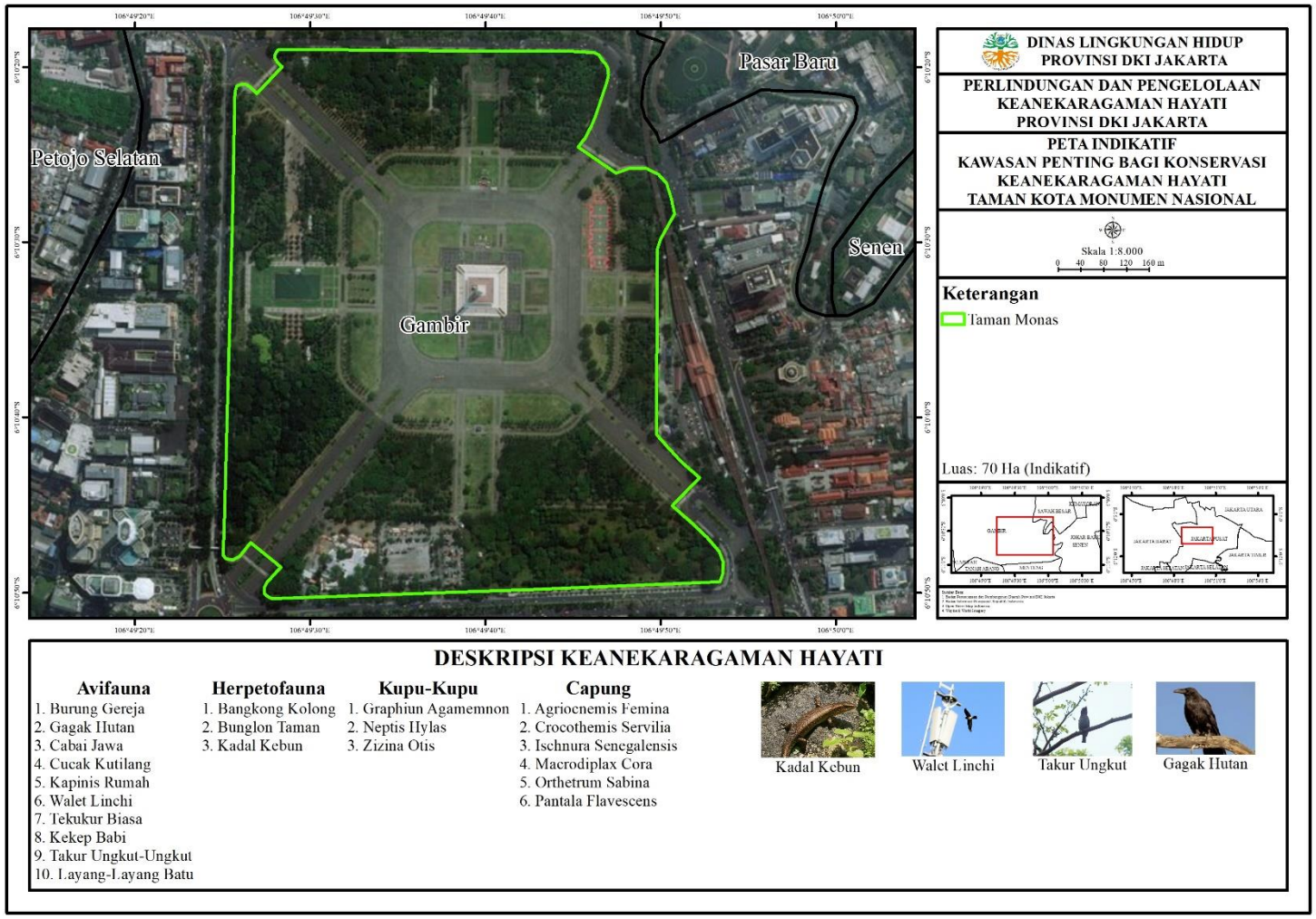

Lampiran 4. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Hutan Kota Munjul

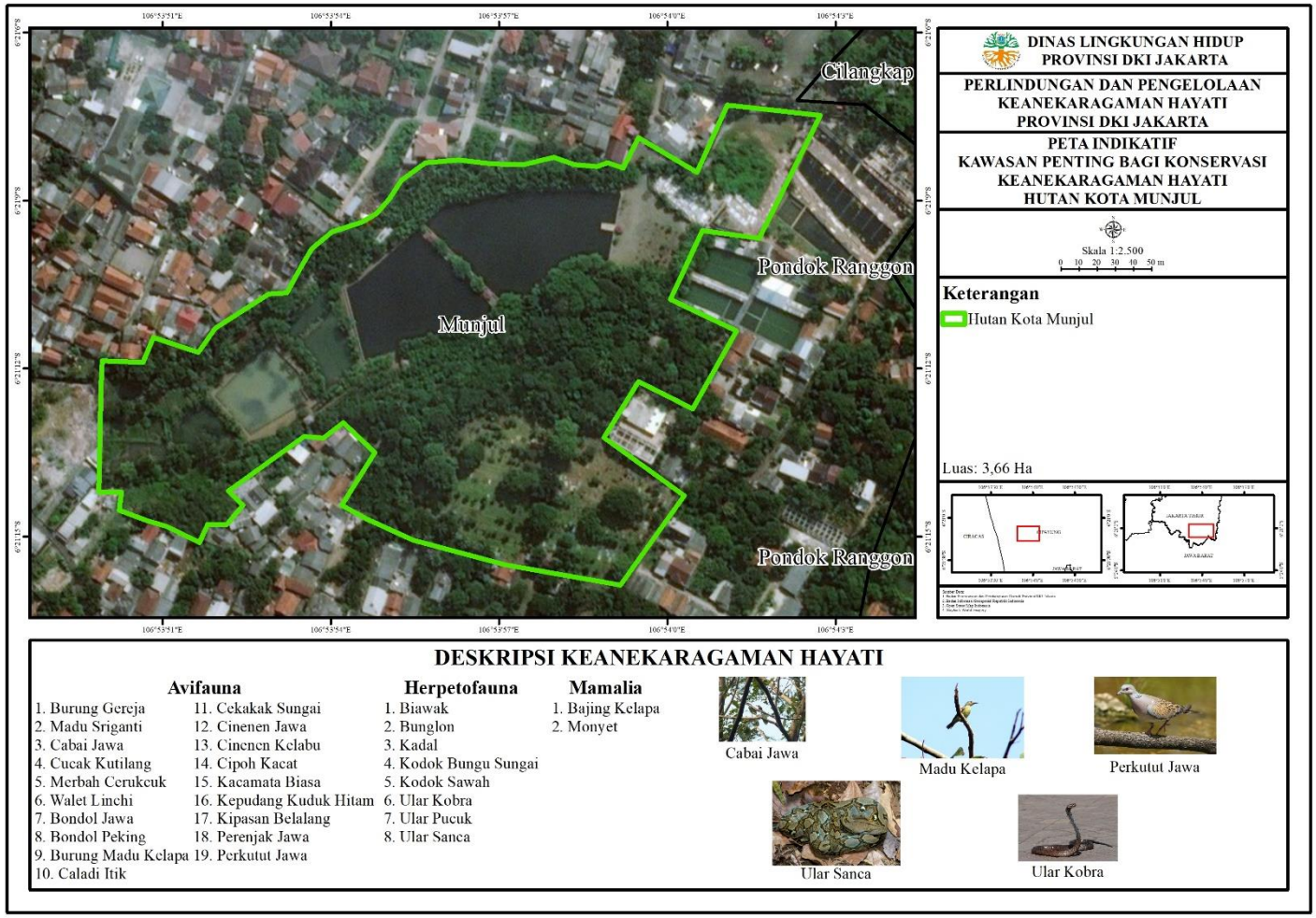

Lampiran 5. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Hutan Kota Srengseng

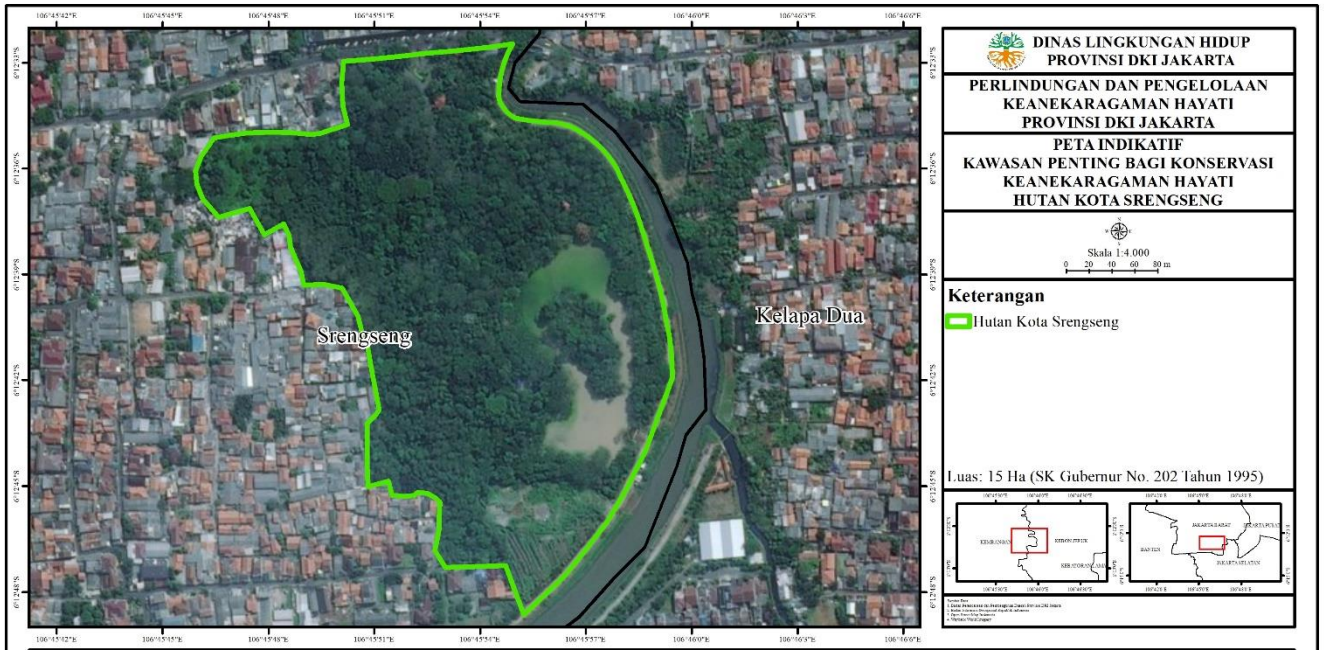

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI DKI JAKARTA

PETA INDIKATIF KAWASAN PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI HUTAN KOTA SRENGSENG

Skala 1:4.000
0 20 40 60 80 m

Keterangan

Hutan Kota Srengseng

Luas: 15 Ha (SK Gubernur No. 202 Tahun 1995)

DESKRIPSI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Avivauna

1. Bondol Peking
2. Gereja Erasia
3. Madu Kelapa
4. Madu Sriganti
5. Cabai Jawa
6. Cekakak Sungai
7. Cucak Kutilang
8. Cinenen Kelabu
9. Cinenen Pisang
10. Cipoh Kacat
11. Kapinis Rumah
12. Layang-Layang Batu
13. Merbah Cerukcuk
14. Perenjak Jawa
15. Walet Linchi
16. Wiwik Kelabu
17. Wiwik Uncuing

Mamalia

1. Bajing Kelapa
2. Cecadu Pisang Besar
3. Celurut Rumah
4. Codot Horsfield
5. Codot Krawar
6. Monyet Ekor Panjang

Herpetofauna

1. Bangkong Kolong
2. Bunglon Surai
3. Bunglon Taman
4. Cicak Tembok
5. Cicak Rumah
6. Kadal Kebun
7. Katak Pohon Bergaris
8. Kodok Puru Hutan
9. Kodok Tegalan

Kupu-kupu

1. Catopsilia Sp
2. Danaus Chrysippus
3. Delias Hyparete
4. Euploea Mulciber
5. Eurema Sp
6. Graphium Agamemnon
7. Hypolimnas Bolina
8. Junonia Hedonia
9. Papilio Memnon
10. Zizina Otis

Capung

1. Agriocnemis Femina
2. Crocothemis Servilia
3. Lathrecista Asiatica
4. Neurothemis Terminata
5. Orthetrum Sarbina
6. Orthetrum Sp
7. Potamarcha Congener
8. Zyxomma Obustum

Bondol Peking

Bangkong Kolong

Monyet Ekor Panjang

Lampiran 6. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Kawasan Ekosistem Mangrove Angke - Kapuk

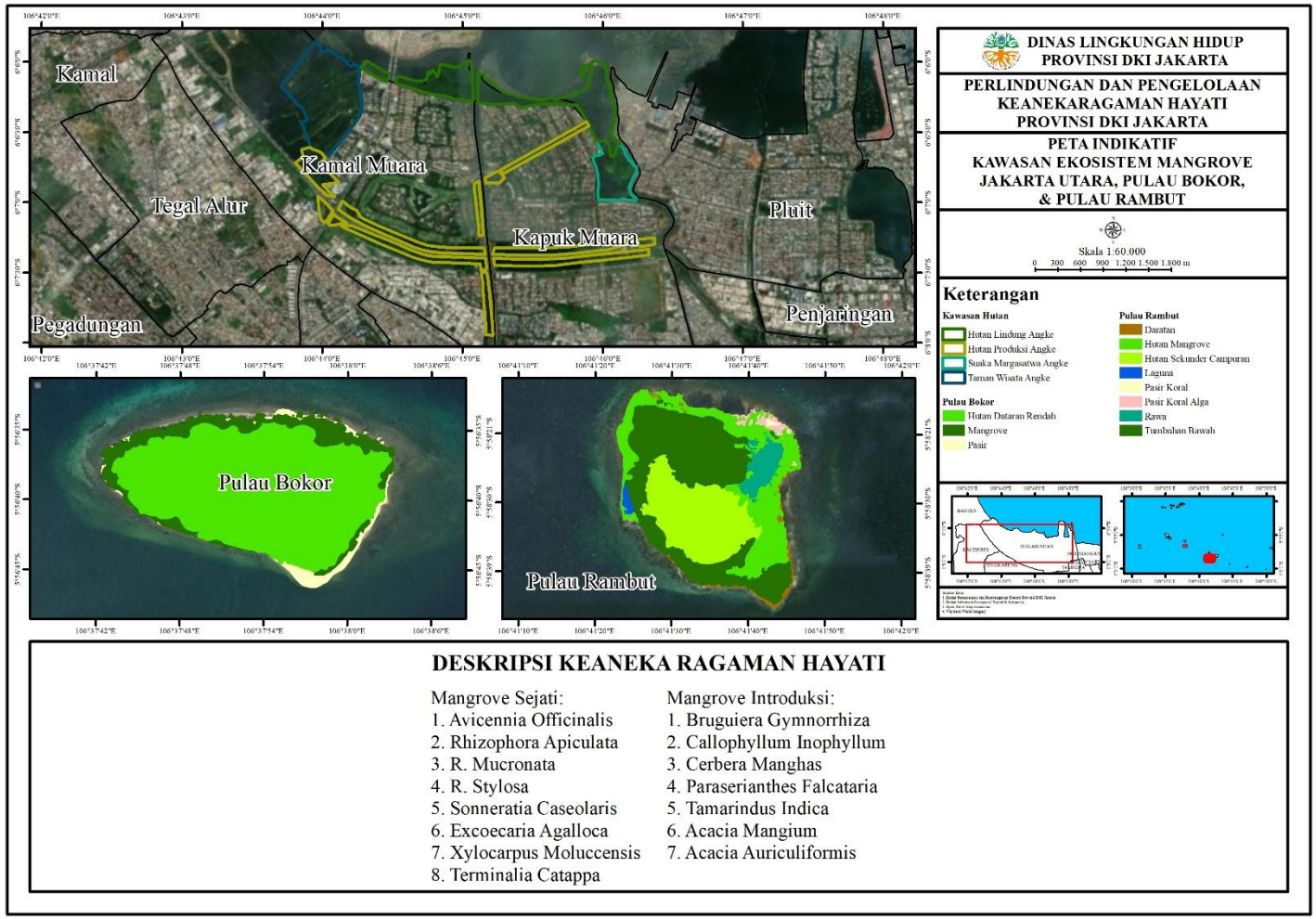

Lampiran 7. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Hutan Kota Sanggabuana

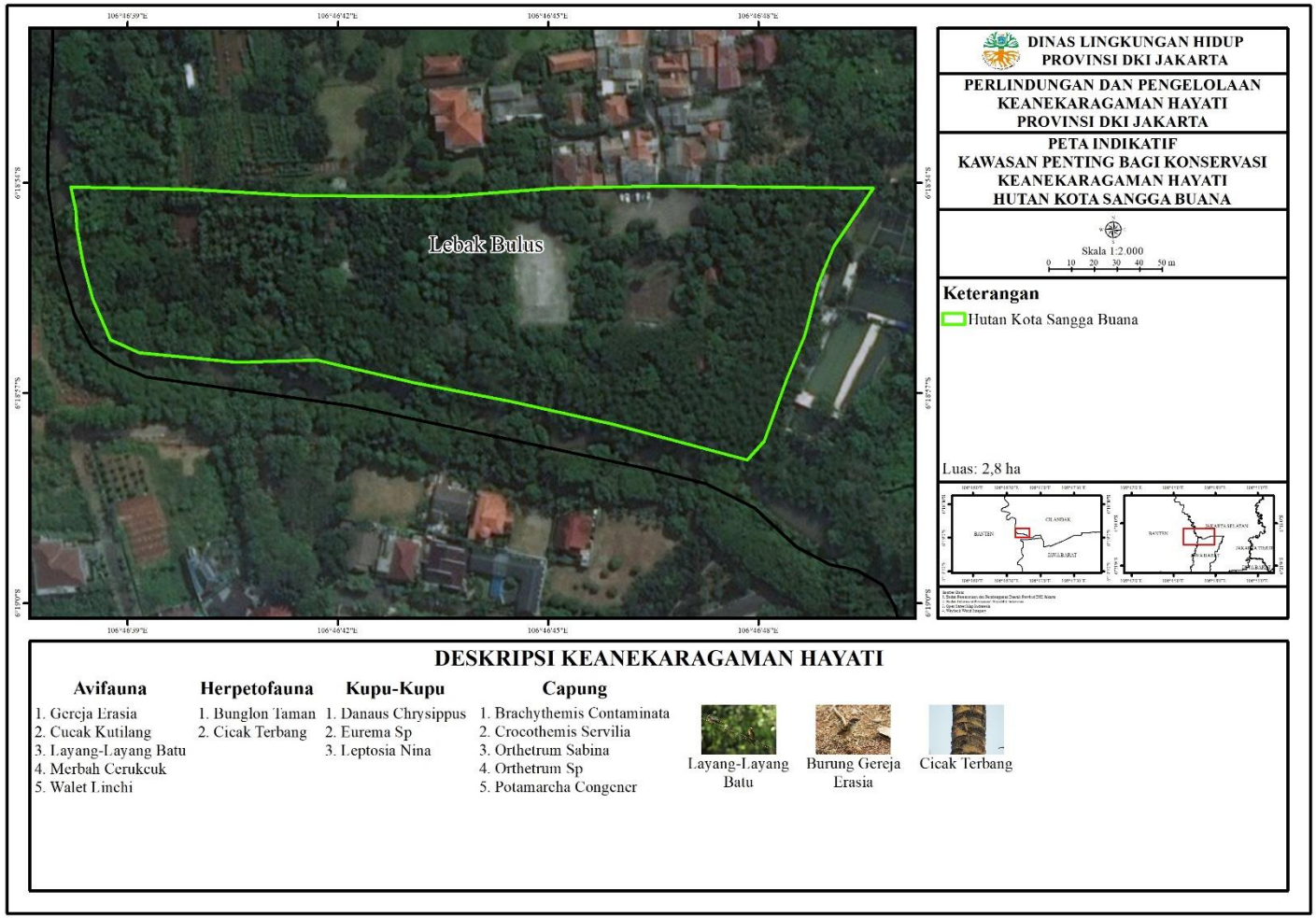

Lampiran 8. Peta Indikatif Usulan Kawasan Penting Bagi Konservasi Kehati : Taman Honda Tebet

LAMPIRAN 9. Hasil Penelahaan Dokumen Perencanaan/Renstra

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
1.	Dinas Kehutanan	Peningkatan Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau	Adanya Undang-Undang tentang Penataan Ruang	Belum adanya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Hutan	Pengadaan Tanah untuk RTH Hutan Luas	Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan	Penambahan Rasio RTH Hutan
		Peningkatan Konservasi Flora Fauna untuk meningkatkan daya dukung lingkungan	Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Masih tumpang tindihnya kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Adanya tuntutan masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas	Tingginya tingkat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbangun			Pembangun an RTH Hutan	Luas RTH hutan yang dibangun	Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan
		Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Status Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara	Belum terdapat Rencana Induk (Master Plan) RTH Provinsi DKI Jakarta	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta				Pemeliharaa n RTH Hutan	Jumlah lokasi RTH hutan yang dipelihara	
			Adanya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Belum adanya SOP yang memadai tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Semakin buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau			Penataan RTH Hutan	Jumlah lokasi RTH hutan yang ditata	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
						Kurangnya perencanaan pembangunan yang komprehensif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan			Pengamana n Hutan Kota, TPK dan Pos Peredaran, Patroli Pengawasan dan Pengendalia n Terpadu RTH Hutan	Jumlah personel pengamanan RTH hutan	
									Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Jumlah personel polisi kehutanan yang ikut peningkatan kapasitas	
						Menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah DKI Jakarta			Pembinaan Saka Wana Bhakti	Jumlah masyarakat yang terbina melalui kegiatan Saka Wana Bhakti	
									Operasi Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar	Jumlah penyelenggar aan kegiatan operasi pengendalian tumbuhan dan satwa liar	
									Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah penyelenggar aan kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan	
									Penyusunan Kebijakan di Bidang Kehutanan	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
										Kehutanan yang tersusun	
									Penanganan dan Penyelesaia n Kasus di Dinas Kehutanan	Jumlah kasus yang tertangani dan terselesaikan	
								Program Pengelolaan Pertamanan	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman	Luas lahan yang dibebaskan untuk RTH taman	Penambahan Rasio RTH Taman
									Pembangun an Ruang Terbuka Hijau Taman	Luas RTH taman yang terbangun	Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara
									Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau	Luas RTH taman jalur hijau yang terbangun	
									Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit	Luas RTH kebun bibit yang terbangun	
									Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman	Persentase RTH taman yang terpelihara	
									Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau	Persentase RTH taman jalur hijau yang terpelihara	
									Pemeliharaa n Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit	Jumlah RTH kebun bibit yang terpelihara	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
									Penataan RTH Taman	Jumlah RTH taman yang ditata	
									Penataan RTH Taman Jalur Hijau	Jumlah RTH taman jalur hijau yang tertata	
									Penataan RTH Kebun Bibit	Luas RTH kebun bibit yang tertata	
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit	Jenis sarana dan prasarana kebun bibit yang diadakan	
							Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dengan didukung penyediaan saran dan prasarana yang memadai	Program Konservasi Satwa	Pengadaan Makanan Satwa TMR	Pengadaan Makanan Satwa TMR per tahun	Penambahan jumlah satwa yang dikonservasi
									Pengadaan Makanan Satwa TMR	Pengadaan Makanan Satwa TMR per tahun	
								Program Konservasi Flora dan Fauna	Pengadaan Makanan Satwa TMR	Pengadaan Makanan Satwa TMR per tahun	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi
									Pengadaan Obat Satwa	Pengadaan Obat Satwa per tahun	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
2.	Dinas Sumber Daya Air	Isu Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan infrastruktut bidang sumber daya air	Koordinasi antar unit kerja perlu ditingkatkan	Pesatnya pembangunan teknologi yang dapat menunjang kinerja dalam pembangunan	Keterbatasan lahan untuk pembangunan sumber daya air	Membanguun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir	Program Pengendali Banjir dan Abrasi	Pengadaan Tanah Sungai dan Saluran	Luas Tanah yang tersedia	Presentase penanganan yang kurang dari 2 jam Presentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas abrasi
		Isu Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kompetensi SDM yang cukup	Data aset yang kurang tertata	Dukungan Lembaga legislative dalam pembangunan sumber daya air	Adanya mansyarakat yang menempati DAS	Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali abrasi		Pengadaan Tanah Waduk	Luas Tanah yang tersedia untuk pembangunan Waduk	
		Isu Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah pasukan biru yang memadai	Tidak adanya kajian atau masterplan terbaru terkait pengendalian banjir	Adanya partisipasi masyarakat dan swasta untuk pembiayaan alternatif	Kurangnya penyedia jasa kompeten dalam realisasi proyek dinas sumber daya air	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih		Penambahan Pasir Pantai	Panjang pantai di Kepulauan Sribu yang dilakukan restorasi	
			Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan yang memadai				Membangun dan mengelola sistem pengolahan air limbah	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Lokasi untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah	Presentase Cakupan Layanan sistem pengelolaan air limbah
			Memiliki Fasilitas *command center* untuk mengawasipintu-pintu air dan rumah pompa di DKI Jakarta								

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Timbulan Sampah	Isu lingkungan dan kebersihan merupakan isu global	Masih lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor	Peningkatan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mengoptimalkan fungsi dinas sebagai operator maupun sebagai regulator.	Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Alat Berat Kebersihan Air	Jumlah alat berat kebersihan air yang tersedia	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA
		Rasio TPS yang stagnan	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan tata kelola pemerintahan yang baik.	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.	Kerjasama dalam dan luar negeri dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dimanfaat.	Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.	Meningkatkan cakupan pelayanan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)		Pengadaan Tong Sampah	Jumlah tong sampah yang disediakan	
		Jakarta belum memiliki ITF (Intermediate Treatment Facility) dalam kota	Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai penyelenggara pengelolaan sumberdaya alam.	Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan	Peningkatan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih mengoptimalkan fungsi dinas sebagai operator	Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.	Mengintegrasikan upaya pencegahan pencemaran melalui kebijakan		Pengadaan Tempat Sampah Pilah Jepit	Jumlah tempat sampah pilah jepit yang	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
				lingkungan hidup masih bersifat parsial.	maupun sebagai regulator.						
		Pencemaran Lingkunga							Pengadaan Kontainer Kebersihan	Jumlah kontainer kebersihan yang	
		Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup perkotaaan							Pengawasan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan	Jumlah retail yang diawasi	
		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup							Penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah teknologi pengelolaan sampah skala komunal yang dikembangkan	
		Percepatan Pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)							Pembangunan Model Pengelolaan Lingkungan	Jumlah teknologi yang diterapkan	
									Pemberdayaan Usaha dan Produk Daur Ulang Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan pameran produk daur ulang ramah lingkungan	
									Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jenis/kategori penghargaan	
									Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	Pengelolaan Lingkungan Bersih, Hijau dan Sehat	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
								Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah	Jumlah titik pemantauan kualitas air tanah	Penurunan Tingkat Pencemaran Air
									Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	
									Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk	Jumlah titik pemantauan kualitas air situ/waduk	
									Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan perairan laut dan muara Teluk Jakarta	
									Inventarisasi Kerusakan Lingkungan di Kelurahan Pulau Panggang	Baku kerusakan yang diinventarisasi	
									Pengadaan Prasarana Sarana Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Jumlah pengadaan prasarana dan sarana pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan	
									Pengolahan Air Limbah dan Pemeliharaan IPAL Laboratorium	Jumlah IPAL yang dilakukan pemeliharaa	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
								Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Inventarisasi dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta	Jumlah sektor yang diinventarisasi	Penurunan Tingkat Pencemaran Udara
									Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan capaian reduksi emisi gas rumah kaca dari aksi-aksi pengendalian dampak perubahan iklim	
									Pemantauan Kualitas Lingkungan disekitar TPST Bantar Gebang dan SPA Sunter	Frekuensi pemantauan TPST Bantar Gebang SPA Sunter dan TPS di DKI Jakarta	
									Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (emisi tidak bergerak)	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan pencemaran udara sumber emisi tidak bergerak	
								Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kota dan Sarana Penunjangnya	Jumlah TPS Limbah B3 Skala Kota yang dibangun	Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3
									Pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan dan Sarana Penunjangnya	Jumlah TPS Limbah B3 Skala Kota yang dibangun	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
4	Dinas Kelautan dan Pertanian	Perlu kefokusan dalam penambahan luas lahan hutan kota, penganekaragaman hayati komponen ekosistem hutan kota, dan pengendalian peredaran hasil hutan	Dukungan atas program dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan kementerian yang terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan)	Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung pembangunan di bidang kelautan, peternakan, perikanan, pertanian, dan kehutanan	Potensi sumber daya kelautan, baik sebagai tempat perkembang-biakan ikan laut, potensi ekowisata, dan agrowisata	Pertumbuhan penduduk dan masyarakat yang mengkonsumsi pangan di wilayah Jakarta yang meningkat pesat	Menerapkan program konservasi keanekaragaman flora dan fauna	Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau			
		Perlu peningkatan ekosistem laut dan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Akses pasar yang mudah baik dari segi transportasi maupun informasi dalam memasarkan hasil budidaya olahan hasil laut, ternak, ikan hias, tanaman hias	Ketergantungan kebutuhan yang tinggi atas komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil hutan dari luar Provinsi DKI Jakarta	Luas wilayah DKI Jakarta yang lebih kecil dibanding dengan provinsi lain, sehingga lebih mudah dipantau dan dikendalikan secara fisik	Kerusakan ekosistem tempat berkembang biak ikan laut	Menerapkan program peningkatan ruang terbuka hijau.	Program Konservasi Flora dan Fauna			
						Berkurangnya areal dan sulitnya perluasan RTH yang disebabkan peralihan peruntukkan dan pembebasan lahan	Menerapkan program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Kelautan			
							Menerapkan program pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.	Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis			

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
							Menerapkan program peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan berkelanjutan.	Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan			
							Menerapkan program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap			
							Menerapkan program pengolahan dan pengawasan peredaran hasil hutan.	Program Peningkatan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan			
							Menerapkan program konservasi keanekaragaman flora dan fauna.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
5	Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu	Pemanfaatan Nilai Keekonomian Kawasan Konservasi	Eksistensi Taman Nasional Kepulauan Seribu telah terakomodir dalam dokumen RTRW dan turunannya	Masih adanya pola pikir konservatif bahwa pemanfaatan jasa lingkungan merupakan bentuk eksploitasi ekstraktif pada sumberdaya alam hayati	Minat masyarakat untuk bergaya hidup back to nature semakin meningkat	Pencurian dan perdagangan illegal sumberdaya alam dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu masih terjadi	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
		Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Letak geografis yang strategis dan mudah dijangkau	Ketersediaan data dan informasi untuk mendukung promosi dan pemasaran Konservasi Alam belum optimal	Kesempatan masyarakat sekitar TN untuk terlibat dalam usaha jasa lingkungan tinggi	Masih terjadi kegiatan destruktif fishing seperti muroami, penggunaan kompresor (termasuk potasium dan pengeboman ikan skala kecil)	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan			Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	
		Kerentanan Keanekaragaman Hayati	Para pihak di lingkup internal maupun eksternal mengharapkan diupayakannya optimalisasi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi	Kewenangan internal di Kementerian LHK dan antara Kementerian LHK dengan Pemda dan sektor lain belum sinergis di bidang pemanfaatan jasa lingkungan	Event-event internasional dan atau nasional sebagai upaya promosi dan pemasaran jasa lingkungan telah terjadwal sehingga membuka peluang investasi	Batas kawasan masih imaginer (rambu batas dan zonasi selalu hilang dan tidak jelasnya batas kawasan yang terpengaruh pasang surut laut)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan			Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	
		Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	Dukungan sejumlah peraturan perundangan	Distribusi manfaat konservasi sumberdaya alam belum menyentuh seluruh segmen masyarakat	Sinergisitas komitmen dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pariwisata alam	Kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan dan pengembangan kegiatan masyarakat masih sangat terbatas				Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	
		Peningkatan Peran Serta Swasta	Hubungan dan kerjasama yang harmonis antara Balai Taman Nasional	Peraturan bidang kehutanan dan perikanan belum	Peluang investasi di bidang jasa lingkungan yang cukup tinggi	Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha pariwisata alam				Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan	

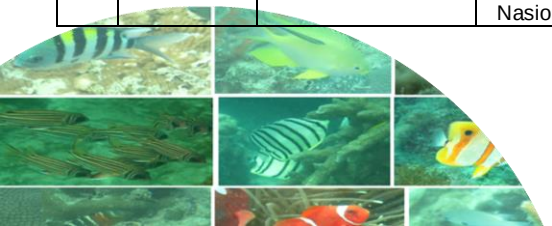

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
			Kepulauan Seribu dengan stakeholders terkait dan masyarakat lokal	sepenuhnya dapat diterapkan		masih kurang menarik				efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	
		Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat	Potensi jasa lingkungan yang sangat besar	Sarana dan prasarana wisata alam belum memadai	Ketergantungan terhadap sumberdaya perikanan dan kelautan yang tinggi	Pencemaran limbah minyak (tarball) yang terjadi hampir setiap tahun				Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	
			Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap kegiatan konservasi dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu	Kapasitas kelembagaan (anggaran dan SDM)	Peredaran TSL dari dalam Taman Nasional hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat	Tumpang tindih pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di dalam kawasan konservasi (yang di kembangkan oleh KKP);				Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	
					Penerapan PP 12 Tahun 2014	Kebutuhan material pembangunan untuk memenuhi kebutuhan				Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
						primer (bukan untuk usaha) masyarakat setempat seperti batu karang dan pasir laut				kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	
						Reklamasi dalam rangka pembangunan wilayah (pembangunan dermaga, pemukiman dan fasilitas umum lainnya).				Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	
						Pengedaman/ pembangunan pemecah ombak menyebabkan hilangnya akses Penyu untuk bertelur				Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	
						Adanya Gosong karang timbul yang di klaim dan diperjualbelikan oleh masyarakat				Jumlah ketersidiaan data dan informasi sebaran spesies dan genetic yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	

NO	INSTANSI	ISU-ISU STRATEGIS*)	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS**)				IDENTIFIKASI STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN*)				
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	IKK	IKU
						Implementasi UU No. 1 Tahun 2014				Jumlah pusat pengembang biakan dan suaka margasatwa spesies terancam punah tebangun 50 unit	
										Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	

Lampiran 10. Hasil Penelahaan Dokumen IBSAP 2015-2020

No	Materi Telaahan	Uraian
1.	Indentifikasi Tantangan Konservasi keanekaragaman Hayati	**1. Tantangan Pemanfaatan** Dalam Dokumen IBSAP terdapat berapa tantangan yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan kenekeragaman hayati di Indonesia, yaitu: a. kehati belum memberi dampak kesejahteraan dan peningkatkan ekonomi mas- yarakat, padahal banyak kekayaan hayati Indonesia yang bisa digunakan sebagai bahan pangan, farmasi, obat dan kosmeti- ka, akan tetapi masih belum tergali dan dipetakan secara maksimal. b. Pemanfataan kehati yang tidak bertanggung jawab akan sangat merusak keberadaan kehati dan merugikan manfaat kehati yang seharusnya berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Tiga jenis tantangan pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab adalah: (i) "penambangan" kehati dari habitatnya yang melebihi daya tumbuh (regenerasi) kehati; (ii) perdagangan kehati tidak bertanggungjawab; dan (iii) pola pemanfataan yang "mengerosi" kegiatan masyarakat berbsis kearifan lokal. c. Pengembangan teknologi pemanfaatan kehati yang berkelanjutan d. Kelemahan kebijakan memungkinkan terjadinya perambahan hayati atau biopirasi, yaitu perambahan bahan hayati dan pengetahuan yang melekat pada bahan hayati tanpa persetujuan dari masyarakat maupun negara sedang berkem- bang setelah pihak- pihaknya mendapatkan informasi yang memadai. **2. Tantangan Pengelolaan Kehati** Tantangan pengelolaan kehati adalah pemutakhiran kegiatan pelestarian kehati dan pendataannya di setiap K/L yang berwenang. Kesadaran untuk memutakhirkan hasil riset ke dalam basis data perlu ditingkatkan. Pemutakhiran perlu dilakukan baik karena: a. Penemuan baru karena penelitian dasar yang terus dilakukan; b. Pemutakhiran karena pemantauan kondisi stok kehati yang kurang terpelihara dan kerusakan lainnya; c. Pemutakhiran karena berkembangnya pengetahuan tentang manfaat kehati. Pemurakhiran data ini pent- ing sebagi dasar untuk "pengakuan" ke dunia interna- sional tentang kepemilikan kehati, sehingga dapat di- jadikan dasar pula sebagai penentuan mekanisme dan pembagian manfaat (benefit sharing). **3. Tantangan Kelembagaan dan Sumbedaya** Tantangan kelembagaan dan sumberdaya meliputi: **a. Tantangan di Bidang Regulasi** a) Perlunya peraturan turunan dari peraturan kehati yang sudah ada. Peraturan turunan perlu disusun dalam konteks pengelolaan kehati kekinian dan dise- suaikan dengan tantangan saat ini dan ke depan. b) Perlunya instrumen pelaksanaan peraturan yang me- nonjolkan pentingnya pengelolaan kehati dengan uku- ran manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan pengambil keputusan. Hal ini perlu karena kesadaran akan pentinngnya kehati masih rendah. c) Regulasi perlu mengedepankan ketersediaan ruang untuk menjaga eksositem sebagai nilai yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari penggu- naan ruang tersebut untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. **b. Kesadaran Lembaga dan Balai Kliring** a) Perlu penguatan kapasitas K/L untuk menjalankan perannya dalam pengelolaan kehati, dengan kejelasan SOP, indikator kinerja hasil dan hubungannya dengan manfaat sasaran pengelolaan kehati. b) Masing-masing lembaga perlu mendokumentasikan proses dan hasil/output pengelaan kehati serta manfaat/outcome dalam jangka menengah atas pengelo- laan kehati. Pengelolan dilakukan dalam suatu system yang transparan dan selaras (compat- ible)

No	Materi Telaahan	Uraian
		dengan sub-sistem K/L lain da menyatu /terhubung dengan sistem bliring di Balai Kliring Kehati. c) Koordinator simpul dalam sistem kliring perlu secara konsisten dan kon- tinyu menjalankan fungsinya sebagai focal point dalam sistem internasional untuk merealisasikan dan menegas- kan penguasaan atas kehati Indonesia dan memperkuat eksistensi kepemilikan kehati nasional sebagai bagian dari jati diri Neg- ara Indonesia d) Balai kliring perlu diperkuat dan dilengkapi dengan sistem yang menjadi koridor dan mekanisme kliring untuk semua pihak, terutama antar K/L di Indonesia. **c. Tantangan di Bidang Sumberdaya Manusia** a) Kesadaran untuk menghargai kepakaran milik na- sional dan lokal perlu ditingkatkan. b) Penguasaan kehati dalam berbagai aspek, pemaha- man, pengelolaan dan pemanfaatan harus dibangun sejak awal, meskipun akan memerlukan waktu untuk meyakinkan banyak pihak **d. Tantangan di Bidang Kerjasama Pengelolaan Kehati, Pendanaan dan Mobilisasinya** a) Perlu penyusunan kebijakan pengelolaan kehati yang memberikan ruang pengelolaan kehati yang semesti- nya dan dapat menyeimbangkan kebutuhan saat ini serta mengedepankan kepentingan pelestarian untuk jangka panjang. b) Kebijakan pengelolaan kehati nasional harus menja- di acuan dan landasan kerjasama pelestarian dan pe- manfaatan kehati dengan parapihak dalam negeri dan internasional. c) Pendanaan dan mobilisasi juga masih “kon- servatif” menggunakan pola-pola pendanaan dengan pola pembangunan sektor lain yang bersifat tangible, dan belum meng-eksplorasi berbagai model pendanaan, d)
2.	Visi	Terpeliharanya kehati milik Indonesia, serta terwujudnya pengembangan kehati dalam menyumbang daya saing bangsa dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang” Berdasarkan visi tersebut terdapat tiga hal utama: 1. Kelestarian kenakeragaman hayati 2. Pengembangan kehati untuk meningkatkan daya saing bangsa secara adil berjelanjutan 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang
3.	Misi	Terdapat tiga misi dalam IBSAP 2015-2020, yaitu: 1. Meningkatkan penguasaan kehati Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia. 2. Menjadikan kehati sebagai sumber kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. 3. Mengelola kehati secara bertanggungjawab demi keberlanjutan kehidupan Dunia

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 671 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kelestarian dan pengembangan nilai manfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan dan penyusunan perencanaan konservasi hayati secara terpadu, menyeluruh, efektif dan partisipatif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanaman Nusantara Khas Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

KETIGA : Rincian tugas keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   u.p. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
   Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 671 TAHUN 2019
Tanggal 18 April 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Unsur Direktorat Lingkungan Hidup Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
2. Unsur Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Unsur Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
4. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5. Unsur Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6. Unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
7. Unsur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi DKI Jakarta Kementerian Pertanian Republik Indonesia
8. Unsur Pusat Penelitian Biologi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9. Unsur Pusat Penelitian Oseanografi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

16. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor
25. Unsur Pusat Kajian Lingkungan dan Konservasi Alam dan Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tropis Universitas Nasional
26. Unsur Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
27. Unsur Flora & Fauna International-Indonesia Programme
28. Unsur Yayasan Lamun Indonesia
29. Unsur Yayasan Terumbu Karang Indonesia
30. Unsur Lembaga Kebudayaan Betawi
31. Unsur Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Provinsi DKI Jakarta
32. Unsur Yayasan Harapan Kita Taman Mini Indonesia Indah
33. Unsur PT Taman Impian Jaya Ancol
34. Unsur PT Jakarta Akuarium Indonesia

Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 671 TAHUN 2019
Tanggal 18 April 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Pengarah :

a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

2. Ketua :

a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
c. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
d. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Wakil Ketua :

membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

4. Sekretaris :

a. memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
c. menyusun laporan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

5. Anggota :

a. menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan;
b. menyusun rencana aksi pengelolaan tanaman nusantara khas Kota Jakarta untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata dan kebudayaan;
c. menyusun rencana aksi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
d. memberikan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
e. menghadiri rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
f. melaksanakan perbaikan atas verifikasi dan validasi data Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

6. Sekretariat :

a. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi/verifikasi dan validasi data penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
c. melaksanakan pengadministrasian data, informasi dan surat menyurat dalam rangka kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ANIES BASWEDAN